



LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

TAHUN 2024



Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan memanjatkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Belitung Tahun 2024 dapat diselesaikan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Belitung Tahun 2024 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun anggaran 2024. Penyusunan Laporan kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substansif Laporan Kinerja ini berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, alat kendali, dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung. Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Belitung Tahun 2024 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026. Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bupati Belitung Tahun 2024.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Kabupaten Belitung tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yaitu masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya demi mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Belitung Tahun 2024 ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan Tahun 2024 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan peningkatan kinerja dan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Tanjungpandan, Februari 2025

Pj. BUPATI BELITUNG,



**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Tanjungpandan, 21 Maret 2025

Inspektur Kabupaten Belitung,


PABYANTA, S.Pd, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196701281989031003

Ikhtisar Eksekutif

Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024 merupakan pertanggungjawaban kinerja yang harus disampaikan kepada masyarakat secara transparan yang memiliki nilai moral dari kinerja yang telah dilakukan, selain itu pertanggungjawaban tersebut perlu disampaikan kepada pemerintah pusat secara administratif melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai perjalanan Reformasi Birokrasi, *Public Service and Civil Service* dalam periode satu tahun anggaran.

LKjIP tidak hanya sekadar alat akuntabilitas, akan tetapi juga sebagai sarana strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini setiap Perangkat Daerah dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tahun 2024 merupakan tahun pertama dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026. Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 dan Peraturan Bupati Belitung Nomor 22 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024 – 2026.

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024 ditetapkan 4 tujuan 8 sasaran dengan 12 Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada 3 misi dalam RPD Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 yang dijelaskan sebagai berikut:

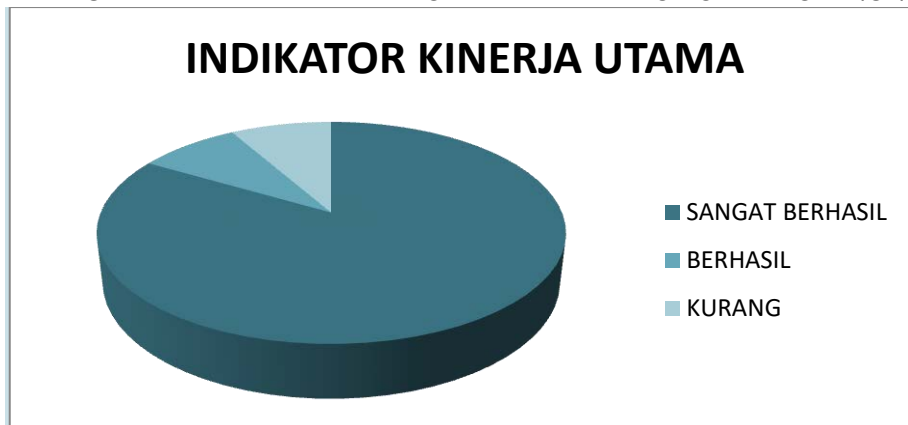
- Misi Pertama “Memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan, khususnya perikanan dan pariwisata secara optimal dan berkelanjutan serta mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi pembangunan sarana dan prasarana perhubungan sebagai penunjang aktivitas ekonomi perikanan dan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat” terdiri dari 1 tujuan, 3 sasaran dan 4 indikator kinerja utama.
- Misi Kedua “Meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi masyarakat serta para stakeholder lainnya dalam pembangunan daerah ” terdiri dari 2 tujuan, 4 sasaran dan 7 indikator kinerja utama.
- Misi Ketiga “Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan” terdiri dari 1 tujuan, 1 sasaran dan 1 indikator kinerja utama.

Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

1. 10 Indikator atau 83,34% dengan kategori Sangat Berhasil
2. 1 Indikator atau 8,33% dengan kategori Berhasil
3. 1 Indikator atau 8,33% dengan kategori Kurang

Dalam Tahun Anggaran 2024, untuk pencapaian kinerja 8 (delapan) sasaran strategis dan 12 Indikator Kinerja Utama (IKU) pada RPD Kabupaten Belitung yang dilaksanakan pada Badan, Dinas dan Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung dianggarkan melalui Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024.

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DALAM PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024



Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan dari setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Belitung ke depan. Walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik. Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan berbagai unsur baik Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Kepulauan Bangka Belitung, dan daerah-daerah lain maupun juga dengan pihak-pihak di luar pemerintah.

Tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai. Bagi instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung sendiri, sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh OPD di lingkungan Kabupaten Belitung untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang, utamanya dalam rangka memberikan peningkatan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.4. Sistematika Pelaporan	3
1.5. Gambaran Umum Kabupaten Belitung	4
1.5.1. Letak Geografis dan Luas Wilayah	4
1.5.2. Iklim	4
1.5.3. Topografi	4
1.5.4. Wilayah Administratif	5
1.5.5. Penduduk	5
1.5.6. Ketenagakerjaan	7
1.5.7. Pendidikan	7
1.5.8. Kesehatan	8
1.5.9. Pertanian	9
1.5.10. Pariwisata	9
1.5.11. Pertumbuhan Ekonomi	10
1.5.12. Pembangunan Manusia	11
1.5.13. Struktur Ekonomi	12
1.5.14. Struktur Organisasi	13
1.5.15. Personil/Pegawai	14
1.5.16. Isu Strategis Daerah	15
BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	20
2.1. Perencanaan Kinerja.....	20
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	24
2.3. Rencana Anggaran Tahun 2024.....	25

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	27
3.1. Pencapaian Indikator Kinerja Utama.....	29
3.2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	31
3.2.1. Tujuan 1 : Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.....	34
Sasaran 1 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ...	37
Sasaran 2 : Menurunnya Kemiskinan Penduduk	43
Sasaran 3 : Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	50
3.2.2. Tujuan 2: Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	65
Sasaran 4 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	68
Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	86
3.2.3. Tujuan 3: Terwujudnya Pelayanan Birokrasi yang Bersih, Inovatif, Profesional, Akuntabel dan Transparan	95
Sasaran 6 : Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel.....	101
Sasaran 7 : Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional	108
3.2.4. Tujuan 4: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	112
Sasaran 8 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Air, Udara dan Tutupan Lahan.....	114
3.3. Akuntabilitas Keuangan.....	123
3.3.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah	123
3.3.2. Pengelolaan Belanja Daerah.....	125
3.3.3. Kondisi Pembiayaan Daerah	126
3.3.4. Capaian Keuangan	127
Capaian Prestasi Dan Penghargaan Yang Diterima Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024.....	129
BAB 4 PENUTUP	130
LAMPIRAN	

Daftar Tabel

Tabel 1.1.	: Jumlah Desa/ Kelurahan Menurut Kecamatan, 2024	5
Tabel 1.2.	: Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun Menurut Kecamatan, 2024	6
Tabel 1.3.	: Luas Daerah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan, 2024 .	6
Tabel 1.4.	: Rasio Jenis Kelamin menurut Kecamatan, 2023	6
Tabel 1.5.	: Penduduk Usia Kerja Menurut Kegiatan Utama, TPAK dan TPT, 2023	7
Tabel 1.6.	: Jumlah SD menurut Kecamatan, 2024.....	8
Tabel 1.7.	: Jumlah SMP menurut Kecamatan, 2024	8
Tabel 1.8.	: Jumlah Rumah Makan/Restoran Menurut Kecamatan	10
Tabel 1.9.	: Jumlah Kunjungan Tamu Asing dan Domestik, 2024.....	10
Tabel 1.10.	: Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Belitung.....	14
Tabel 1.11.	: Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Belitung	15
Tabel 2.1.	: Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024	23
Tabel 2.2.	: Perubahan Perjanjian Kinerja Kabupaten Belitung Tahun 2024.....	24
Tabel 2.3.	: Rencana Anggaran Kabupaten Belitung Tahun 2024	25
Tabel 3.1.	: Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024	29
Tabel 3.2.	: Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024	31
Tabel 3.3.	: Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024.....	32
Tabel 3.4.	: Pencapaian Kinerja Indikator Sasaran Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024	32
Tabel 3.5.	: Capaian Kinerja Tujuan Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Belitung Tahun 2024	34
Tabel 3.6.	: Tabel Gini Rasio Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021-2023.....	35
Tabel 3.7.	: Sasaran dan Strategi Pencapaian Tujuan 1.....	36
Tabel 3.8.	: Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.....	37
Tabel 3.9.	: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Belitung 2022 – 2024, (milyar rupiah) ADHK 2010.....	38
Tabel 3.10.	: Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Belitung 2022 – 2024, ADHB.....	39
Tabel 3.11.	: Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2022–2024	39
Tabel 3.12.	: Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Kabupaten di Prov. Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022-2024.....	40
Tabel 3.13.	: Realisasi Keuangan Program penunjang Sasaran Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan Tahun 2024	41
Tabel 3.14.	: Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Kemiskinan Penduduk	43
Tabel 3.15.	: Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Belitung Tahun 2024 (per Maret)	48
Tabel 3.16.	: Realisasi Keuangan Program penunjang Sasaran Menurunnya kemiskinan penduduk Tahun 2024.....	50
Tabel 3.17.	: Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan infrastruktur kewilayahan	50
Tabel 3.18.	: Target dan Realisasi Kinerja Meningkatkan Infrastruktur ke-PU-an	51
Tabel 3.19.	: Jumlah Pelanggan Aktif UPT PAM Dinas PUPR Kabupaten Belitung Tahun 2024.....	55

Tabel 3.20.	: Target dan Realisasi Kinerja Meningkatnya Infrastruktur Permukiman.....	57
Tabel 3.21.	: Realisasi Pemenuhan PSU Permukiman Tahun 2024.....	58
Tabel 3.22.	: Target, Realisasi dan Capaian Program untuk Sasaran Pemenuhan PSU Permukiman	58
Tabel 3.23.	: Pembangunan PSU di Kabupaten Belitung Tahun 2024	60
Tabel 3.24.	: Data Trayek Penumpang Angkutan Jalan Kabupaten Belitung Tahun 2024	61
Tabel 3.25.	: Data Lintas Komersil dan Lintas Perintis Kabupaten Belitung Tahun 2024.....	62
Tabel 3.26.	: Rekapitulasi Data Kendaraan Lulus Uji Tahun 2024	63
Tabel 3.27.	: Rekapitulasi Data Kendaraan Tidak Lulus Uji Tahun 2024	63
Tabel 3.28.	: Data Fasilitas Perlengkapan dan Keselamatan Jalan Tahun 2024 .	63
Tabel 3.29.	: Realisasi Keuangan Program penunjang Sasaran Meningkatnya Infrastruktur Kewilayahan Tahun 2024.....	64
Tabel 3.30.	: Capaian Kinerja Tujuan Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	65
Tabel 3.31.	: Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Indonesia Tahun 2022 – 2024.....	66
Tabel 3.32.	: Komponen Penyusun IPM Kabupaten Belitung Tahun 2022 – 2024	67
Tabel 3.33.	: Sasaran dan Strategi Pencapaian Tujuan 2.....	68
Tabel 3.34.	: Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Derajat Kesehatan Masyarakat	68
Tabel 3.35.	: Perkembangan Angka Harapan Hidup Wilayah Bangka Belitung Tahun 2022 – 2024.....	69
Tabel 3.36.	: Tingkatan Akreditasi Puskesmas Tahun 2024.....	70
Tabel 3.37.	: Penyakit terbanyak tahun 2024	70
Tabel 3.38.	: Hasil kinerja upaya kesehatan masyarakat untuk 12 jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Kabupaten Belitung Tahun 2024.....	71
Tabel 3.39.	: Inovasi di lingkungan Dinas Kesehatan 2024.....	71
Tabel 3.40.	: Realisasi Keuangan Program penunjang Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Tahun 2024	86
Tabel 3.41.	: Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan	87
Tabel 3.42.	: Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid jenjang TK/PAUD di Kabupaten Belitung Tahun 2023/2024 - 2024/2025	92
Tabel 3.43.	: Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid jenjang SD di Kabupaten Belitung Tahun 2023/2024 - 2022/2025	92
Tabel 3.44.	: Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid jenjang SMP di Kabupaten Belitung Tahun 2023/2024 - 2024/2025.....	93
Tabel 3.45.	: Realisasi Keuangan Program penunjang Sasaran Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	95
Tabel 3.46.	: Capaian Kinerja Tujuan Terwujudnya Pelayanan Birokrasi yang Bersih, Inovatif, Profesional, Akuntabel dan Transparan	95
Tabel 3.47.	: Indeks Reformasi Birokrasi Kab. Belitung Tahun 2022-2024	96
Tabel 3.48.	: Perbandingan Indeks Reformasi Birokrasi Kab. Belitung Tahun 2023-2024 (Komponen dan Sub Komponen).....	96
Tabel 3.49.	: Hasil Evaluasi RB di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022-2023.....	99
Tabel 3.50.	: Sasaran dan Strategi Pencapaian Tujuan 2	100
Tabel 3.51.	: Capaian Kinerja Sasaran Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	101
Tabel 3.52.	: Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung	102

Tabel 3.53. : Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Belitung	104
Tabel 3.54. : Realisasi Keuangan Program penunjang Sasaran Terciptanya Birokrasi yang Bersih , Transparan dan Akuntabel.....	107
Tabel 3.55. : Capaian Kinerja Sasaran Terciptanya birokrasi yang inovatif dan professional.....	108
Tabel 3.56. : Tabel Perbandingan IP ASN Kabupaten Belitung Tahun 2021-2023	109
Tabel 3.57. : Realisasi Keuangan Program penunjang Sasaran Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional.....	111
Tabel 3.58. : Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup.....	112
Tabel 3.59. : Perbandingan Nilai IKLH Tahun 2022 sampai dengan 2024	113
Tabel 3.60. : Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	114
Tabel 3.61. : Perbandingan Nilai SO ₂ dan NO ₂ Tahun 2023 dengan 2024.....	116
Tabel 3.62. : Realisasi Keuangan Program penunjang Sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Air, Udara dan Tutupan Lahan Tahun 2024	121
Tabel 3.63. : Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024	124
Tabel 3.64. : Komposisi Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024.....	125

Daftar Grafik

Grafik 1.1. : Angka Harapan Hidup Kabupaten Belitung, 2024	8
Grafik 1.2. : Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 di Kabupaten Belitung (persen), 2020-2024.....	11
Grafik 1.3. : Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Belitung Tahun 2022-2024.....	12
Grafik 3.1. : Perkembangan persentase Penduduk Miskin (%) Kabupaten Belitung Tahun 2022-2024	43
Grafik 3.2. : PerkembanganGarisKemiskinan (Rp) Kabupaten Belitung Tahun 2022-2024	44
Grafik 3.3. : PerkembanganIndeksKedalaman Kemiskinan Kabupaten Belitung Tahun 2022-2024.....	45
Grafik 3.4. : Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Belitung Tahun 2022-2024.....	46
Grafik 3.5. : Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin(jiwa) Kabupaten Belitung Tahun 2022-2024.....	46
Grafik 3.6. : Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Belitung Tahun 2022-2024	47
Grafik 3.7. : Persentase Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Belitung	66
Grafik 3.8. : Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Belitung Tahun 2022 – 2024	68
Grafik 3.9. : Perkembangan Capaian RLS Kabupaten Belitung terhadap Prov. Kep. Babel dan Nasional Tahun 2022 - 2024	68
Grafik 3.10. : Perkembangan APK Tahun 2022 – 2024	89
Grafik 3.11. : Perkembangan APM Tahun 2022-2024	89
Grafik 3.12. : Perkembangan Angka Putus Sekolah Kab. Belitung Tahun 2022 – 2024	91
Grafik 3.13. : Perbandingan Nilai IKLH Tahun 2022 sampai dengan 2024.....	113
Grafik 3.14. : Perbandingan Target dan Realisasi Nilai IKA 3(tiga) Tahun terakhir	115
Grafik 3.14. : Perbandingan Target dan Realisasi Nilai IKU 3 (Tiga) Tahun Terakhir 2022-2024	117
Grafik 3.14. : Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024	130

Daftar Gambar

Gambar 1.1.:	Peta Wilayah Kabupaten Belitung, 2024	5
Gambar 1.2.:	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 di Kabupaten Belitung (persen), 2020-2024	11
Gambar 1.3.:	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Belitung Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen), 2020-2024	13
Gambar 3.1.:	Capaian IKU Kabupaten Belitung 2024.....	30
Gambar 3.2.:	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten Tahun 2024.....	54
Gambar 3.3.:	Kegiatan pada Program Pengelolaan Sumber Daya Air	54
Gambar 3.4.:	Kegiatan Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Tahun 2024.....	54
Gambar 3.5.:	Sosialisasi Perda Retribusi serta Penarikan Retribusi	55
Gambar 3.6.:	Pengambilan Sampling Air	55
Gambar 3.7.:	Sosialisasi Edukasi Air dari SMA Anugerah Belitung dan Kegiatan UPT PAM Tahun 2024.....	55
Gambar 3.8.:	Kegiatan Pembangunan SPALD Tahun 2024	56
Gambar 3.9.:	Kegiatan Pengembangan Sistem Darinase Tahun 2024	56
Gambar 3.10.:	Kegiatan untuk Mendukung Sasaran Strategis Pemenuhan PSU Permukiman	60
Gambar 3.11.:	Bantuan Program Sistem Pendampingan Pendidikan dan Olahraga (SIMPOR) Tahun 2024.....	93
Gambar 3.12.:	Dokumentasi Penyerahan DPA Tahun 2025 secara simbolis sekaligus Laporan evaluasi kinerja Oleh Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024.....	60
Gambar 3.13.:	Pemerintah Kabupaten Belitung raih penghargaan pada Anugerah Meritokrasi 2023.....	111
Gambar 3.14.:	Pengujian Kualitas Air Sungai, Air Danau, dan Air Higiene Sanitasi di Kabupaten Belitung.....	116
Gambar 4.1.:	Pengujian Kualitas Air Sungai, Air Danau, dan Air Higiene Sanitasi di Kabupaten Belitung.....	116

1.1 LATAR BELAKANG

Akuntabilitas merupakan kewajiban dari pemegang amanah untuk memberikan tanggung jawab, menyajikan, mengungkapkan dan melaporkan seluruh aktivitas pemerintahan kepada pihak yang telah memberi amanah yaitu masyarakat (Mardiasmo, 2006).

Akuntabilitas kinerja menjadi salah satu area perubahan dalam Reformasi Birokrasi di Indonesia, yang merupakan bagian penting dalam konsep *good government*. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pasal 5 menjelaskan bahwa “penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta reviu dan evaluasi kinerja”.

Selanjutnya pada Pasal 18 disebutkan bahwa “Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan”. Adapun laporan kinerja dijelaskan sebagai ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Bertitik tolak dari Peraturan Bupati Belitung Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026, Peraturan Bupati Belitung Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026, dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024, serta mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka penyusunan LKjIP Tahun 2024 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan.

Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran, dengan demikian LKjIP Kabupaten Belitung Tahun 2024 menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah oleh Bupati kepada Presiden ini disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku.

1.2 LANDASAN HUKUM

Sebagaimana telah kita ketahui, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Artinya, menyusun laporan tersebut secara “Benar” dan “Tepat” sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggung jawab setiap instansi pemerintah. Hal ini merujuk pada aturan-aturan yang ada sebagai dasar atau pijakan hukum antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Peberantasan Korupsi.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permenpan) nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.
5. Peraturan Bupati Belitung Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026;
6. Peraturan Bupati Belitung Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Belitung Tahun 2024 ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah terhadap seluruh program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun, dalam rangka pencapaian tujuan strategis Pemerintah Daerah.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Belitung ini adalah sebagai informasi kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung yang terukur kepada Presiden selaku pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi Pemerintah Kabupaten Belitung untuk meningkatkan kinerja pemerintahannya.

1.4 SISTEMATIKA PELAPORAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, sistematika pelaporan Laporan Kinerja Kabupaten Belitung tahun 2024 sebagai berikut:

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Grafik

Daftar Gambar

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menyajikan penjelasan umum daerah Kabupaten Belitung, dengan penekanan kepada aspek strategis daerah serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi daerah.

Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja

Pada bab ini berisi ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
8. Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada Bab ini menginformasikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

1. Indikator Kinerja Utama Kabupaten Belitung 2024 - 2026
2. Rencana Kinerja Tahun 2024
3. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024
4. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2024

1.5 GAMBARAN UMUM KABUPATEN BELITUNG

1.5.1. LETAK GEOGRAFIS DAN LUAS WILAYAH

Kabupaten Belitung dengan luas wilayah daratan dan lautan sebesar 8.656,69 km², terdiri dari daratan dengan luas 2.293,69 km² dan luas wilayah lautan yaitu 6.363 km². Luas wilayah daratan berdasarkan letak wilayah di tiap kecamatan, yaitu a) Kecamatan Membalong dengan luas wilayah 909,55 km²; b) Kecamatan Tanjungpandan dengan luas wilayah 378,45 km²; c) Kecamatan Badau dengan luas wilayah 458,20 km²; d) Kecamatan Sijuk dengan luas wilayah 413,99 km²; dan e) Kecamatan Selat Nasik dengan luas wilayah 133,50 km². Secara geografis, Kabupaten Belitung terletak antara 107°08"-107°58" BT dan 02°30"-03°15" LS, dengan batas wilayah meliputi :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Belitung Timur;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Gaspar.

Sebagai bagian dari wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Belitung juga merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 163 buah pulau besar dan kecil. Pulau yang terbesar adalah Pulau Belitung, disamping itu masih ada pulau besar lainnya seperti Pulau Seliu, Pulau Mendanau, dan Pulau Nadu. Penyebaran pulau di setiap kecamatan digambarkan melalui tabel berikut :

1.5.2. IKLIM

Kabupaten Belitung mempunyai iklim tropis dan basah dengan curah hujan pada tahun 2024 antara 42,30 mm/ tahun sampai dengan 577,30 mm/tahun dengan jumlah hari hujan 4 sampai 27 hari per bulan. Bulan dengan jumlah hari hujan 18 sampai 31 hari per bulan.

1.5.3. TOPOGRAFI

Daerah yang paling tinggi di Kabupaten Belitung hanya mempunyai ketinggian kurang lebih 500 m dari atas permukaan laut dengan puncak tertinggi ada di daerah Gunung Tajam. Sedangkan daerah hilir (pantai) terdiri atas beberapa Daerah Aliran Sungai utama, yakni:

- Sebelah Utara oleh Daerah Aliran Sungai Buding;
- Sebelah Selatan oleh Daerah Aliran Sungai Pala dan Kembiri;
- Sebelah Barat oleh Daerah Aliran Sungai Brang dan Cerucuk.

Keadaan tanah di Kabupaten Belitung umumnya didominasi oleh kuarsa dan pasir, batuan aluvial dan batuan granit.

Gambar 1.1.: Peta Wilayah Kabupaten Belitung, 2024



1.5.4 WILAYAH ADMINISTRATIF

Kabupaten Belitung dengan luas wilayah daratan 2.293,69 km² dan jumlah penduduk mencapai 186.331 jiwa pada tahun 2022 (berdasarkan proyeksi interim Sensus Penduduk 2020) dikepalai oleh seorang Bupati yang secara administratif dibantu oleh sekretaris daerah yang membawahi tiga orang asisten. Hingga saat ini, Kabupaten Belitung terdiri dari 42 buah desa dan 7 Kelurahan yang tersebar di lima kecamatan. yang terinci sebagai berikut :

Tabel 1.1.: Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan, 2024

Kecamatan	2024
Membalong	12
Tanjungpandan	16
Sijuk	10
Badau	7
Selat Nasik	4
Belitung	49

Sumber: Kabupaten Belitung Dalam Angka 2025, BPS Kabupaten Belitung

1.5.5 PENDUDUK

Jumlah penduduk penduduk yang telah terintegrasi di dinas penduduk dan catatan sipil pada tahun 2024 sebanyak 192.405 jiwa Apabila dilihat menurut kecamatan Tanjungpandan memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu sebesar 109,86 ribu jiwa dan Kecamatan Selat Nasik memiliki jumlah penduduk tersedikit yaitu 5,95 ribu jiwa. Rasio jenis kelamin sebesar 103, 64 artinya pada tahun 2024 untuk setiap 20.364 penduduk di Kabupaten Belitung terdapat 10.000

penduduk perempuan dan 10.364 penduduk laki-laki. Adapun tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Belitung mencapai 83,88 orang per km².

Tabel 1.2.: Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun Menurut Kecamatan, 2024

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk per tahun 2020-2024 (%)
Membalong	27,41	2,15
Tanjungpandan	109,86	6,6
Badau	15,81	4,26
Sijuk	33,37	6,45
Selat Nasik	5,95	4,9
Belitung	192,41	5,67

Sumber: Belitung Dalam Angka 2025, BPS Kabupaten Belitung

Adapun tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Belitung mencapai 83,88 orang per km². Apabila dilihat menurut kecamatan, maka kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Tanjungpandan dengan tingkat kepadatan sebesar 290,3 orang per km² dan kecamatan yang paling jarang atau tingkat kepadatan penduduknya paling rendah adalah Kecamatan Membalong, yaitu 30,14 orang per km².

Tabel 1.3.: Luas Daerah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan, 2024

Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²
Membalong	14,25	30,14
Tanjungpandan	57,10	290,3
Badau	8,22	34,51
Sijuk	17,34	81,59
Selat Nasik	3,09	44,58
Belitung	100,00	83,88

Sumber: Belitung Dalam Angka 2025 BPS Kabupaten Belitung

Berdasarkan jenis kelamin, maka jumlah penduduk laki-laki Kabupaten Belitung lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan, dengan rasio 103. Artinya pada setiap 203 penduduk di Kabupaten Belitung terdapat 100 penduduk perempuan dan 103 penduduk laki-laki.

Tabel 1.4.: Rasio Jenis Kelamin menurut Kecamatan, 2024

Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin
Membalong	105,87
Tanjungpandan	102,26
Badau	106,61
Sijuk	104,78
Selat Nasik	105,10
Belitung	103,64

Sumber: Belitung Dalam Angka 2025, BPS Kabupaten Belitung

Dominasi jenis kelamin laki-laki tampak pada hampir semua golongan umur kecuali pada kelompok usia tua, yang menandakan bahwa perempuan cenderung untuk hidup lebih panjang dibandingkan laki - laki di Kabupaten Belitung.

Secara umum penduduk Kabupaten Belitung lebih didominasi oleh penduduk usia kerja. Hal ini merupakan potensi besar jika Kabupaten Belitung berhasil memanfaatkannya dengan baik. Untuk itu perlu pemerintah terus mengeluarkan kebijakan dan program yang difokuskan untuk mendorong terbukanya lapangan kerja dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan membangun sistem pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan perkembangan daerah untuk mempersiapkan generasi muda memasuki dunia kerja. Hal ini sangat penting, mengingat pada piramida penduduk terlihat cekungan pada kelompok umur 20 – 24 tahun. Ini menandakan terjadi migrasi penduduk kelompok usis ini ke luar daerah untuk menempuh pendidikan atau mencari pekerjaan.

1.5.6 KETENAGAKERJAAN

Jumlah penduduk Kabupaten Belitung usia 15 tahun ke atas atau yang termasuk Penduduk Usia Kerja (PUK) pada tahun 2024 sebanyak 149.099 jiwa (hasil Survei Angkatan Kerja Nasional [Sakernas], 2024). Sebesar 68,18 persen dari PUK termasuk dalam penduduk angkatan kerja (bekerja dan/atau mencari kerja) dan sisanya 31,82 persen adalah penduduk bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga, lainnya).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Belitung tahun 2024 sebesar 68,18 persen artinya sebesar 68,18 persen penduduk usia kerja aktif secara ekonomi. Adapun tingkat pengangguran terbuka untuk Kabupaten Belitung tahun 2024 sebesar 3,88 persen artinya dari 10.000 penduduk yang termasuk angkatan kerja, secara rata-rata 388 orang diantaranya merupakan pencari kerja.

Tabel 1.5.: Penduduk Usia Kerja Menurut Kegiatan Utama, TPAK dan TPT, 2024

Kegiatan Utama	Tahun 2024
Penduduk Usia Kerja	149.099
Angkatan Kerja	101.656
Bekerja	97.709
Pengangguran Terbuka	3.947
Bukan Angkatan Kerja	47.443
TPAK (persen)	68,18
TPT (persen)	3,88

Sumber: Belitung Dalam Angka 2025 BPS Kabupaten Belitung

1.5.7 PENDIDIKAN

Salah satu tujuan nasional yang tercakup dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan salah satu program untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. baik pendidikan formal maupun nonformal. Pendidikan formal terdiri dari beberapa jenjang yaitu Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP), Sekolah Menengah (SM)/ sederajat dan jenjang Perguruan Tinggi (PT).

Rasio murid sekolah dapat dipergunakan untuk melihat rata-rata muatan suatu sekolah menampung murid. Pada tahun ajaran 2024/2025 rasio murid SD sebesar 150 berarti SD di Kabupaten Belitung rata-rata menampung 150 murid. Rasio murid di sekolah di bawah Dinas Pendidikan masih relatif lebih banyak dibandingkan sekolah di bawah Kanwil Kementerian Agama.

Tabel 1.6.: Jumlah SD menurut Kecamatan, 2024

Kecamatan	Sekolah					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025
Membalong	30	30	-	-	30	30
Tanjungpandan	38	38	7	7	45	45
Badau	17	17	-	-	17	17
Sijuk	22	22	-	-	22	22
Selat Nasik	7	7	-	-	7	7
Belitung	114	114	7	7	121	121

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Belitung, 2025

Tabel 1.7.: Jumlah SMP menurut Kecamatan, 2024

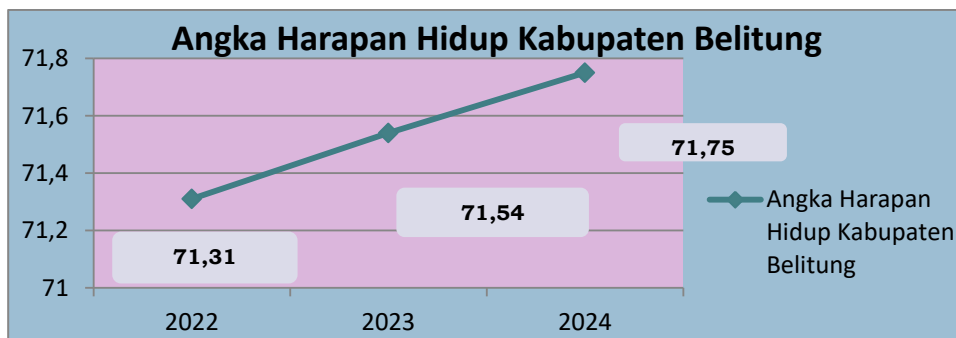
Kecamatan	Sekolah					
	Negeri		Swasta		Jumlah	
	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025
Membalong	5	5	-	-	5	5
Tanjungpandan	7	7	8	8	15	15
Badau	3	3	-	-	3	3
Sijuk	4	4	-	-	4	4
Selat Nasik	2	2	-	-	2	2
Belitung	21	21	8	8	29	29

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Belitung, 2025

1.5.8 KESEHATAN

Sumber daya manusia yang berkualitas dan sehat secara jasmani dan rohani menjadi modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan. Fasilitas dan kualitas pelayanan kesehatan yang baik menjadi kebutuhan dalam menjaga kesehatan masyarakat. Kabupaten Belitung memiliki Rumah Sakit (RS) sebanyak 3 unit terbagi menjadi 1 RS umum pemerintah, dan 2 RS umum swasta. Puskesmas dan puskesmas pembantu sudah menjangkau setiap kecamatan, tapi tenaga medis yang tersedia dirasa masih kurang. Penyebaran sarana penunjang kesehatan masih terkelompok di wilayah tertentu.

Grafik 1.1.: Angka Harapan Hidup Kabupaten Belitung, 2024



Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Belitung, 2025

Selama periode 2022 – 2024, AHH Kabupaten Belitung menunjukkan tren meningkat. Pada tahun 2024 AHH Kabupaten Belitung berada pada usia 71,75 tahun. Artinya bahwa bayi yang baru lahir di tahun 2024 diperkirakan dapat bertahan hidup hingga mencapai usia 71 tahun. Selain itu, infrastruktur kesehatan yang tersedia dan kecukupan jumlah tenaga kesehatan juga menjadi salah satu indikator kesehatan yang penting di daerah.

1.5.9 PERTANIAN

Pada tahun 2024, areal tanaman perkebunan terluas adalah komoditi lada dan kelapa sawit, yaitu 7.384,79 hektar dan 7.204,70 hektar. Luas areal tanaman kopi dan kelapa sawit mengalami kenaikan, sedangkan karet, kelapa, lada, dan aren mengalami penurunan. Produksi tanaman perkebunan rakyat terbanyak adalah kelapa sawit dan lada, yaitu sebanyak 13.946,37 ton dan 4.321,86 ton.

Populasi ternak besar tahun 2024 untuk hampir semua jenis ternak mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya kecuali jenis ternak sapi. Ternak kambing naik sekitar 26,54 persen menjadi 391 ekor. Ternak sapi tercatat sebanyak 845 ekor. Babi tercatat sebanyak 988 ekor. Hanya ternak kuda yang tidak mengalami perubahan dari tahun 2023. Produksi telur tahun 2024 secara umum mengalami kenaikan kecuali jenis unggas ayam petelur. Produksi ternak besar mengalami penurunan kecuali pada jenis ternak babi. Produksi unggas mengalami kenaikan pada ayam kampung, ayam petelur dan itik/ itik manila, sedangkan ayam pedaging mengalami penurunan.

Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Belitung tahun 2024 tercatat sebesar 40.774,86 ton. Jumlah rumah tangga perikanan budidaya di Kabupaten Belitung pada tahun 2024 tercatat sekitar 264 dengan luas areal budidaya ikan sebesar 74,91 hektar.

1.5.10 PARIWISATA

Sebagai wilayah kepulauan, wisata bahari merupakan salah satu sumber dalam meningkatkan pendapatan daerah, di samping objek wisata lainnya, seperti objek wisata sejarah dan acara adat khas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari 286.843 kunjungan tamu di Kabupaten Belitung, 96,31 persen adalah tamu domestik dan 3,69 persen tamu asing.

Kontribusi sektor penunjang kegiatan pariwisata ini didukung oleh ketersediaan rumah makan/restoran dan hotel serta akomodasi lainnya yang tersebar di seluruh kecamatan. Selama tahun 2022 jumlah rumah makan/restoran sebanyak 288 meningkat menjadi 528 pada tahun 2024, yang tersebar di seluruh kecamatan sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.8.: Jumlah Rumah Makan/Restoran Menurut Kecamatan

Kecamatan	2022	2023	2024
Membalong	12	12	19
Tanjungpandan	204	205	407
Sijuk	6	7	11
Badau	34	34	58
Selat Nasik	32	32	33
Belitung	288	290	528

Sumber: Belitung Dalam Angka, 2025

Sepanjang tahun 2024, jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Belitung mencapai 286.843 orang yang terdiri dari 10.592 wisatawan asing dan 276.251 wisatawan domestik. Jumlah ini turun dari tahun sebelumnya, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.9.: Jumlah Kunjungan Tamu Asing dan Domestik, 2024

Bulan	Tamu Asing	Tamu Domestik	Jumlah
Januari	504	18 845	19 349
Februari	921	20 970	21 891
Maret	797	19 016	19 813
April	915	20 435	21 350
Mei	980	22 582	23 562
Juni	785	21 053	21 838
Juli	1 140	27 055	28 195
Agustus	1 510	22 771	24 281
September	887	23 295	24 182
Oktober	799	29 480	30 279
Nopember	646	24 992	25 638
Desember	708	25 757	26 465
Jumlah / Total 2024	10 592	276 251	286 843
	2023	294 777	301 870
	2022	298 157	301 906

Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Belitung, 2025

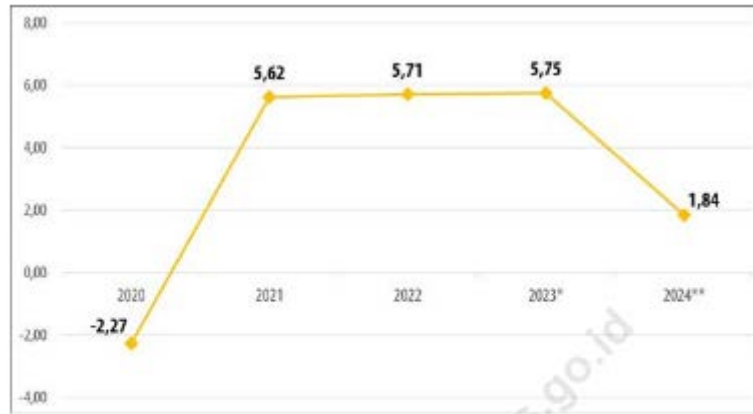
1.5.11 PERTUMBUHAN EKONOMI

Manfaat penyusunan PDRB antara lain dapat mengetahui perkembangan perekonomian suatu daerah, melalui indikator pertumbuhan ekonomi. Angka PDRB dihitung berdasarkan dua pendekatan yaitu produksi dan pengeluaran. PDRB pendekatan produksi dihitung dengan menjumlahkan nilai tambah bruto (NTB) yang dihasilkan oleh seluruh pelaku ekonomi dalam suatu wilayah tertentu. PDRB pengeluaran dihitung dengan menjumlahkan semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: konsumsi rumah tangga; konsumsi lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, dan ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Bila dilihat berdasarkan lapangan usaha, maka dapat disimpulkan bahwa perekonomian Kabupaten Belitung tahun 2024 ditopang oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Industri Pengolahan. Kedua kategori lapangan usaha ini memberikan kontribusi masing-masing sebesar 27,10 persen dan 12,67 persen. PDRB ADHB Kabupaten Belitung tahun 2024 adalah 14.151,24 miliar rupiah, meningkat dibandingkan tahun 2023 yang nilainya 13.504,09 miliar rupiah,

Demikian juga dengan PDRB ADHK juga mengalami peningkatan dari 7.500,36 miliar rupiah di tahun 2023, menjadi 7.638,73 miliar rupiah di tahun 2024.

Gambar 1.2.: Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 di Kabupaten Belitung (persen), 2020–2024



Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, berbagai sensus, survei dan sumber lain/BPS-Statistics Indonesia, various census, survey, and other

Sumber : BPS Kabupaten Belitung Dalam Angka 2025

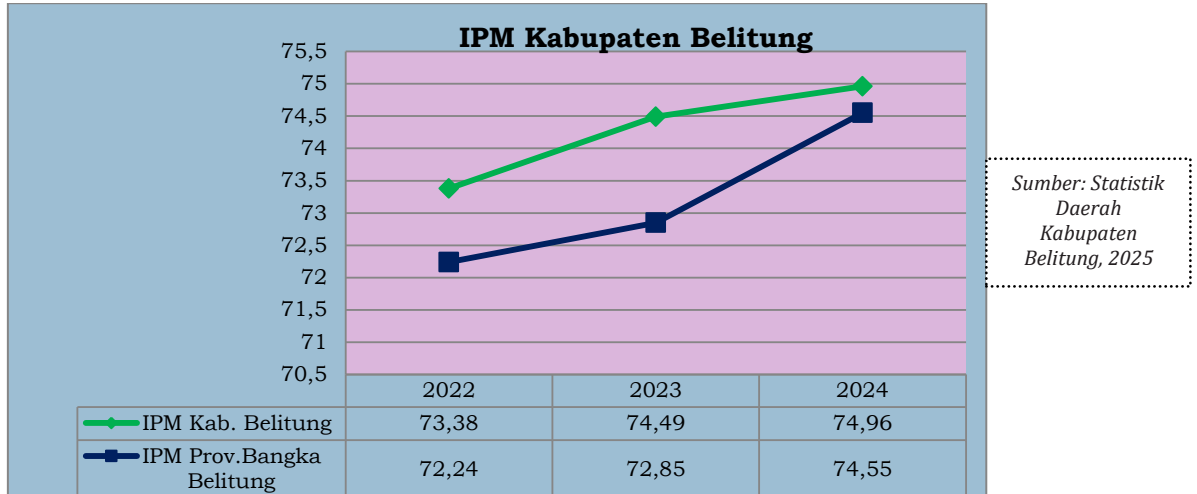
1.5.12 PEMBANGUNAN MANUSIA

IPM merupakan indikator yang sangat berguna untuk melihat perkembangan capaian pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu tingkat kecepatan dan status pencapaian.

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dapat digunakan untuk mengkaji perkembangan pembangunan manusia dalam suatu wilayah maupun perbandingan antar wilayah. IPM merupakan indikator yang sangat berguna untuk melihat perkembangan capaian pembangunan dalam jangka panjang.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Belitung terus mengalami peningkatan. Sebagaimana data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bahwa IPM Kabupaten Belitung Tahun 2024 mencapai 74,96. Angka ini sedikit lebih tinggi dari nilai IPM tahun sebelumnya yang sebesar 74,49. Adapun perkembangan IPM Kabupaten Belitung dari Tahun 2022 – 2024 disajikan sebagaimana grafik berikut:

Grafik 1.3.: Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Belitung Tahun 2022-2024



1.5.13 STRUKTUR EKONOMI

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha.

Dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Belitung, struktur perekonomian Kabupaten Belitung selama tahun 2024 didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, yaitu: lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (27,10 persen); Industri Pengolahan (12,67 persen); Kontruksi (11,74); Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (10,31 persen); serta Transportasi dan penerbangan (8,11 persen).

Adapun struktur ekonomi Kabupaten Belitung dari tahun 2020 hingga 2024 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Gambar 1.3.: Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Belitung Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen), 2020-2024

Lapangan Usaha/Industry	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	27,74	28,22	26,90	26,59	27,10
B Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	5,98	6,21	5,47	4,91	4,85
C Industri Pengolahan/Manufacturing	11,94	12,33	13,15	13,02	12,67
D Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	0,18	0,17	0,15	0,14	0,14
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
F Konstruksi/Construction	12,94	12,59	11,72	12,04	11,74
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	10,35	10,22	10,93	10,61	10,31
H Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	5,31	5,37	7,62	8,26	8,11
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	3,75	3,80	4,03	4,13	4,22
J Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	3,40	3,31	3,34	3,52	3,70
K Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	2,18	2,24	2,31	2,46	2,38
L Real Estat/Real Estate Activities	3,43	3,25	3,13	3,06	3,07
M,N Jasa Perusahaan/Business Activities	0,31	0,30	0,33	0,35	0,36
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	7,52	7,12	6,30	6,17	6,45
P Jasa Pendidikan/Education	2,17	2,05	1,92	1,98	2,12
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Health and Social Work Activities	1,94	2,01	1,89	1,92	1,89
R,S,T,U Jasa Lainnya/Other Services Activities	0,83	0,78	0,79	0,83	0,88
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan/Note: *) angka sementara/provisionary figures

**) angka sangat sementara/very preliminary figures

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, berbagai sumber, survei dan sumber lain/BPS-Statistics Indonesia, various census, survey, and other sources

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2025

1.5.14 STRUKTUR ORGANISASI

Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Belitung telah diatur dalam Perda nomor 4 Tahun 2019. Organisasi Pemerintah Kabupaten Belitung terdiri dari Kepala Daerah yaitu Bupati dan Wakil Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. Perangkat daerah dimaksud bertanggung jawab kepada Kepala daerah dan

membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tabel 1.10.: Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Belitung

NO	URAIAN	JUMLAH (UNIT)	OPD	DASAR HUKUM
1	Sekretariat	2	1. Sekretariat Daerah 2. Sekretariat DPRD	Perda Nomor 4 Tahun 2019
2	Inspektorat	1	1. Inspektorat	Perda Nomor 4 Tahun 2019
3	Dinas	17	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Dinas Pemuda dan Olah Raga 3. Dinas Pariwisata 4. Dinas Kesehatan 5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak 6. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 8. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian 9. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja 10. Dinas Komunikasi dan Informatika 11. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 12. Dinas Perhubungan 13. Dinas Lingkungan Hidup 14. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 15. Dinas Perikanan 16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 17. Satuan Polisi Pamong Praja	Perda Nomor 4 Tahun 2019
4	Badan	6	1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 4. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Perda Nomor 4 Tahun 2019
5	Kecamatan	5	1. Kecamatan Tanjungpandan 2. Kecamatan Sijuk 3. Kecamatan Badau 4. Kecamatan Membalong 5. Kecamatan Selat Nasik	Perda Nomor 4 Tahun 2019

1.5.15 PERSONIL/PEGAWAI

Dalam rangka pelaksanaan tugas, Pemerintah Kabupaten Belitung membentuk 31 OPD dengan Jumlah PNS daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Belitung pada tahun 2024 berkurang sebesar 5,07 persen dibandingkan tahun 2023, yaitu sebanyak 153 orang. Jika dirinci menurut jabatan, pada tahun 2024, sebanyak 3 orang golongan I, 238 orang golongan II, 2.314 golongan III, dan 308 orang golongan IV.

Tabel 1.11.: Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Belitung

Jabatan	2024		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Fungsional Tertentu	260	232	492
Fungsional Umum	697	1 367	2 064
Struktural			
Eselon IV	104	64	168
Eselon III	90	34	124
Eselon II	28	2	25
PPPK	123	304	428

Sumber : BKPSDM, Desember 2025

1.5.16 ISU STRATEGIS DAERAH

1. Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Belum Optimal

Isu Strategis ini diangkat dari belum optimalnya daya saing produk unggulan daerah berbasis potensi daerah seperti perikanan, pariwisata dan pertanian dalam meningkatkan daya saing perekonomian Kabupaten Belitung. Pengembangan produk-produk usaha mikro dan pemberdayaan masyarakat dari masing-masing sektor unggulan merupakan hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan daya saing dan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik skala nasional, regional, dan global. Beberapa pengembangan kawasan strategis perekonomian Seperti ditetapkannya Kabupaten Belitung Sebagai KSPN Tanjung Kelayang,

Geopark Belitong, KEKTanjung kelayang, KPPN Selat Nasik juga memiliki pertimbangan tersendiri Detail kondisi pengembangan ekonomi sektor prioritas Kabupaten Belitung yang ikut memperkuat isu ini sebagai berikut :

- **Pengembangan Ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan**

Pengembangan sektor pertanian dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan produksi pertanian, pengelolaan pasca panen produk pertanian dan perkebunan dan pemasaran produk pertanian, serta meningkatkan kompetensi petani dan kelembagaan petani sehingga akan meningkatkan nilai tukar petani. pengembangan sektor perikanan tangkap, dan budidaya melalui peningkatan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya melalui bantuan sarana dan prasarana pendukung aktivitas perikanan tangkap dan budidaya, dan mengoptimalkan produksi perikanan di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Selat Nasik.

- **Pengembangan Ekonomi Sektor Koperasi dan Usaha Mikro**

Pengembangan koperasi dan mikro melalui peningkatan Pembinaan, pengembangan dan pengawasan kelembagaan koperasi, pemberdayaan usaha mikro, dan pemanfaatan potensi daerah dalam mengembangkan IKM sebagai pendukung kepariwisataan serta pembinaan dan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengembangan IKM. Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung terus mendorong pemulihan UMKM melalui Subsidi bunga, perluasan layanan pendampingan usaha, pelatihan dan bantuan produktivitas

dan nilai tambah usaha mikro, peningkatan kemampuan digital UMKM, standarisasi produk dan kewirausahaan serta pendampingan Sumber Daya Manusia UMKM.

Pada Tahun 2022 Kabupaten Belitung mendapatkan alokasi dana DAK Fisik untuk revitalisasi PLUT menjadi PLUT Premium. Gedung PLUT ini dilengkapi dengan mushola, 4 inkubator, kuliner, kriya, agrobisnis, digital marketing, foto studio produk, coffee shop, ruang pertemuan maksimal 50 orang, ruang laktasi (ruang ibu menyusui), jalur khusus penyandang disabilitas, ruangan *open spaces* dan *co working space*, *display produk privita room*, media center, ruang konsultasi, pos *security* dan parkir mobil. PLUT premium ini juga digunakan untuk “klinik” atau tempat konsultasi dan pendampingan koperasi dan KUKM, ada 5 layanan Konsultan yakni: kelembagaan, produksi, Sumber Daya Manusia, pembiayaan dan pemasaran.

• **Pengembangan Ekonomi Sektor pariwisata**

Sektor pariwisata adalah sektor yang sangat strategis dan berpengaruh besar dalam pembangunan suatu daerah. Selain berpotensi meningkatkan pendapatan daerah, sektor pariwisata merupakan sektor yang bisa memberikan multiplier effect terhadap perekonomian suatu daerah. Pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Belitung melalui peningkatan amenities, atraksi, promosi pariwisata, pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, peningkatan SDM pariwisata dan Ekonomi kreatif serta belum optimalnya pengembangan Desa wisata.

• **Pengembangan Ekonomi Sektor Penanaman Modal**

Pengembangan Ekonomi Sektor Penanaman Modal melalui peningkatan tata kelola penanaman modal dan prizinan. Dengan optimalnya implementasi kegiatan penanaman modal diharapkan akan mendorong dan menggerakkan sektor-sektor ekonomi daerah seperti industri, perdagangan dan pariwisata di dukung dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 tahun 2022 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah akan memberikankan kepastian hukum kepada investor atau calon investor dalam pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal daerah.

2. Konektivitas dan Infrastruktur yang Mendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar

Isu strategis Infrastruktur dan konektivitas yang mendukung perekonomian diangkat dari berbagai analisis yaitu kualitas fasilitas publik, infrastruktur dan konektivitas yang mendukung perekonomian dalam menghadapi restrukturisasi global.

Kualitas utilitas pelayanan publik yang belum mumpuni yang disebabkan kondisi belum meratanya utilitas pelayanan publik berupa sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan ruang terbuka hijau, penerangan jalan umum, TPS 3R dan utilitas lainnya dan belum terintegrasinya utilitas sanitasi lingkungan secara terpadu dan efisien, serta belum meratanya tingkat kondisi jalan dan jembatan yang berkualitas.

Kurangnya lahan-milik pemerintah daerah untuk membangun sarana dan prasarana pemerintah dan sarana publik merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam pembangunan infrastruktur

dan utilitas daerah. Masih sulitnya konektivitas antar wilayah/pulau yang disebabkan belum meratanya jaringan telekomunikasi/Internet, listrik yang berkualitas. Dan masih kurangnya prasarana transportasi antar wilayah baik itu darat, laut maupun udara. Isu strategis infrastruktur dan konektivitas untuk mendukung perekonomian berangkat merupakan upaya pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran guna mewujudkan kemandirian ekonomi dan menggerakkan sektor-sektor ekonomi domestik.

Isu infrastruktur dan konektivitas berangkat juga dari upaya pemerintah untuk memastikan ketersediaan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan, dan menjamin seluruh penduduk untuk mendapat akses energi yang terjangkau dan dapat diandalkan, tersedianya infrastruktur yang tangguh, dan upaya penyediaan permukiman kota dan permukiman manusia yang aman, tangguh dan berkelanjutan. Pembangunan Infrastruktur dan konektivitas akan memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial di masyarakat.

3. Sumber Daya Manusia Belum Berkualitas dan Berdaya Saing

Isu strategis Sumber Daya Manusia belum berkualitas dan berdaya saing diangkat dari permasalahan belum optimalnya mutu pelayanan kesehatan, masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat dan belum terkendalinya laju pertumbuhan penduduk. Keterbatasan sumber daya, infrastruktur yang tidak memadai, kurangnya pelatihan dan pengembangan tenaga kesehatan, serta faktor sosial dan ekonomi menjadi salah satu penyebab belum optimalnya pelayanan kesehatan. Akibatnya, masyarakat mungkin tidak mendapatkan perawatan kesehatan yang optimal, yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kualitas hidup mereka.

Selain itu terdapat beberapa penyebab rendahnya kesadaran masyarakat adalah kurangnya pengetahuan, kurangnya pemahaman akan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan, dan kurangnya akses terhadap fasilitas sanitasi yang memadai. Masih rendahnya kesadaran masyarakat Belitung untuk berperilaku hidup bersih dan sehat ditandai dengan tidak tercapainya salah satu indikator dari 10 indikator PHBS di tatanan rumah tangga adalah menggunakan jamban yang sehat. Sampai dengan tahun 2022 persentase desa ODF (*Open Defecation Free*) di Kabupaten Belitung baru mencapai 53% atau masih ada 23 desa/kelurahan yang masih melakukan buang air besar sembarangan.

Adapun laju pertumbuhan penduduk yang belum terkendali adalah kurangnya akses terhadap pendidikan dan informasi tentang kesehatan reproduksi, rendahnya taraf hidup, keinginan untuk memiliki anak yang banyak, serta norma dan budaya yang mendukung kelahiran banyak anak.

4. Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal

Isu belum optimalnya tata kelola pemerintahan di Kabupaten Belitung tercermin dari beberapa capaian kinerja yang belum sesuai

target yang ditetapkan seperti Nilai Laporan Akuntabilitas masih dalam kategori “B” dari target “BB” dan Indeks Reformasi Birokrasi masih kategori “CC” dari target “B”. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan hal utama yang diperlukan dalam menciptakan pemerintahan yang baik. Terhubung pada tiga pilar, yakni *rule of law*, *democracy*, dan *good governance*.

Tata kelola pemerintahan belum optimal diangkat dari analisis pengelolaan keuangan dan aset daerah yang belum optimal yang disebabkan oleh belum kompetenya SDM pengelola aset di perangkat daerah. Belum berkualitaskannya perencanaan pembangunan daerah yang disebabkan oleh masih kurangnya kompetensi SDM perencanaan. Kurangnya komitmen pemerintah terhadap konsensus yang ada untuk penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang berkualitas. Hal ini disebabkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang belum optimal, serta belum optimalnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Selain itu pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) juga belum optimal karena masih kurangnya infrastruktur pendukung SPBE. Sehingga tata kelola pelayanan public berbasis teknologi informasi belum optimal.

Manajemen sumber daya manusia yang tidak terkelola dengan baik sesuai dengan kapabilitasnya yang disebabkan rendahnya kualitas tata kelola aparatur untuk peningkatan kapabilitas dan karir, rendahnya kualitas tata kelola sumber daya manusia untuk pengembangan *endogenous development*, Masih kurangnya transfer pengetahuan kepada masyarakat untuk mengembangkan potensi sumber daya yang ada.

Isu tata kelola pemerintah yang bersih efektif, transparan dan bertanggung jawab berangkat juga dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel, demokratis, dan terpercaya dalam upaya meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua.

5. Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup

Isu strategis masih rendahnya kualitas lingkungan hidup diangkat dari belum optimalnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Belitung. Hal ini disebabkan antara lain penurunan kualitas air, udara dan tutupan lahan serta pengelolaan sampah yang masih terbatas cakupannya dalam pengurangan timbulan sampah karena keterbatasan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana persampahan yang belum memadai.

Pembangunan lingkungan hidup harus memperhatikan kelestarian daya dukung lingkungan sehingga keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dapat dipertahankan. Lingkungan hidup yang berkualitas sangat bergantung pada peningkatan kualitas air, udara dan tutupan lahan. Selain itu penanganan sampah juga harus tepat sehingga timbulan sampah dapat diminimalisir.

Jumlah penduduk Kabupaten Belitung yang terus bertambah setiap tahun menjadi salah satu penyebab degradasi lingkungan.

Tekanan aktivitas manusia yang semakin ekstrim dibandingkan dengan laju pemulihan sumberdaya alam yang lambat, akan memunculkan degradasi bahkan kerusakan sumberdaya alam yang semakin cepat, karena pergerakan upaya perusakan yang dilakukan oleh manusia lebih cepat daripada kemampuan alam untuk melakukan pemulihan kembali (*recovery*). Tekanan penduduk apabila tidak sebanding dengan ketersediaan sumberdaya alam tentu saja akan memperlambat pemulihan sumberdaya alam. Sumber daya alam (SDA) berupa tanah, air, udara dan sumber daya alam lainnya merupakan kebutuhan pokok kehidupan manusia dan makhluk hidup lain juga semakin menurun kualitasnya akibat berbagai kegiatan seperti perambahan dan pemukiman oleh manusia.

Pada dasarnya memang pencemaran dan kerusakan lingkungan merupakan masalah yang harus diatasi dengan melibatkan semua sektor dan pemangku kepentingan. Pemerintah bersama-sama dengan masyarakat dan stakeholder harus berperan serta dan berkolaborasi dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan penanganan sampah secara tepat dan bijak.

Bab 99. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

2.1. PERENCANAAN KINERJA

Pembangunan merupakan proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat, yang mencakup berbagai perubahan dari struktur sosial dengan tetap mengejar pertumbuhan ekonomi dalam penanganan ketimpangan pendapatan, serta dalam penanganan kemiskinan pembangunan harus selaras dengan tujuan nasional.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah. Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaannya diawali dengan penyusunan perencanaan melalui siklus perencanaan pembangunan. Pada perencanaan pembangunan daerah, proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.

Sehubungan dengan berakhirnya periode Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung pada tahun 2023, dan memperhatikan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, Bahwa Pemilihan Kepala Daerah Gubernur, Bupati, Wali Kota Akan Dilaksanakan Secara Serentak Pada Tahun 2024. Sehingga Pada masa transisi ini, jika dipandang dari sisi perencanaan, maka Rencana Jangka Menengah Daerah sebagai acuan dalam Perencanaan Tahunan Atau RKPD Tahun 2023 Terjadi “Kekosongan”.

Untuk menjembatani hal tersebut, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 05 Desember 2022 telah menerbitkan regulasi berupa Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus segera menyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi cita-cita pembangunan dan hakekat dari pembangunan adalah proses perubahan masyarakat dari kondisi saat ini menjadi kondisi yang dicita-citakan. Agar perubahan tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan dan dapat terwujud, diperlukan suatu perencanaan yang terpadu (*integrated*), terukur (*measurable*), dapat dilaksanakan (*applicable*) dan berkelanjutan (*sustainable*).

Untuk periode 2018 – 2023, RPD Kabupaten Belitung ditetapkan dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026.

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 berpedoman pada Rencana Pemerintah Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung tahun 2005-2025. Rencana Pembangunan Daerah ini merupakan tahapan ke-4 dari 4 (empat) tahapan pencapaian visi jangka panjang dalam Rencana Pemerintah Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung tahun 2005-2025. Tahap ke-4 ini masih melanjutkan pencapaian tahap ke-3, dimana fokus pada bidang ekonomi, Sumber Daya Manusia dan penguatan birokrasi diarahkan untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Belitung 2005-2025 yaitu: **“ Terwujudnya kabupaten Belitung yang mandiri dan produktif dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal, terpadu dan berkelanjutan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat”**.

Visi tersebut akan diwujudkan dengan misi sebagai berikut :

1. Memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan, khususnya perikanan dan pariwisata secara optimal dan berkelanjutan serta mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi pembangunan sarana dan prasara perhubungan sebagai penunjang aktivitas ekonomi perikanan dan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi masyarakat serta para stakeholder lainnya dalam pembangunan daerah;
3. Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan.

Tujuan pembangunan jangka panjang Kabupaten Belitung adalah untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab yang berorientasi kepada kelestarian sumber daya alam dan lingkungan berbasis pada sektor perikanan dan pariwisata yang didukung ketersediaan fasilitas perhubungan yang memadai.

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan arah pembangunan yang jelas dan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) di Kabupaten Belitung. Secara umum, arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Belitung 2005-2025 dilaksanakan melalui 5 (lima) strategi makro, yaitu :

1. pembangunan dan pengembangan ekonomi berbasis potensi ekonomi lokal;
2. peningkatan kualitas sumber daya manusia;

3. reformasi birokrasi;
4. pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
dan
5. pemerataan pembangunan.

Prioritas pembangunan daerah jangka panjang Kabupaten Belitung pada tahap keempat dalam mencapai visi dan misi yang diharapkan dimana fokus pembangunan lebih diarahkan dalam memantapkan pada perkembangan sector ekonomi, sumber daya manusia dan penguatan birokrasi.

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 dilakukan melalui pendekatan teknokratik dan partisipatif yang holistik. Perumusan tujuan dan sasaran tersebut merupakan penjabaran visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dalam upaya pencapaian arah kebijakan dan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025.

Dengan memperhatikan visi misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD tahap keempat dan isu strategis yang aktual, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Belitung tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, dengan 3 (tiga) sasaran:
 - a) Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan
 - b) Menurunnya Kemiskinan Penduduk
 - c) Meningkatnya infrastruktur kewilayahan
2. Meningkatnya kualitas Sumber daya Manusia, dengan 2 (dua) sasaran:
 - a) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
 - b) Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
3. Terwujudnya pelayanan birokrasi yg bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan, dengan 2 (dua) sasaran:
 - a) Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel
 - b) Terciptanya Birokrasi yang Inovatif dan Profesional
4. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, dengan 1 (satu) sasaran:
 - a) Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Oleh karenanya setiap instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama dan menjadikannya sebagai prioritas utama. Indikator Kinerja Utama juga merupakan salah satu upaya memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk maksud tersebut diterbitkanlah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Penetapan IKU Pemerintah Kabupaten mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026, melalui

Peraturan Bupati Belitung Nomor 22 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024 – 2026, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1.: Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	
MISI 1 : Memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan, khususnya perikanan dan pariwisata secara optimal dan berkelanjutan serta mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi pembangunan sarana dan prasarana perhubungan sebagai penunjang aktivitas ekonomi perikanan dan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat			
1	Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	Rasio gini	Poin
2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Laju pertumbuhan ekonomi	Persentase
3	Menurunnya kemiskinan penduduk	Tingkat kemiskinan	Persentase
4	Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	Persentase Pemenuhan infrastruktur kewilayahan	Persentase
MISI 2 : Meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi masyarakat serta para stakeholder lainnya dalam pembangunan daerah			
5	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin
6	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	Tahun
7	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah	Tahun
8	Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, professional, akuntabel dan transparan	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat
9	Terciptanya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	1. Opini BPK	Predikat
		2. Nilai SAKIP	Predikat
10	Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional	Indeks Profesionalitas ASN	Skala
MISI 3 : Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan			
11	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja merupakan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat/ dampak kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja Tahun 2024, disusun prioritas pembangunan daerah yang dijabarkan setiap tahunnya dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Belitung. Diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam penyusunan Penetapan kinerja bertujuan:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Sasaran pembangunan daerah yang telah direncanakan untuk dicapai pada tahun 2024 tersebut diatas selanjutnya dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pj. Bupati yang ditetapkan setelah disahkannya APBD Kabupaten Belitung Tahun 2024. Didalam dokumen Penetapan kinerja tercantum sasaran strategis, dan target setiap indikator kinerja dimaksud baik bersifat kualitatif dan kuantitatif sehingga dapat diukur tingkat capaian kerjanya pada akhir tahun. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024 yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.: Perubahan Perjanjian Kinerja Kabupaten Belitung Tahun 2024

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	Rasio gini	0.248 - 0.253 poin
2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Laju pertumbuhan ekonomi	4.5 %
3	Menurunnya kemiskinan penduduk	Tingkat kemiskinan	6.40 %
4	Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	Persentase Pemenuhan infrastruktur kewilayahan	62.84 %
5	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74.26

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024

6	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	71.38 Tahun
7	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah	8.78 Tahun
8	Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, professional, akuntabel dan transparan	Indeks Reformasi Birokrasi	B
9	Terciptanya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	1. Opini BPK	WTP
		2. Nilai SAKIP	BB
10	Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional	Indeks Profesionalitas ASN	71 - 80
11	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69.25

2.3. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024

Pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Belitung pada tahun 2024 diarahkan dan difokuskan untuk mewujudkan target kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang ditetapkan. Untuk mewujudkan hal tersebut, pada tahun anggaran 2024, semula Pemerintah Kabupaten Belitung mengalokasikan anggaran belanja sebesar Rp. 1.068.510.021.579,00 bertambah sebesar Rp. 79.990.090.345,00 sehingga menjadi Rp. 1.148.500.111.924,00 terdiri dari Belanja Operasional sebesar Rp. 964.222.300.034,00 Belanja Modal sebesar Rp. 74.989.800.190,00 Belanja Tak Terduga sebesar Rp. 2.500.000.000,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp. 108.088.655.700,00. Alokasi anggaran yang ada untuk membiayai program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Tabel 2.3.: Rencana Anggaran Kabupaten Belitung Tahun 2024

URAIAN	ANGGARAN
Belanja Operasional	Rp. 964.222.300.034,00
Belanja Modal	Rp. 74.989.800.190,00
Belanja Tak Terduga	Rp. 2.500.000.000,00
Belanja Transfer	Rp. 108.088.655.700,00
TOTAL BELANJA	Rp. 1.148.500.111.924,00

Tabel 2.4.: Alokasi Anggaran Persasaran Strategis Tahun 2024

SASARAN	RENCANA ANGGARAN
Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Rp 31.541.314.703
Menurunnya kemiskinan penduduk	Rp 1.602.697.962
Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	Rp 60.258.027.437

Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Rp 99.257.129.722
Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rp 61.945.996.305
Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan	
Terciptanya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	Rp 177.007.486.514
Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional	Rp 4.790.753.920
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	
Meningkatnya kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	Rp 10.978.167.750

Bab 111. Akuntabilitas Kinerja

Tanggung Jawab Pengumpulan Data Kinerja

Pengumpulan data kinerja diperoleh dengan menggunakan formulir Capaian Indikator Kinerja Utama. Formulir Capaian Indikator Kinerja Utama merupakan formulir isian data kinerja Target dan Realisasi Tahun 2024, yang diisi oleh Perangkat Daerah berdasarkan kewenangannya.

Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu:

- a. Spesifik;
- b. Dapat dicapai;
- c. Relevan;
- d. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur;
- e. Dapat dihitung dan diukur.

Pengumpulan data kinerja merupakan tanggungjawab Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung yang memiliki fungsi pemantauan dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan Daerah.

Pengukuran Capaian Kinerja

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, diperlukan adanya penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi masing-masing.

Pengukuran Capaian Kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk mendukung kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah.

Pengukuran Capaian Kinerja dilaksanakan pada setiap akhir periode instansi dengan melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja yang dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.

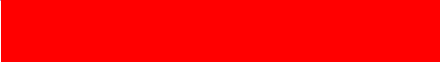


Selanjutnya, hasil pengukuran capaian kinerja dilaporkan dalam Laporan Kinerja berupa laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan Kinerja dimanfaatkan untuk:

- a. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Selanjutnya dilakukan penghitungan untuk mendapatkan selisih antara target dan realisasi guna mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja sebagai hasil pengukuran kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut dilakukan evaluasi dan analisa guna mendapatkan strategi yang tepat untuk perbaikan atau peningkatan kinerja di masa mendatang.

Tingkat pencapaian kinerja diklasifikasikan dalam skala pengukuran

sebagai berikut:

Persentase	Tingkat	Kode Warna
< 100%	BELUM TEREALISASI (BT)	
= 100%	TEREALISASI (T)	
> 100%	MELEBIHI TARGET (MT)	

Selanjutnya untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja dari program dan kegiatan serta indikator makro, diberlakukan nilai dan disertai makna dari nilai tersebut dengan pendekatan sebagai berikut :

Tabel Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024

KATEGORI	RATA-RATA % CAPAIAN
Sangat Berhasil (SB)	>90
Berhasil (B)	75.00 – 89.00
Cukup (C)	50.00 – 74.99
Kurang (K)	0.00 – 49.00

Pencapaian kinerja kemudian dianalisa dan dievaluasi dengan memaparkan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Perhitungan pencapaian kinerja indikator sasaran menggunakan *asumsi I*: Jika **semakin tinggi realisasi**, menunjukkan pencapaian kinerja yang **semakin baik**, atau sebaliknya **realisasi makin rendah** pencapaian kinerja **semakin rendah/ jelek** adalah:

$$\text{PRESENTASE TINGKAT CAPAIAN KINERJA} = \frac{\text{REALISASI}}{\text{RENCANA}} \times 100\%$$

Sedangkan apabila **semakin tinggi realisasi** menunjukkan pencapaian sasaran kinerja **semakin rendah/jelek**, atau sebaliknya realisasi **semakin rendah** pencapaian kinerja **semakin baik** menggunakan perumusan:

$$\text{PRESENTASE TINGKAT CAPAIAN KINERJA} = \frac{\text{RENCANA} - (\text{REALISASI} - \text{RENCANA})}{\text{RENCANA}} \times 100\%$$

$$\text{PRESENTASE TINGKAT CAPAIAN KINERJA} = \frac{(2 \times \text{RENCANA}) - \text{REALISASI}}{\text{RENCANA}} \times 100\%$$

3.1. PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Tujuannya, demi mengukur peningkatan kinerja, serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah. Hal pertama yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan kinerja utama dari instansi pemerintah bersangkutan. Kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU jadi ukuran keberhasilan dari suatu tujuan.

Dalam rangka untuk memperoleh informasi kinerja, ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi, maka setiap instansi pemerintah harus menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk periode 2024 – 2026, Pemerintah Kabupaten Belitung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Kabupaten Belitung dan tingkat Perangkat Daerah melalui Peraturan Bupati Belitung Nomor 22 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024 – 2026.

Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, melalui Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Belitung melakukan pembinaan pengembangan dan penetapan, evaluasi, dan reviu IKU. Evaluasi dan reviu pencapaian IKU sangat mempengaruhi kinerja organisasi di masa datang. Hasil pengukuran atas IKU Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1.: Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024 terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024

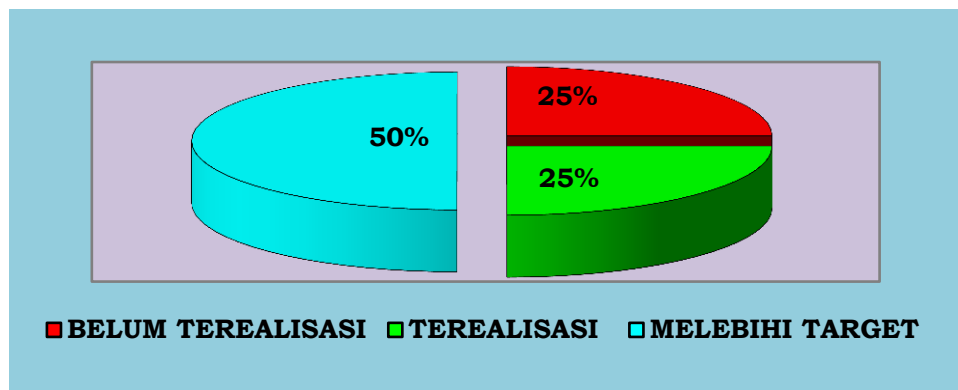
No	Indikator Kinerja	Satuan	2024		
			Target PK	Realisasi	% Realisasi
1.	Rasio gini Laju	Poin	0,248 – 0,253	0,248	100
2.	pertumbuhan ekonomi	Persentase	4,5	1,84	40,89
3.	Tingkat kemiskinan	Persentase	6,40	6,11	104,53
4.	Persentase pemenuhan infrastruktur kewilayahan	Persentase	62,84	48,93	77,86
5.	Indeks pembangunan manusia (IPM)	Poin	74,26	74,96	100,94
6.	Angka harapan hidup	Tahun	71,38	71,75	100,52
7.	Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,78	9,05	103,08
8.	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B	BB	112,6
9.	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	100
10.	Nilai SAKIP	Predikat	BB	B	92,39
11.	Indeks Profesionalitas ASN	Skala	71 – 80 Sedang	78,63 Sedang	100
12.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup(IKLH)	Poin	69,25	69,84	100,85

Tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing

misi sebagai berikut:

1. Misi 1 : Memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan, khususnya perikanan dan pariwisata secara optimal dan berkelanjutan serta mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi pembangunan sarana dan prasarana perhubungan sebagai penunjang aktivitas ekonomi perikanan dan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat pada indikator:
 1. Rasio gini, capaian 100%
 2. Laju pertumbuhan ekonomi, capaian 40,89%
 3. Tingkat kemiskinan, capaian 104,53 %
 4. Persentase pemenuhan infrastruktur kewilayahan, capaian 77,86%
2. Misi 2 : Meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi masyarakat serta para stakeholder lainnya dalam pembangunan daerah dapat dilihat pada indikator:
 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), capaian 100,94 %
 2. Angka harapan hidup, capaian 100,52 %
 3. Rata-rata lama sekolah, capaian 103,08 %
 4. Indeks Reformasi Birokrasi, belum tersedia data 112,6%
 5. Opini BPK, belum tersedia data 100%
 6. Nilai SAKIP capaian 92,39%
 7. Indeks Profesional ASN, capaian 100%
- Misi 3 : Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan dapat dilihat pada indikator :
 1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), capaian 100,85 %

Gambar 3.1.: Capaian IKU Kabupaten Belitung 2024



Secara umum pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Belitung telah dapat melaksanakan seluruh tugas dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sesuai yang tertuang dalam RPD Kabupaten Belitung Tahun 2024 – 2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

3.2. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Sebagaimana telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Belitung Tahun 2024 – 2026, pencapaian kinerja kebijakan dan strategi Pemerintah Kabupaten Belitung untuk mewujudkan pencapaian misi secara terukur diuraikan berdasarkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung.

Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung tahun 2024 yang tergambar dalam laporan ini merupakan gambaran penilaian tingkat pencapaian masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPD. Berdasarkan RPD Kabupaten Belitung tahun 2024 – 2026, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan, 8 (delapan) sasaran dengan 9 (sembilan) indikator kinerja (*outcomes*) yang menjadi Indikator Kinerja Utama, dengan rincian sebagai berikut:

Tujuan 1	Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	1	Indikator
Sasaran 1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	1	Indikator
Sasaran 2	Menurunnya kemiskinan penduduk	1	Indikator
Sasaran 3	Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	1	Indikator
Tujuan 2	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	1	Indikator
Sasaran 4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	Indikator
Sasaran 5	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	1	Indikator
Tujuan 3	Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih inovatif, professional, akuntabel dan transparan	1	Indikator
Sasaran 6	Terciptanya Birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	2	Indikator
Sasaran 7	Terciptanya Birokrasi yang inovatif dan professional	1	Indikator
Tujuan 4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1	Indikator
Sasaran 8	Meningkatnya kualitas lingkungan air, udara dan tutupan lahan	1	Indikator

Hasil pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.: Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024

No	TUJUAN/ SASARAN	No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	1	Rasio gini	Poin	0,248 – 0,253	0,248	100
2.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	2	Laju pertumbuhan ekonomi	Persentase	4,5	1,84	40,89
3.	Menurunnya kemiskinan penduduk	3	Tingkat kemiskinan	Persentase	6,40	6,11	104,53
4.	Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	4	Persentase Pemenuhan infrastruktur kewilayahan	Persentase	62,84	48,93	77,86

5.	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	74,26	74,96	100,94
6.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	6	Angka harapan hidup	Tahun	71,38	71,75	100,52
7.	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	7	Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,78	9,05	103,08
8.	Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih inovatif, professional, akuntabel dan transparan	8	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B	BB	112,6
9.	Terciptanya Birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	9	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	100
		10	Nilai SAKIP	Predikat	BB	B	92,39
10.	Terciptanya Birokrasi yang inovatif dan professional	11	Indeks Profesionalitas ASN	Skala	71 – 80 Sedang	78,63 Sedang	100
11.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	12	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	69,25	69,84	100,85

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja di atas dapat digambarkan Kategori Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Belitung sebagaimana dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3.: Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024

No.	KATEGORI	RATA-RATA % CAPAIAN	JUMLAH INDIKATOR
1	Sangat Berhasil (SB)	>90	10
2	Berhasil (B)	75.00 – 89.00	1
3	Cukup (C)	50.00 – 74.99	0
4	Kurang (K)	0.00 – 49.00	1
JUMLAH			12

Adapun kategori pencapaian indikator kinerja sasaran dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.4.: Pencapaian Kinerja Indikator Sasaran Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024

No	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA SASARAN	0.00 – 49.00 KURANG	50.00 – 74.99 CUKUP	75.00 – 89.00 BERHASIL	>90 SANGAT BERHASIL
MISI 1 : Memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan, khususnya perikanan dan pariwisata secara optimal dan berkelanjutan serta mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi pembangunan sarana dan prasarana perhubungan sebagai penunjang aktivitas ekonomi perikanan dan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat							
1.	Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	Rasio gini	100%				SANGAT BERHASIL
2.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Laju pertumbuhan ekonomi	40,89%	KURANG			
3.	Menurunnya kemiskinan penduduk	Tingkat kemiskinan	104,53%				SANGAT BERHASIL
4.	Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	Persentase Pemenuhan infrastruktur kewilayahan	77,86%			BERHASIL	
MISI 2 : Meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi masyarakat serta para stakeholder lainnya dalam pembangunan daerah							
5.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	100,94%				SANGAT BERHASIL
6.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	100,52%				SANGAT BERHASIL
7.	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah	103.08%				SANGAT BERHASIL
8.	Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan	Indeks Reformasi Birokrasi	112,6%				SANGAT BERHASIL
9.	Terciptanya birokrasi yang bersih,	1. Opini BPK	100%				SANGAT BERHASIL
10.	transparan dan akuntabel	2. Nilai SAKIP	92,39%				SANGAT BERHASIL
11.	Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional	Indeks Profesionalitas ASN	100%				SANGAT BERHASIL
MISI 3 : Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan							
12.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	100,85%				SANGAT BERHASIL
JUMLAH (KET. 2 n.a)				1	0	1	10

3.2.1 TUJUAN 1 : Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi

Capaian kinerja tujuan “Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi ” diukur melalui pencapaian indikator Rasio Gini. Capaian kinerja tujuan dengan rinci terpapar pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.5.: Capaian Kinerja Tujuan Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Belitung Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPD	2024			Kategori	Target Akhir RPD 2026
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Rasio Gini	Poin	0,237	0.248-0.253	0,248	100	SB	0,246-0,251

Dari tabel di atas terlihat bahwa indikator kinerja tujuan belum bisa melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2024. Capaian kinerja Rasio Gini sebesar 100% dengan kategori SANGAT BERHASIL.

Nilai Rasio Gini Kabupaten Belitung tahun 2024 berada di angka 0,248. Angka tersebut menunjukkan pengeluaran penduduk Kabupaten Belitung pada tahun 2024 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah karena Rasio Gini atau Indeks Gini merupakan suatu indikator untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan pada suatu daerah. Semakin tinggi atau besar Rasio Gini, semakin tinggi pula tingkat ketidakmerataannya (distribusi pendapatannya tidak merata) dan sebaliknya jika semakin kecil Rasion Gini semakin rendah tingkat ketidakmerataannya (distribusi pendapatannya semakin merata).

Distribusi pendapatan merupakan unsur penting untuk mengetahui tinggi atau rendahnya kesejahteraan atau kemakmuran suatu daerah. Distribusi pendapatan yang merata kepada masyarakat akan mampu menciptakan perubahan dan perbaikan suatu daerah seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan sebagainya. Rasio Gini Kabupaten Belitung berfluktuasi dari 0,195 pada tahun 2021 naik menjadi 0,237 tahun 2022, kemudian meningkat hingga mencapai angka 0,253 pada tahun 2023. Pada tahun 2024 menurun menjadi 0,248.

Sementara itu, guna terus menekan angka capaian rasio gini, Pemerintah Kabupaten Belitung berupaya memperkuat usaha mikro. Karena UKM menjadi pilar penting dalam membangun perekonomian masyarakat. Sejumlah program seperti pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM) dan pengembangan UMKM dilakukan untuk mencapai hal tersebut.

Pemerintah Kabupaten Belitung juga berupaya menekan angka capaian indeks gini melalui pemberian bantuan kepada masyarakat dari segi pengeluaran seperti dalam sektor pendidikan, pemberian beasiswa simpor, kemudian ada bantuan-bantuan sosial dan sejenisnya. Dan menjamin akses-akses barang kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi dengan program stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.

Ketimpangan ekonomi pada dimensi distribusi pendapatan merupakan sebuah realita yang ada di tengah-tengah masyarakat. Fenomena ini telah menjadi perhatian publik, sehingga upaya evaluasi yang sangat mendesak dilakukan. Dari hasil evaluasi diharapkan pertumbuhan ekonomi pada akhirnya juga akan membawa konsekuensi berkurangnya tingkat ketimpangan pembangunan dan hasil-hasilnya atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi dapat sejalan dengan perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Apabila ketimpangan ini dibiarkan semakin melebar maka akan semakin mendistorsi hasil pembangunan.

Oleh karena itu upaya mengetahui besaran ketimpangan pengeluaran antar golongan penduduk maupun secara spasial perlu dilakukan. Indeks Gini (gini ratio) yang merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah Tingkat pemerataan distribusi pendapatan sering diukur dengan koefisien gini. Koefisien Gini bernilai nol, jika pendapatan secara nyata menyebar merata, dan mendekati 1 jika secara nyata distribusi pendapatan menyebar tidak merata. Berdasarkan nilai gini ratio, terdapat tiga kelompok ketimpangan yaitu: ketimpangan tinggi jika nilai koefisien gini ratio 0,5 atau lebih, sedang jika nilainya antara 0,30-0,49 dan rendah jika kurang dari 0,30.

Data Indeks gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten/Kota tahun 2021 sampai tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.6.: Tabel Gini Rasio Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021-2023

Provinsi/Kabupaten/Kota	Gini Rasio Menurut Kabupaten/Kota		
	2021	2022	2023
Kepulauan Bangka Belitung	0,256	0,236	0,245
Bangka	0,243	0,219	0,243
Belitung	0,195	0,237	0,253
Bangka Barat	0,248	0,211	0,199
Bangka Tengah	0,249	0,195	0,227
Bangka Selatan	0,209	0,208	0,209
Belitung Timur	0,243	0,250	0,228
Pangkalpinang	0,300	0,268	0,277

Sumber: BPS Provinsi Kep. Bangka Belitung, 2024

Berdasarkan nilai gini ratio Kabupaten Belitung dalam jangka waktu 4 tahun terakhir (Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024) berada kategori rendah yaitu berada pada posisi dibawah 0,30. Pada Tahun 2023 posisi Kabupaten Belitung berada pada nomor 2 tertinggi di ditingkat Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung setelah posisi pertama tertinggi yaitu Kota Pangkalpinang.

Struktur ekonomi Kabupaten Belitung, yang mempengaruhi nilai gini ratio adalah Sektor Agraris, dimana Lebih dari 27,10 persen perekonomian didukung oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan

Perikanan. Bahwa ketimpangan di wilayah agraris lebih kecil dibandingkan dengan wilayah industri karena rendahnya level penghasilan yang diterima oleh individu di wilayah agraris tersebut. Adapun tingkat ketimpangan mengalami peningkatan pada wilayah dengan struktur perekonomian yang bercorak industri.

Berdasarkan Perkembangan rasio gini Kabupaten Belitung antara Tahun 2021 s/d 2024 cenderung fluktuatif, maka upaya yang dilakukan antara lain

1. Perlu adanya upaya untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian untuk mengejar ketertinggalan dari sektor lainnya;
2. Perlu adanya upaya untuk mendorong transfer surplus tenaga kerja di sektor pertanian ke sektor ekonomi kreatif dengan mengadakan pelatihan maupun kursus keterampilan termasuk penguatan pangsa pasar. ;
3. Hampir separuh dari tenaga kerja yang ada berlatar belakang tingkat pendidikan menengah ke bawah. Oleh karena itu, perlu dibuat program untuk menjaga tingkat APM (Angka Partisipasi Murni) agar tidak turun dan meningkatkan target APM untuk level Sekolah Menengah.
4. Dalam jangka pendek, intervensi terhadap kelompok pengeluaran terbawah dapat dilakukan dengan melanjutkan program raskin maupun bantuan tunai. Namun demikian kebijakan ini perlu selalu dimonitor dan dievaluasi mengingat dalam jangka panjang dapat menyebabkan ketergantungan dan inefisiensi anggaran.
5. Perlu dibuatkan program pengelolaan ekonomi (pariwisata) berbasis komunitas dengan mengedepankan modal sosial (kultur sosial). Program tersebut harus mengutamakan keterlibatan dari kelompok masyarakat.

Tabel 3.7.: Sasaran dan Strategi Pencapaian Tujuan 1

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Tujuan 1 Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	Sasaran 1 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Meningkatkan daya saing pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan Meningkatkan produksi pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang berkualitas dan berkelanjutan sesuai dengan potensi desa, dan mendukung pembangunan kepariwisataan Meningkatnya pengembangan perikanan tangkap dan budidaya Meningkatkan pengembangan koperasi dan usaha mikro Meningkatkan tata kelola penanaman modal, perizinan, perdagangan dan perindustrian Memperkuat ekonomi desa dan kawasan pedesaan Meningkatkan pengendalian, pengawasan ekonomi dan pembangunan

	Sasaran 2 Menurunya kemiskinan penduduk	Peningkatan perlindungan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja Mengurangi beban pengeluaran
	Sasaran 3 Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah dengan memperhatikan tata ruang wilayah Peningkatan sarana dan prasarana permukiman yang layak huni

SASARAN 1 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan merupakan salah satu indikator kinerja utama RPD dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan target “4,5”. Berikut realisasi dan capaian indikator sasaran Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan Kabupaten Belitung Tahun 2024.

Tabel 3.8.: Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPD	Target	2024 Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target Akhir RPD 2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	5,71	4,5	1,84	40,89	K	4,9

Dari tabel di atas terlihat bahwa indikator kinerja tujuan tidak bias mencapai target yang ditetapkan dalam RPD. Target Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Belitung tahun 2024 adalah 4,5 dan terealisasi hanya sebesar 1,84 dengan capaian kinerja sebesar 40,89% dengan kategori **KURANG**.

Kemampuan ekonomi suatu daerah memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi untuk berinvestasi di daerah tersebut. Investasi yang masuk tentunya akan menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) bagi peningkatan daya saing daerah. Salah satu tolok ukur kemampuan ekonomi suatu daerah adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita yang disesuaikan. Indikator ini menunjukkan tingkat daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa yang memberikan gambaran tentang kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi daya beli masyarakat, maka akan semakin tinggi pula kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Laju Pertumbuhan Ekonomi dihitung berdasarkan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu.

Penyusunan PDRB menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi dan menurut

komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Untuk melihat pertumbuhan ekonomi, pada Laporan ini, menggunakan PDRB dari sisi lapangan usaha. Rendahnya ekonomi maka pendapatan akan menurun drastis.

Bila dilihat berdasarkan lapangan usaha, maka dapat disimpulkan bahwa perekonomian Kabupaten Belitung tahun 2024 ditopang oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan Industri Pengolahan. Kedua kategori lapangan usaha ini memberikan kontribusi masing-masing sebesar 27,10 persen dan 12,67 persen.

Berdasarkan data resmi dari BPS Kabupaten Belitung, PDRB ADHB Kabupaten Belitung tahun 2024 adalah 14.151,24 miliar rupiah, meningkat dibandingkan tahun 2023 yang nilainya 13.504,09 miliar rupiah. Demikian juga dengan PDRB ADHK juga mengalami peningkatan dari 7.500,36 miliar rupiah di tahun 2023, menjadi 7.638,73 miliar rupiah di tahun 2024.

Secara detail perkembangan PDRB Kabupaten Belitung selama kurun waktu 2018 – 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9.: PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Belitung 2022 – 2024, (milyar rupiah) ADHK 2010

LAPANGAN USAHA	2022	2023*	2024**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1 865,77	1 917,39	1 989,95
Pertambangan dan Penggalian	504,01	503,81	495,33
Industri Pengolahan	833,02	873,94	852,57
Pengadaan Listrik dan Gas	10,12	10,38	10,92
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	2,27	2,28	2,37
Konstruksi	832,06	908,50	889,29
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	800,86	815,16	809,68
Transportasi dan Pergudangan	468,02	517,22	513,16
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	261,61	288,37	300,84
Informasi dan Komunikasi	341,06	388,69	427,72
Jasa Keuangan dan Asuransi	164,36	189,47	190,08
Real Estat	234,11	244,05	255,04
Jasa Perusahaan	22,59	24,62	26,93
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	414,58	442,99	478,02
Jasa Pendidikan	131,69	146,22	162,05
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	153,02	167,08	169,64
Jasa Lainnya	54,04	60,18	65,13
Produk Domestik Bruto	7 093,18	7 500,36	7 638,73

Sumber: Kabupaten Belitung Dalam Angka, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa selama kurun waktu 2022 – 2024 PDRB Kabupaten Belitung menunjukkan kecenderungan meningkat. Dilihat dari sisi lapangan usaha, lapangan usaha yang paling banyak berkontribusi adalah kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Pada tahun 2024 kontribusinya sebesar Rp 1.989,95 miliar atau sebesar 27,10%. Lapangan usaha yang kedua adalah industri

pengolahan sebesar 12,67%, kemudian konstruksi sebesar 11,74%, dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 10,31%. Berikut ditampilkan distribusi persentase PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha kurun waktu 2022 – 2024 :

Tabel 3.10.: Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Belitung 2022 – 2024, ADHB

LAPANGAN USAHA	2022	2023*	2024**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	26,90	26,59	27,10
Pertambangan dan Penggalian	5,47	4,91	4,85
Industri Pengolahan	13,15	13,02	12,67
Pengadaan Listrik dan Gas	0,15	0,14	0,14
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03
Konstruksi	11,72	12,04	11,74
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,93	10,61	10,31
Transportasi dan Pergudangan	7,62	8,26	8,11
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,03	4,13	4,22
Informasi dan Komunikasi	3,34	3,52	3,70
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,31	2,46	2,38
Real Estat	3,13	3,06	3,07
Jasa Perusahaan	0,33	0,35	0,36
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	6,30	6,17	6,45
Jasa Pendidikan	1,92	1,98	2,12
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,89	1,92	1,89
Jasa Lainnya	0,79	0,83	0,88

Catatan : *Angka Sementara **Angka Sangat Sementara
Sumber: Kabupaten Belitung Dalam Angka, 2025

Dapat diuraikan bahwa selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir terjadi peningkatan kontribusi beberapa lapangan usaha terhadap PDRB Kabupaten Belitung dan beberapa lapangan usaha lain mulai berkurang. Lapangan usaha yang menunjukkan penurunan antara lain pertambangan dan penggalian, konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Jasa Keuangan dan Asuransi, jasa kesehatan dan kegiatan social .

Hal ini mengindikasikan bahwa mulai terjadi pergeseran kegiatan ekonomi masyarakat Kabupaten Belitung, dari ketergantungan terhadap alam menuju masyarakat yang mengandalkan jasa. Kondisi ini tentunya harus menjadi perhatian utama Pemerintah Kabupaten Belitung untuk mempersiapkan SDMnya dan membekali masyarakat dengan keahlian.

Pada tahun 2024 LPE Kabupaten Belitung sebesar 1,84%, menurun jika dibandingkan LPE tahun 2022 sebesar 5,71% dan juga LPE tahun 2023 sebesar 5,74%. Perlambatan LPE ini tentunya dipengaruhi oleh laju pertumbuhan per lapangan usaha. Berikut gambaran laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan lapangan usaha di Kabupaten Belitung dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Tabel 3.11.: Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2022–2024

LAPANGAN USAHA	2022	2023*	2024**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,54	2,77	3,78

Pertambahan dan Penggalian	-0,93	-0,04	-1,68
Industri Pengolahan	8,17	4,91	-2,45
Pengadaan Listrik dan Gas	-4,03	2,52	5,20
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4,74	0,77	3,84
Konstruksi	-0,88	9,19	-2,11
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,26	1,78	-0,67
Transportasi dan Pergudangan	36,30	10,51	-0,78
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14,16	10,23	4,32
Informasi dan Komunikasi	10,49	13,97	10,04
Jasa Keuangan dan Asuransi	6,03	15,28	0,32
Real Estat	5,48	4,25	4,51
Jasa Perusahaan	22,31	8,99	9,37
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-1,44	6,85	7,91
Jasa Pendidikan	2,91	11,04	10,83
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,81	9,19	1,53
Jasa Lainnya	12,22	11,35	8,23
Produk Domestik Bruto	5,71	5,74	1,84

Catatan : *Angka Sementara **Angka Sangat Sementara
Sumber : Kabupaten Belitung Dalam Angka, 2025

Pada tahun 2024 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung mengalami penurunan begitupun dengan Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2024 adalah 0,77%. Angka ini lebih lambat dibandingkan tahun 2023 yang tumbuh 4,38%.

Berikut gambaran laju pertumbuhan ekonomi menurut Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu tiga tahun terakhir :

Tabel 3.12.: Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Kabupaten di Prov. Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022-2024

NO	KABUPATEN/ KOTA	TAHUN		
		2022	2023*	2024**
1	Bangka	4,87	4,44	-0,44
2	Belitung	5,71	5,75	1,84
3	Bangka Barat	2,01	2,50	5,47
4	Bangka Tengah	6,10	5,16	-0,34
5	Bangka Selatan	3,07	3,69	0,90
6	Belitung Timur	3,80	4,72	-0,34
7	Pangkalpinang	6,21	5,32	-2,30
Provinsi Bangka Belitung		3,32	4,40	0,77

Sumber : Kabupaten Belitung Dalam Angka, 2025

Dari deskripsi di atas dapat tergambar bahwa kondisi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Belitung Tahun 2024 mengalami penurunan. Sehingga perekonomian Kabupaten Belitung menduduki peringkat tinggi ke dua di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung setelah Kabupaten Bangka Barat.

Untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah dapat melakukan intervensi melalui langkah-langkah dan program-program strategis sebagai upaya pencapaian tujuan sesuai dengan RPD.

Adapun faktor pendukung laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut :

- ❖ Pertumbuhan tertinggi dari sisi produksi berasal dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang merupakan sector andalan Kabupaten Belitung dalam menunjang pertumbuhan ekonomi;
- ❖ Iklim usaha yang kondusif bagi usaha perdagangan dan industri yang sudah ada maupun bagi investasi baru, sector industry dapat menyerap banyak tenaga kerja dan menciptakan pertumbuhan ekonomi melalui nilai tambah yang dihasilkan;
- ❖ Meningkatnya pangsa sektor industri pengolahan di pasar domestik;
- ❖ Meningkatnya penerapan standarisasi produk industri sebagai penguat daya saing produk industri;
- ❖ Penetapan Kabupaten Belitung sebagai salah satu dari 10 Destinasi Wisata Nasional menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi investor terutama yang bergerak di sektor industri pariwisata;
- ❖ Stabilitas sosial, politik dan keamanan yang terjaga;
- ❖ Bonus demografi yang dimiliki Kabupaten Belitung.

Sedangkan faktor penghambat laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut:

- ✘ Tingkat inflasi yang masih tinggi;
- ✘ Rendahnya daya tarik investasi dan kurangnya kemandirian fiscal yang mempengaruhi pendapatan yang mampu diperoleh daerah untuk menjalankan perekonomian, termasuk penyediaan barang publik;
- ✘ Kualitas SDM yang belum memadai, rendahnya angka partisipasi murni dan lama sekolah mempengaruhi kualitas SDM yang akhirnya mempengaruhi produktivitas.

Setelah memperhatikan faktor pendukung dan faktor penghambat tersebut, maka untuk menjaga capaian kinerja sasaran di masa yang akan datang, upaya peningkatannya sebagai berikut :

- ⌘ Upaya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung dapat dilakukan dengan mengembangkan sektor pertanian, perkebunan, dan industri;
- ⌘ perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan berkesinambungan;
- ⌘ Mendorong peningkatan investasi yang sesuai dengan potensi daerah dengan memberi kemudahan-kemudahan seperti proses perijinan tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- ⌘ Mendorong pengembangan teknologi sehingga dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan memberi kesempatan sektor swasta untuk berinovasi sehingga memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah;
- ⌘ Meningkatkan kualitas SDM dengan program-program pelatihan.

Tabel 3.13.: Realisasi Keuangan Program penunjang Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan Tahun 2024

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	5.362.530.464	4.751.367.416	88,60%
2	Program Pemasaran Pariwisata	753.286.242	684.168.261	90,82%

3	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	434.196.650	409.483.500	94,31%
4	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	104.893.950	84.836.538	80,88%
5	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	383.220.000	238.727.572	62,30%
6	Program Pengembangan Kebudayaan	1.044.416.400	935.011.590	89,52%
7	Program Pengelolaan Permuseuman	2.933.958.100	2.772.301.671	94,49%
8	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.352.704.010	2.315.006.616	98,40%
9	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	236.302.300	205.404.083	86,92%
10	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	117.293.000	115.467.700	98,44%
11	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	150.148.000	147.160.920	98,01%
12	Program Perizinan Usaha Pertanian	760.600.000	658.188.674	86,54%
13	Program Penyuluhan Pertanian	307.217.000	292.254.644	95,13%
14	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.740.968.750	2.484.417.800	0,00%
15	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	660.831.100	614.049.245	92,92%
16	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	392.983.200	359.391.480	0,00%
17	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.001.581.000	982.404.418	98,09%
18	Program Pendidikan Dan Pelatihan Pengkoperasian	0	0	0,00%
19	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	311.620.770	152.631.050	48,98%
20	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	432.568.600	362.575.350	83,82%
21	Program Pengembangan Umkm	363.399.600	323.667.644	0,00%
22	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	41.369.050	38.947.472	94,15%
23	Program Promosi Penanaman Modal	117.430.982	114.854.419	97,81%
24	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	450.709.370	429.683.519	95,33%
25	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	45.437.000	22.509.750	49,54%
26	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	911.601.850	883.271.987	96,89%
27	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	439.498.900	435.651.334	99,12%

28	Program Perekonomian Dan Pembangunan	2.636.710.215	1.889.071.727	71,65%
29	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	6.053.838.200	5.659.328.838	93,48%

Sehingga untuk sasaran Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan Tahun 2024 dengan realisasi anggaran sebesar 89,98% dan persentase rata-rata capaian program sasaran sebesar 78,08% maka terdapat efisiensi 10,08 %.

SASARAN 2 : Menurunnya Kemiskinan Penduduk

Menurunnya Kemiskinan Penduduk merupakan salah satu indikator kinerja utama RPD dengan indikator Tingkat kemiskinan dengan target “6,40”. Berikut realisasi dan capaian indikator sasaran Menurunnya Kemiskinan Penduduk Kabupaten Belitung Tahun 2024.

Tabel 3.14.: Capaian Kinerja Sasaran Menurunnya Kemiskinan Penduduk

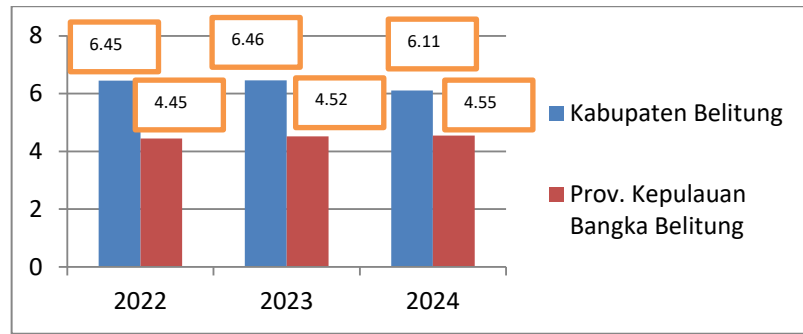
No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPD	Target	2024 Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target Akhir RPD 2026
1	Tingkat Kemiskinan	Persentase	6,45	6,40	6,11	104,53	SB	6,2

Dari tabel di atas terlihat bahwa indikator kinerja tujuan melebihi target yang ditetapkan dalam RPD. Target Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Belitung tahun 2024 adalah 6,40 dan terealisasi sebesar 6,11 dengan capaian kinerja sebesar 104,53% dengan kategori **SANGAT BERHASIL**.

Persentase penduduk miskin menurut BPS adalah persentase penduduk yang berada di Bawah Garis Kemiskinan (GK). Persentase penduduk miskin di Kabupaten Belitung dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 berfluktuasi. Dengan angka kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 2023 yaitu 6,46 kemudian turun menjadi 6,11% pada tahun 2024.

Sama halnya di tingkat provinsi juga berfluktuatif dalam tiga tahun terakhir namun di tahun 2024 mengalami kenaikan dengan selisih 0,03% menjadi 4,55% di tahun 2024. Meski demikian persentase penduduk miskin di Kabupaten Belitung masih berada di bawah nasional yaitu sebesar 6,11% pada tahun 2024. Sebagaimana tampak pada gambar perkembangan persentase penduduk miskin (%) Kabupaten Belitung Tahun 2022-2024.

Grafik 3.1.: Perkembangan persentase Penduduk Miskin (%) Kabupaten Belitung Tahun 2022-2024

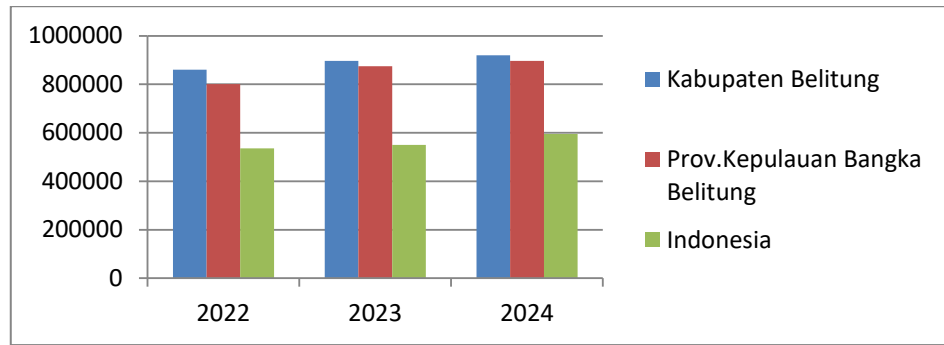


Sumber Data : BPS Belitung, 2025, diolah

Perkembangan garis kemiskinan di Kabupaten Belitung selama tiga tahun yaitu dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 terus mengalami peningkatan. Garis kemiskinan berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin di suatu daerah. Garis kemiskinan merupakan tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu daerah. Pada tahun 2024 garis kemiskinan Kabupaten Belitung mencapai Rp. 919.372,- atau bertambah sebesar Rp. 22.424,- dari tahun 2023 yang sebesar Rp. 896.948,-. Hal ini dapat diartikan bahwa seseorang yang tinggal di wilayah Kabupaten Belitung akan dikategorikan sebagai penduduk miskin jika total pengeluaran untuk konsumsi makanan dan non makanan setiap bulannya kurang dari Rp. 919.372,-. Jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, garis kemiskinan Kabupaten Belitung tergolong tinggi, bahkan jauh melebihi garis kemiskinan nasional yang hanya sebesar Rp. 595.242,- pada tahun 2024 atau memiliki selisih Rp. 324.130,- dan selisih Rp. 22.242,- dari garis kemiskinan Provinsi Kep. Bangka Belitung yang sebesar Rp. 896.948,- di tahun yang sama.

Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tingginya garis kemiskinan di Provinsi Kep. Bangka Belitung umumnya dan Kabupaten Belitung khususnya, antara lain disebabkan harga kebutuhan pokok yang relatif mahal karena sebagian besar dipasok dari luar daerah. Kualitas kemiskinan diukur dengan pendekatan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai P1, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin melebar.

Grafik 3.2.: Perkembangan Garis Kemiskinan (Rp) Kabupaten Belitung Tahun 2022-2024

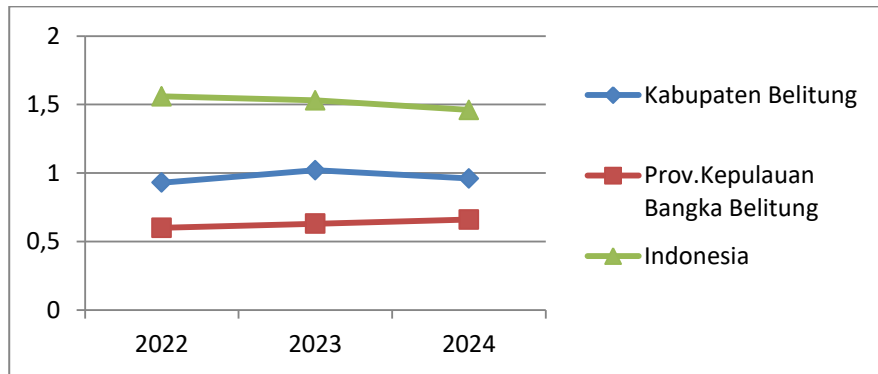


	Kabupaten Belitung	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	Indonesia
2022	860.629	801.437	535.437
2023	896.948	874.204	550.458
2024	919.372	896.948	595.242

Sumber Data : BPS Belitung, 2024, diolah

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Belitung pada tahun 2023 sebesar 1,02 naik sebesar 0,09 poin dari tahun sebelumnya dan mengalami selisih penurunan 0,06 sehingga di tahun 2024 Indeks Kedalaman kemiskinan Di tahun 2024 sebesar 0,96. Artinya rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Belitung semakin jauh dari garis kemiskinan. Hal tersebut menunjukkan bahwa penduduk miskin yang semakin susah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Grafik 3.3.: Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Belitung Tahun 2022-2024



	Kabupaten Belitung	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	Indonesia
2022	0,93	0,60	1,56
2023	1,02	0,63	1,53
2024	0,96	0,66	1,46

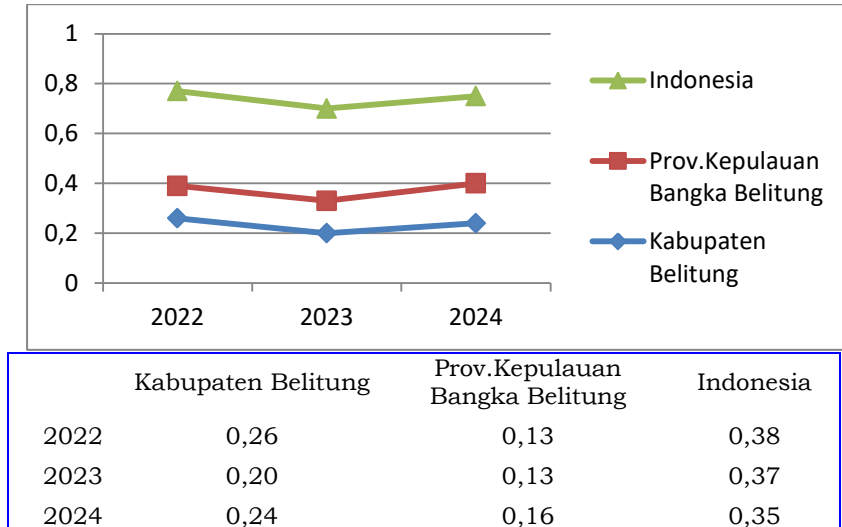
Sumber Data : BPS Belitung, 2024, diolah

Indeks Keparahan Kemiskinan, menurut BPS merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks, maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Belitung cenderung berfluktuatif selama kurun waktu 2022 – 2024.

Pada tahun 2024 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun

sebelumnya yaitu sebesar 0,20 dari sebelumnya menjadi 0,24. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin di Kabupaten Belitung semakin rendah.

Grafik 3.4.: Perkembangan Indeks Keperahan Kemiskinan Kabupaten Belitung Tahun 2022-2024

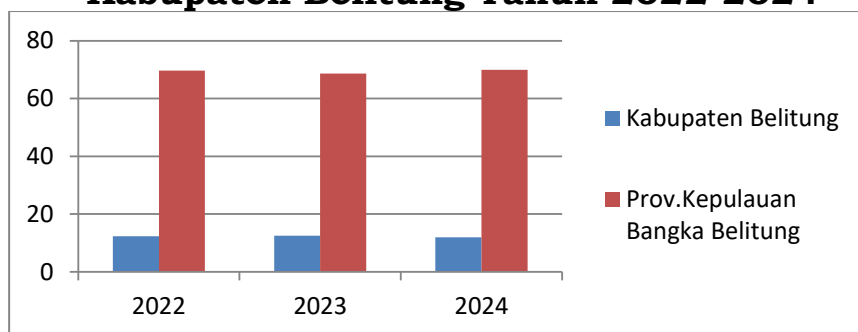


Sumber Data : BPS Belitung, 2025, diolah

Perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Belitung selama 3 (tiga) tahun terakhir mengalami kecenderungan berfluktuatif sebagaimana tampak pada gambar Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Belitung Tahun 2022 – 2024. Pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 11.970 jiwa dari tahun 2023 yang berjumlah 12.510 jiwa dengan selesih penurunan persentase 0,54 % .

Sebagaimana tampak pada gambar Perkembangan Jumlah Penduduk Kemiskinan (Jiwa) Kabupaten Belitung Tahun 2022-2024.

Grafik 3.5.: Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) Kabupaten Belitung Tahun 2022-2024



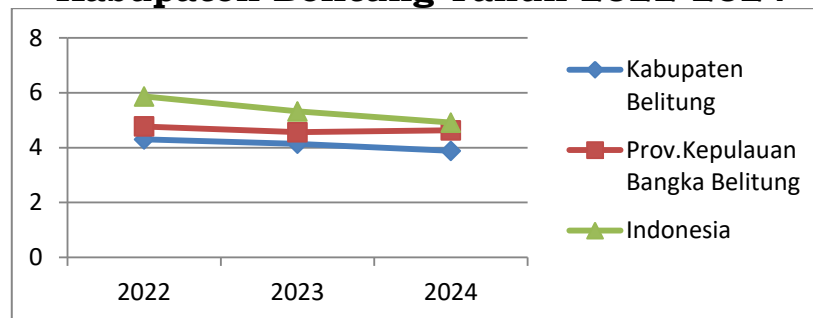
	Kabupaten Belitung	Prov.Kepulauan Bangka Belitung
2022	12,34	69,69
2023	12,51	68,69
2024	11,97	69,95

Sumber Data : BPS Belitung, 2025, diolah

Indikator kemiskinan pada bidang ketenagakerjaan dapat dilihat pada indikator utama yaitu tingkat pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka merupakan angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran terbuka dengan total angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka yang tinggi mengindikasikan adanya persoalan kemiskinan yang serius karena dengan tingkat pengangguran terbuka yang tinggi berarti banyak penduduk yang belum memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Belum adanya penghasilan menyebabkan penduduk yang menganggur belum mampu mencapai tingkat kehidupan yang layak.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Belitung mengalami penurunan dalam kurun 2022-2024. Lonjakan yang terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 4,30 % kemudian terjadi penurunan TPT Kabupaten Belitung di tahun 2023 sebesar 4,14 % dan terus mengalami penurunan dengan selisih 0,26% di tahun 2024 sehingga tingkat TPT pada tahun 2024 sebesar 3,88%. Meski demikian, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Belitung masih di bawah provinsi dan nasional.

Grafik 3.6.: Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Belitung Tahun 2022-2024



	Kabupaten Belitung	Prov.Kepulauan Bangka Belitung	Indonesia
2022	4,30	4,77	5,86
2023	4,14	4,56	5,32
2024	3,88	4,63	4,91

Sumber Data : BPS, 2025, diolah

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu: kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan sosial (PBB, 1996).

Berdasarkan Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD1,9 PPP (Purchasing Power Parity), atau setara dengan 10.739/orang/hari atau Rp322.170/orang/bulan (Bank Dunia, 2022). Secara sederhana apabila dalam satu keluarga terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak), maka jika kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya di bawah Rp1.288.680 per keluarga/bulan, maka keluarga tersebut termasuk kategori miskin ekstrem.

Garis kemiskinan ekstrem disepakati oleh Negara yang tergabung di PBB dan pengukurannya dilakukan oleh Bank Dunia. Di Indonesia garis kemiskinan ekstrem ditetapkan oleh BPS. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran dilakukan melalui strategi kebijakan yang meliputi:

- Pertama, pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui pemberian bantuan sosial, jaminan sosial dan subsidi yaitu kelompok program/kegiatan.
- Kedua, peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat.
- Ketiga, penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur pelayanan dasar.

Kriteria kemiskinan ekstrem daerah berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pedoman Pendataan dan Kriteria Kemiskinan Ekstrem sebagai berikut:

- a. Pengeluaran tidak melebihi dari Rp322.170/individu/bulan
- b. Tidak memiliki alat telekomunikasi dan akses kendaraan bermotor
- c. Kepala keluarga tidak bersekolah/ tidak tamat SD
- d. Tidak mendapat akses terhadap sanitasi yang layak (sumber air bersih)
- e. Pengeluaran kebutuhan makan lebih besar dari setengah total pengeluaran
- f. Tidak memiliki jamban sendiri atau menggunakan jamban komunitas
- g. Tidak memiliki tempat tinggal atau tempat tinggal sebagian besar berlantai tanah dan/atau plesteran
- h. Tempat tinggal sebagian ber dinding bambu, kawat, papan, kayu, terpal, kardus, tembok tanpa diplester, rumbia atau seng.

Tabel 3.15.: Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Belitung Tahun 2024 (per Maret)

Kecamatan	Desil							
	Desil 1		Desil 2		Desil 3		Desil 4	
	Keluarga	Individu	Keluarga	Individu	Keluarga	Individu	Keluarga	Individu
Tanjungpandan	1.628	7.012	2.829	6.954	2.681	10.313	3.652	12.997
Sijuk	553	2.232	1.120	2.552	992	3.755	1.476	5.413
Membalong	682	2.400	1.227	2.847	1.010	3.451	1.386	4.536
Badau	388	1.493	671	1.789	692	2.389	789	2.590
Selat Nasik	335	1.295	238	614	204	703	243	842
Kab. Belitung	3.586	14.432	6.085	14.756	5.579	20.611	7.546	26.378

Sumber: Kemenkopmk, 2024

Berdasarkan tabel di atas, data P3KE di Kabupaten Belitung untuk data keluarga mengalami peningkatan dari sebelumnya 21.158 keluarga menjadi 22.796 keluarga pada tahun 2024. Sedangkan untuk jumlah individu menurun dari sebelumnya 77.048 individu menjadi 76.177 individu. P3KE dimaksudkan sebagai referensi penetapan sasaran bagi program penghapusan kemiskinan ekstrem yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan daerah hasil pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (Pendataan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional/ PK-BKKBN 2021 dan 2022). Sedangkan di Kabupaten Belitung, data kemiskinan ekstrem hasil verifikasi dan validasi data oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung adalah sebanyak 22 individu atau 10 keluarga, yang telah di SK-kan melalui Surat Keputusan Bupati Belitung

Nomor 100.3.4/539/KEP/DSPPPA/2023 tentang Penetapan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Belitung.

Berdasarkan hasil musyawarah desa dan kelurahan dari lima kecamatan di Kabupaten Belitung, kemiskinan ekstrem sudah **di-nol-kan** dan di-SK-kan melalui Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor 100.3.4/495/KEP/DSPPPA/2024 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Belitung Nomor 100.3.4/230/KEP/DSPPPA/2023 tentang Penetapan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Belitung Sebagaimana Telah diubah dengan Keputusan Bupati Belitung Nomor: 100.3.4/539/KEP/DSPPPA/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Belitung Nomor: 100.3.4/230/KEP/DSPPPA/2023 tentang Penetapan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Belitung.

Dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 tidak dapat dilaksanakan secara parsial namun perlu kolaborasi dan sinergi atau secara holistik, intergratif dan spasial antar *stakeholder* maupun pemangku kepentingan. Beberapa hal yang dapat upayakan untuk peningkatan tahun berikutnya yaitu sebagai berikut:

1. Perlu adanya pemutakhiran data penduduk miskin yang telah diverifikasi dan validasi
2. Perlu adanya inovasi bagi perangkat daerah yang berkaitan langsung dengan penanggulangan kemiskinan
3. Mengevaluasi kembali program-program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk melihat efektivitas dan keberhasilan program-program tersebut dalam rangka penanggulangan kemiskinan
4. Penanggulangan kemiskinan perlu didukung dengan kebijakan yang menekankan perubahan dalam perumusan kebijakan, pengelolaan anggaran, serta penataan kelembagaan penanggulangan kemiskinan
5. Kinerja Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah perlu ditingkatkan.

Tabel 3.16.: Realisasi Keuangan Program penunjang Sasaran Menurunnya kemiskinan penduduk Tahun 2024

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	193.110.000	187.860.800	97,28%
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	0	0	0,00%
3	Program Hubungan Industrial	61.185.000	45.154.000	73,80%
4	Program Pemberdayaan Sosial	348.934.400	321.623.110	92,17%
5	Program Rehabilitasi Sosial	355.284.512	316.638.998	89,12%
6	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	644.184.050	513.269.294	79,68%

Sehingga untuk sasaran Menurunnya kemiskinan penduduk Tahun 2024 dengan realisasi anggaran sebesar 86,39% dan persentase rata-rata capaian program sasaran sebesar 86,41% maka terdapat efisiensi 13,61 %.

SASARAN 3 : Meningkatnya infrastruktur kewilayahan

Meningkatnya infrastruktur kewilayahan merupakan salah satu indikator kinerja utama RPD dengan indikator Meningkatnya infrastruktur kewilayahan dengan target “62,84”. Berikut realisasi dan capaian indikator sasaran Meningkatnya infrastruktur kewilayahan Kabupaten Belitung Tahun 2024.

Tabel 3.17.: Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya infrastruktur kewilayahan

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPD	Target	2024 Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Target Akhir RPD 2026
1	Persentase infrastruktur kewilayahan	Persentase	58,85	62,84	48,93	77,86	K	69,01

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi kinerja sasaran meningkatnya infrastuktur kewilayahan yaitu indikator kinerja Pemenuhan Infrastruktur Kewilayahan tahun 2024 sebesar 48,93 % dari target sebesar 62,84 %, dengan capaian kinerja sebesar 77,86 % berkategori KURANG.

Pencapaian kinerja sasaran persentase infrastruktur kewilayahan dihitung menggunakan formulasi sebagai berikut:

$(0,5 \times (\text{infrastruktur ke PUan dan permukiman})) + (0,5 \times \text{infrastruktur perhubungan})$ dimana:

1. Infrastruktur ke PUan dan permukiman = $(0,5 \times \text{Persentase pemenuhan infrastruktur kePUan}) + (0,5 \times \text{Rata-rata pemenuhan PSU Pemukiman})$
2. Infrastruktur perhubungan = $(0,5 \times \text{persentase pemenuhan pelabuhan}) + (0,5 \times \text{sarpras keselamatan jalan})$

Pencapaian kinerja sasaran persentase infrastruktur kewilayahan dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &= (0,5 \times (45,35)) + (0,5 \times 52,50) \\
 &= (22,68 + 26,25) \\
 &= 48,93
 \end{aligned}$$

Pencapaian kinerja meningkatnya infrastruktur kewilayahan dicapai melalui strategi yaitu meningkatnya aksesibilitas antar wilayah dengan memperhatikan tata ruang wilayah dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Permukiman yang layak huni.

Ada 13 (tiga belas) arah kebijakan strategi meningkatkan aksesibilitas antar wilayah dengan memperhatikan tata ruang wilayah, yaitu 1) meningkatkan kebijakan perencanaan tata ruang; 2) meningkatkan pengendalian dan pemanfaatan tata ruang; 3) peningkatan standar jalan kabupaten; 4) peningkatan jalan non status menjadi jalan kabupaten; 5) meningkatkan legalitas dan pengelolaan sumber daya air; 6) meningkatkan pengendalian sumber daya air; 7) meningkatkan konektivitas transportasi antar moda; 8) peningkatan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; 9) peningkatan pelayanan keselamatan transportasi darat; 10) peningkatan manajemen rekayasa lalu lintas; 11) meningkatkan konektivitas antar pulau; 12) meningkatkan pelayanan pelabuhan; dan 13) meningkatkan pemenuhan persyaratan kebutuhan pembangunan pelabuhan.

Dan ada 8 (delapan) arah kebijakan strategi peningkatan sarana dan prasarana permukiman layak huni, yaitu 1) pemenuhan rumah layak huni korban bencana; 2) pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah; 3) Rehabilitasi rumah layak huni untuk MBR; 4) Meningkatnya aksesibilitas lingkungan dan permukiman; 5) Pengurangan kawasan kumuh; 6) Meningkatkan pelayanan air minum/ air bersih; 7) Meningkatkan sarana dan prasarana air limbah; 8) Meningkatkan sarana dan prasarana drainase lingkungan.

Hasil pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung atas sasaran strategis terwujudnya pelayanan infrastruktur wilayah yang sesuai dengan tata ruang yang dijabarkan dalam **indikator pemenuhan infrastruktur ke-PU-an dan permukiman, menunjukkan bahwa indikator kinerja sebesar 45,35% telah mencapai target.**

Pemenuhan infrastruktur kePuan dan permukiman diukur menggunakan formulasi perhitungan = $(0,50 \times \text{Persentase pemenuhan infrastruktur kePuan}) + (0,50 \times \text{Rata-rata Pemenuhan PSU Permukiman})$. Untuk kinerja atas sasaran strategis meningkatnya infrastruktur ke-PU-an dengan indikator pemenuhan infrastruktur ke-PU-an, menunjukkan bahwa indikator kinerja sebesar 25,57% belum mencapai target sementara untuk kinerja sasaran strategis meningkatnya infratsruktur permukiman dengan indikator kinerja pemenuhan PSU permukiman, menunjukkan indikator kinerja sebesar 65,14% telah mencapai target.

Tabel 3.18.: Target dan Realisasi Kinerja Meningkatnya Infrastruktur ke-PU-an

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Capaian	Capaian (%)	Notifikasi
1	Meningkatnya Infrastruktur ke-PU-an	Pemenuhan infrastruktur ke-PU-an	Persen	26,17	25,57	97,71	Belum tercapai

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2025

Pemenuhan Infrastruktur ke-PU-an = (0,25 x jalan standar kabupaten) + (0,25 x rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang aman) + (0,25 x rumah dengan layanan SPALD) + (0,25 x sumber daya air yang terkelola dengan baik)

Keterangan :

- a. Persentase jalan standar = (Panjang jalan Standar kabupaten / Panjang jalan kabupaten) x 100%

$$\frac{\text{Panjang jalan standar kabupaten}}{\text{Panjang jalan kabupaten}} \times 100\%$$

$$\frac{183,18}{666,02} \times 100\%$$

Realisasi Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten adalah sebesar 27,50% dengan perhitungan Panjang jalan standar kabupaten sebesar 183,18 km dibagi dengan Panjang jalan kabupaten yaitu 666,02 km dikali seratus persen.

- b. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang aman = (jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum aman/Jumlah Rumah Tangga di Kabupaten Belitung) x 100%

$$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum aman}}{\text{Jumlah rumah tangga di Kabupaten Belitung}} \times 100\%$$

$$\frac{11.431}{61.297} \times 100\%$$

Realisasi Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang aman adalah sebesar 18,65 % dengan perhitungan Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum aman sebesar 11.431 rumah tangga dibagi dengan jumlah rumah tangga di Kabupaten Belitung yaitu 61.297 rumah tangga dikali seratus persen.

- c. Persentase rumah dengan layanan SPALD = (Jumlah rumah dengan SPALD/Jumlah Rumah di Kabupaten Belitung) x 100%

$$\frac{\text{Jumlah rumah dengan SPALD}}{\text{jumlah rumah di Kabupaten Belitung}} \times 100\%$$

$$\frac{2.935}{38.153} \times 100 \%$$

Realisasi Persentase rumah dengan layanan SPALD adalah sebesar **7,69 %** dengan perhitungan jumlah rumah dengan SPALD sebesar **2.935 rumah** dibagi dengan jumlah rumah di Kabupaten Belitung yaitu **38.153 rumah** dikali seratus persen.

- d. Persentase sumber daya air yang terkelola dengan baik = (0,4 x Persentase Luas Sawah Fungsional terlindungi infrastruktur + (0,6 x Persentase Pengelolaan SDA dan Bangunan Pantai yang terlindungi Infrastruktur).

Dengan Menggunakan rumus tersebut, realisasi indikator pemenuhan infrastruktur ke-PU-an pada tahun 2024 adalah sebesar 25,57%. Tingkat capaian kinerja sebesar 97,71%, dengan rincian sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & (0,4 \times \text{Persentase Luas Sawah Fungsional terlindungi infrastruktur} \\ & + (0,6 \times \text{Persentase Pengelolaan SDA dan Bangunan Pantai yang} \\ & \text{terlindungi Infrastruktur}) \\ & = (0,4 * 55,72\%) + (0,6 * 43,58\%) \\ & = 48,44\% \end{aligned}$$

Realisasi Persentase sumber daya air yang terkelola dengan baik adalah sebesar **48,44%** dengan perhitungan 40% Persentase Luas Sawah Fungsional terlindungi infrastruktur dan 60% Persentase Pengelolaan SDA dan Bangunan Pantai yang terlindungi Infrastruktur.

Belum Optimalnya standar lebar jalan lokal kabupaten (lokal primer maupun lokal sekunder) dikarenakan ketersediaan lahan untuk pembangunan jalan masih amat kurang. Pembangunan Infrastruktur terutama bidang jalan baik itu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Daerah memerlukan ketersediaan lahan yang cukup. Kesiapan lahan menjadi salah satu *readiness criteria* agar Pemerintah Pusat melalui dana APBN dapat melaksanakan kegiatannya di daerah.



Gambar 3.2.: Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten Tahun 2024

Penyebab tidak tercapainya target kinerja adalah kegiatan tahun 2024 hanya untuk operasional dan pemeliharaan baik itu irigasi maupun saluran air. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) didukung oleh 2 kegiatan yaitu:

1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.

2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.



Gambar 3.3.: Kegiatan pada Program Pengelolaan Sumber Daya Air

Untuk mewujudkan pencapaian Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung melaksanakan 1 (satu) kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota dengan 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
2. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
3. Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan

Dengan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota, telah terpasang 375 Sambungan Rumah (SR) selama tahun 2024 sehingga terdapat penambahan sekitar 521 Rumah Tangga yang terlayani air minum yang layak.

Gambar 3.4.: Kegiatan Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Tahun 2024



Pelaksanaan pencapaian kinerja pelayanan air minum didorong oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah adanya Pelayanan air minum yang dilaksanakan melalui UPT PAM Dinas PUPR Kabupaten Belitung dengan berbagai pelayanan diantaranya; pendistribusian air melalui sambungan rumah (SR), pelayanan air kemasan, dan pendistribusian air melalui mobil tangki. Pendistribusian air melalui mobil tangki merupakan pelayanan SPM air minum terhadap masyarakat yang tempat tinggalnya belum terlayani dengan jaringan perpipaan. Selain itu, pelayanan dengan mobil tangki dimaksudkan untuk mendukung pelayanan air minum yang bersifat insidental, seperti pelayanan pasca bencana serta sebagai komitmen Dinas PUPR Kabupaten Belitung untuk mendukung program Pemerintah Daerah dalam sektor pariwisata. Selain pelayanan air minum ke rumah-rumah penduduk, UPT PAM dinas PUPR juga mendistribusikan air minum ke

hotel-hotel di Kawasan KSPN dan kelompok nelayan pelabuhan perikanan Tanjungpandan.

Berikut adalah jumlah pelanggan aktif UPT PAM Dinas PUPR Kabupaten Belitung tahun 2024.

Tabel 3.19.: Jumlah Pelanggan Aktif UPT PAM Dinas PUPR Kabupaten Belitung Tahun 2024

No.	Nama SPAM	Jumlah pelanggan
1	SPAM Juru Seberang	108
2	SPAM IKK Sijuk	332
3	SPAM IKK Membalong	199
4	SPAM Desa Bantan	249
5	SPAM IKK Badau	257
6	PAM Kws, PPN Tanjungpandan	25
7	Mobil Tangki	0
8	Air Kemasan/Galon	92
9	SPAM Kws. Tanjung batu	272
10	SPAM IKK Selat Nasik	350
Jumlah		1952

Sumber : UPT PAM DPUPR Kab. Belitung, 2025



Gambar 3.5.: Sosialisasi Perda Retribusi serta Penarikan Retribusi



Gambar 3.6.: Pengambilan Sampling Air



Gambar 3.7: Sosialisasi Edukasi Air dari SMA Anugerah Belitung dan Kegiatan UPT PAM Tahun 2024

Pencapaian Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah didukung oleh Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota serta 2 (dua) sub kegiatan yaitu sub kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota dan sub kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman.



Gambar 3.8.: Kegiatan Pembangunan SPALD Tahun 2024

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase didukung Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota serta 2 (dua) sub kegiatan yaitu sub kegiatan pembangunan sistem drainase perkotaan serta sub kegiatan pembangunan sistem drainase lingkungan. Pada Tahun 2024 panjang drainase yang sudah dibangun adalah sepanjang 1.046 meter.



Gambar 3.9.: Kegiatan Pengembangan Sistem Drainase Tahun 2024

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang didukung oleh 4 (empat) kegiatan yaitu Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota,

Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota serta Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam tahun 2024 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut diatas antara lain yaitu :

1. Mengoptimalkan kegiatan-kegiatan yang sudah dianggarkan pada tahun 2024.
2. Mengoptimalkan sumber daya baik itu sumber daya manusia maupun sarana prasarana untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.
3. Melakukan evaluasi setiap triwulan terkait dnegan pelaksanaan kegiatan serta pencapaian kinerja

Capaian kinerja yang tidak mencapai target disebabkan antara lain oleh:

1. Ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, dikarenakan untuk lokasi dimaksud sudah dilaksnakan oleh pihak lain yaitu BPIW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Tidak adanya anggaran untuk mendukung terhadap ketercapaian indikator kinerja dikarenakan adanya keterbatasan anggaran Pemerintah Kabupaten.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja tahun 2024 atau untuk memperbaiki kinerja di tahun 2025, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung akan melakukan :

1. Mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk pencapaian kinerja.
2. Melakukan evaluasi dan monitoring setiap triwulan untuk mengetahui pencapaian dari indikator kinerja yang sudah ditentukan.
3. Melakukan koordinasi dengan pihak lain sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Tabel 3.20.: Target dan Realisasi Kinerja Meningkatkan Infrastruktur Permukiman

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan Target	Capaian	Capaian (%)	Notifikasi
1	Meningkatnya Infrastruktur Permukiman	Pemenuhan PSU Permukiman	Persen 64,52	65,14	100,96	tercapai

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2025

Sasaran ini merupakan sasaran startegis untuk urusan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pencapaian sasaran Meningkatkan Infrastruktur Permukiman diukur dengan menggunakan indikator kinerja Pemenuhan PSU Permukiman.

Uraian kinerja atas indikator kinerja meningkatnya infrastruktur ke-PU-an sebagai berikut :

- 1.1.1 Pemenuhan PSU Permukiman

Target kinerja pada tahun 2024 untuk indikator pemenuhan PSU Permukiman sebesar 64,52%.

Pada Tahun 2024, indikator pemenuhan PSU permukiman yang terealisasi sebesar 65,14% atau mencapai 100,96% dari target tahun 2024, dengan ringkasan sebagaimana disajikan berikut:

Table 3.21.: Realisasi Pemenuhan PSU Permukiman Tahun 2024

No	Uraian	Target	Realisasi
1	Pemenuhan PSU Permukiman	64,52	65,14

Sumber : Dinas PUPR Kab. Belitung, 2025

Berdasarkan tabel diatas, pencapaian kinerja meningkatnya infrastruktur permukiman dengan capaian sebesar 65,14% diperoleh dari rumus berikut:

Pemenuhan PSU Permukiman = (0,25 x jalan lingkungan) + (0,25 x RTH) + (0,25 x RLH korban bencana) + (0,25 x RLH korban relokasi program pemerintah)

Keterangan :

- Persentase jalan lingkungan = (Panjang jalan lingkungan yang tertangani / panjang jalan lingkungan yang direncanakan) x 100%;
- Persentase Ruang Terbuka Hijau berdasarkan persentase yang ada di RTRW;
- RLH Korban Bencana yaitu teranggarkannya program terkait dengan RLH korban bencana;
- RLH Korban Relokasi Program Pemerintah yaitu rumah layak huni yang dibangun.

Dengan menggunakan rumus tersebut, realisasi indikator pemenuhan PSU permukiman pada tahun 2024 adalah sebesar 65,14% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100,96%, dengan rincian sebagai berikut :

- Persentase jalan lingkungan didapat dengan menggunakan rumus

$$\frac{\text{jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum aman}}{\text{Jumlah rumah tangga di Kabupaten Belitung}} \times 100 \%$$

- Persentase Ruang Terbuka Hijau berdasarkan persentase yang ada di RTRW;
- RLH Korban Bencana yaitu teranggarkannya program terkait dengan RLH korban bencana;
- RLH Korban Relokasi Program Pemerintah yaitu rumah layak huni yang dibangun.

Sasaran Meningkatkan Infrastruktur Permukiman didukung dengan pelaksanaan 3 (dua) program yaitu program perumahan dan kawasan permukiman kumuh, program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) serta program pengembangan perumahan.

Untuk sasaran strategis meningkatnya infrastruktur permukiman merupakan sasaran strategis tahun pertama untuk Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung periode 2024-2026.

Tabel 3.22.: Target, Realisasi dan Capaian Program untuk Sasaran Pemenuhan PSU Permukiman

No.	Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Capaian Kinerja (%)	Notifikasi
1	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Penanganan dan pencegahan permukiman kumuh diluar kawasan kumuh	99,80 %	99,80 %	100,00	tercapai
2	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase PSU yang dikelola	66,02 %	48,42 %	73,34	belum tercapai
3	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang Mendapat Rumah Layak Huni	100,00 %	0,00 %	0,00	belum tercapai

Sumber: DPUPR Kab. Belitung, 2025

Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh mencapai tingkat capaian kinerja 100% sehingga target yang direncanakan sudah memenuhi target. Kegiatan yang mendukung program ini adalah perbaikan rumah tidak layak huni, dimana untuk tahun 2024 sebanyak 8 (delapan) unit rumah rumah tidak layak huni yang diperbaiki.

Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) mencapai tingkat capaian kinerja sebesar 73,34% yaitu dari target sebesar 66,02% yang terealisasi sebesar 48,42%, penyebab tidak terealisasinya target kinerja program adalah jalan lingkungan serta prasarana, sarana dan utilitas umum yang dilaksanakan tidak sesuai dengan yang direncanakan didalam Rencana Strategis. Untuk prasarana, sarana dan utilitas umum, kendala yang dihadapi adalah masih banyaknya pihak dari Developer perumahan yang belum menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas perumahan sehingga berpengaruh ke capaian program.

Program Pengembangan Perumahan merupakan program untuk mendukung sistem pelayanan minimal (SPM), untuk capaiannya sebesar 0,00% dikarenakan untuk program ini merupakan untuk program penanggulangan bencana sementara di Kabupaten Belitung sepanjang tahun 2024 tidak terjadi bencana.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam tahun 2024 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut diatas antara lain yaitu :

- 1) Mengoptimalkan kegiatan-kegiatan yang sudah dianggarkan pada tahun 2024.
- 2) Mengoptimalkan sumber daya baik itu sumber daya manusia maupun sarana prasarana untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- 3) Melakukan evaluasi setiap triwulan terkait dengan pelaksanaan kegiatan serta pencapaian kinerja

Capaian kinerja yang mencapai target disebabkan antara lain oleh:

- 1) Adanya pengalokasian anggaran untuk mendukung program-program pemerintah seperti program stunting dan pengentasan kemiskinan.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja tahun 2024 atau untuk memperbaiki kinerja di tahun 2025, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung akan melakukan :

- 1) Mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk pencapaian kinerja.

- 2) Melakukan evaluasi dan monitoring setiap triwulan untuk mengetahui pencapaian dari indikator kinerja yang sudah ditentukan.
- 3) Melakukan koordinasi dengan pihak lain sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Gambar 3.9.: Kegiatan untuk Mendukung Sasaran Strategis Pemenuhan PSU Permukiman



Table 3.23.: Pembangunan PSU di Kabupaten Belitung Tahun 2024

No	Jenis Kegiatan	Realisasi			
		Panjang	Satuan	Lebar Rata-rata	Satuan
1	Program Penyelenggaraan PSU Perumahan				
	- Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				
	- Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian				
1	- Pemeliharaan Jalan Setapak di Kecamatan Tanjungpandan (Paket 1) (Sisa Dana Insentif Fiskal Tahun 2023)	258,0	M	1,2 s.d 2,5	M
	1 a. Gang Rambutan, Kampong damai	118,0	M		M
	2 b. RT04/RT05 Perbatasan (Jalan Kik Bujang)	140,0	M		M
2	- Pemeliharaan Jalan Setapak di Kecamatan Tanjungpandan (Paket 2) (Sisa Dana Insentif Fiskal Tahun 2023)	249,0	M	1,0 s.d 2,0	M
	3 a. Gang Depan Kantor Pos, Jl. Merdeka	200,0	M		M
	4 b. Gang Kelinci, Kel. Kota	49,0	M		M
3	- Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Setapak di Kelurahan Parit	339,0	M	1,2 s.d 2,2	M
	5 a. Jalan Veteran Lingkungan RT 03 (Dekat Nafisa)	123,0	M		M
	6 b. Jalan Depan Toko Mas Hero	216,0	M		M
4	- Peningkatan Jalan Lingkungan di Kecamatan Tanjungpandan (Dana Insentif Fiskal Tahun 2024)	419,0	M	3,0	M
	7 a. Jalan Muallim Dalam	419,0	M		M
5	- Pemeliharaan Jalan Lingkungan Paket 1 (Dana Insentif Fiskal Tahun 2024)	890,0	M	3,0	M
	8 a. Jalan Peternakan	310,0	M		M
	9 b. Jalan Lingkar Dusun	580,0	M		M
6	- Peningkatan Jalan Lingkungan Handayani P2IP/Haryani (Lanjutan)	100,0	M	4,0	M
	10 a. Jalan Handayani P2IP/Haryani	100,0	M		M
7	- Peningkatan Jalan Lingkungan di Kecamatan Tanjungpandan	1.725,8	M	3,0 s.d 4,0	M
	11 a. Jalan Kenanga	177,0	M		M
	12 b. Gang Duren	96,0	M		M
	13 c. Jalan Berlian	371,0	M		M
	14 d. Jalan Jerat Nangka	481,0	M		M
	15 e. Jalan Muallim Dalam	148,8	M		M
	16 f. Jalan Bina Insani	452,0	M		M
8	- Peningkatan jalan Lingkungan Kecamatan Sijuk	879,0	M	3,0 s.d 4,0	M
	17 a. Jalan Padat Karya	265,0	M		M
	18 b. Jalan Kik Janggau	292,0	M		M
	19 c. Jalan Aik Dulang (Pesantren Putra)	322,0	M		M
	Jumlah	4.859,8	M		
	Total Panjang Jalan Lingkungan	4.013,8	M		
	Total Panjang Jalan Setapak	846,0	M		

Sumber : Bidang Perkim Dinas PUPR Kab. Belitung, 2025

Pada Sasaran strategis terwujudnya konektivitas antar wilayah bidang perhubungan dengan indikator rasio konektivitas memiliki rumus: Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan) Dimana :

- IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten/kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut)
- IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)= jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten/kota tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut)

Keterangan:

IK1 (Angkutan Jalan)

- Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP
- Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu

IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan)

- Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasa perintis ditambah lintasan komersil
- Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu

Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan:

1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30)
2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50)
3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70)
4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100) Bobot Trayek atau Lintas: Sedangkan sasaran strategis dari meningkatnya sistem transportasi daerah dengan indikator Kinerja lalu lintas, memiliki formulasi dari Rata-Rata Volume kapasitas jalan/Kapasitas Jalan. Indikator Survey Kepuasan Masyarakat memiliki formulasi Jumlah dari Nilai rata rata tertimbang/ Nilai unsur pelayanan.

Berikut data konektivitas antar wilayah bidang perhubungan:

Tabel 3.24.: Data Trayek Penumpang Angkutan Jalan Kabupaten Belitung Tahun 2024

No	Dari	Trayek Ke	Jarak	Jumlah Trayek Kebutuhan	Ketersediaan
1	Tanjungpandan	Teluk Gembira	67	1	1
2	Tanjungpandan	Tanjung Rusa	55	1	-
3	Membalong	Tanjung Rusa	22	1	-
4	Selat Nasik	Petaling	17	1	-
5	Selat Nasik	Tanjung Nyato	10,5	1	-
6	Tanjungpandan	Tanjung Tinggi -via	37	1	1

		Tanjung Binga			
7	Tanjungpandan	Tanjung Kelayang	37	1	1
8	Tanjungpandan	Tanjung Tinggi –via Sijuk	37	1	1
9	Tanjungpandan	Air Batu	42	1	1
10	Tanjungpandan	Tanjung Ru	30	1	1
11	Tanjungpandan	Badau (Batu Mentas)	27	1	1
12	Tanjungpandan	Ibul	27	1	1
13	Dalam Kota Tanjungpandan 1		15	1	1
14	Dalam Kota Tanjungpandan 2		15	1	1
15	Tanjungpandan	Bandara H.AS. Hanandjoeddin	14	1	-
16	Bandara H.AS Hanandjoeddin	Tanjung Kelayang	35	1	1
17	Bandara H.AS. Hanandjoeddin	Tanjung Ru	43	1	-
Jumlah				17	11

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Belitung 2024

Perhitungan Indikator Kinerja Angkutan Jalan:

- Bobot Trayek atau lintas adalah dengan frekuensi tinggi (> 5 X dalam seminggu) sehingga bobot =1
- Jumlah trayek yang dilayani pada kabupaten/kota dikali bobot Trayek dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut
 $(11 \times 1) / 17 = 0,65$

Tabel 3.25.: Data Lintas Komersil dan Lintas Perintis Kabupaten Belitung Tahun 2024

No	Lintas Komersil	Kebutuhan	Tersedia	Persentase
1	Tanjung Ru-Nyato	1 Lintasan	1 Lintasan	100%
2	Tanjung Ru-Selat Nasik	1 Lintasan	1 Lintasan	100%
3	Tanjung Pakuk (Teluk Gembira) – Seliu	1 Lintasan	1 Lintasan	100%
4	Tanjung Kelayang – Lengkuas	1 Lintasan	0 Lintasan	0%
5	Tanjung Pakuk (Teluk Gembira) – Pulau Sumedang	1 Lintasan	0 Lintasan	0%
6	Tanjungpandan- Selat Nasik	1 Lintasan	1 Lintasan	100%
7	Tanjungpandan- Pulau Gersik	1 Lintasan	0 Lintasan	0%
8	Tanjung pandan- Pulau Kuil	1 Lintasan	0 Lintasan	0%
9	Tanjungpandan- Pulau Sumedang	1 Lintasan	0 Lintasan	0%
10	Tanjungpandan- Buntar	1 Lintasan	0 Lintasan	0%
TOTAL		10 Lintasan	4 Lintasan	

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Belitung 2024

- Bobot Trayek atau lintas adalah dengan frekuensi tinggi (> 5 X dalam seminggu) sehingga bobot =1
- Jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten/kota tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut)
 $(4 \times 1) / 10 = 0,40$

Rasio konektivitas Kabupaten/Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)

Untuk bobot angkutan jalan atau sungai, danau dan penyeberangan di Kabupaten Belitung adalah Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan

penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50) sehingga perhitungan rasio konektivitas adalah :

$$= ((11 \times 1/17) \times 50) + (4 \times 1/10) \times 50$$

$$= (0,65 \times 50) + (0,40 \times 50)$$

$$= 32,50 + 20,00$$

$$= 52,50$$

Nilai 52,50 ini menunjukkan bahwa tingkat konektivitas di Kabupaten Belitung berada pada kondisi kurang baik sehingga masih diperlukan penambahan terhadap lintas trayek.

Dukungan kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.26.: Rekapitulasi Data Kendaraan Lulus Uji Tahun 2024

No	Jenis Kendaraan Bermotor	Sub Jenis	Jumlah Kendaraan Lulus Ujian
1	M. Penumpang Umum	Sedan/ Non Sedan	0
2	Mobil Bus		81
3	Mobil Barang	Pick Up	405
		Box Pick Up	84
		Truck	313
		Box Truck	71
		Tangki	35
		B.Khusus	3
4	Kereta Tempelan		0
5	Kereta Gandengan		0
Total			992

Tabel 3.27.: Rekapitulasi Data Kendaraan Tidak Lulus Uji Tahun 2024

No	Jenis Kendaraan Bermotor	Sub Jenis	Jumlah Kendaraan Lulus Ujian
1	M. Penumpang Umum	Sedan/ Non Sedan	0
2	Mobil Bus		26
3	Mobil Barang	Pick Up	45
		Box Pick Up	26
		Truck	78
		Box Truck	39
		Tangki	14
		B.Khusus	2
4	Kereta Tempelan		0
5	Kereta Gandengan		0
Total			230

Keterangan:

Jumlah Kendaraan di Uji Tahun 2024 1.222 Unit
 Jumlah Kendaraan yang Lulus Uji Tahun 2024 992 Unit
 Jumlah Kendaraan yang Tidak Lulus Uji Tahun 2024 230 Unit

Tabel 3.28.: Data Fasilitas Perlengkapan dan Keselamatan Jalan Tahun 2024

No	Jenis Sarana Prasarana/ Faskes	Kebutuhan s/d		Capaian											
		2024		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
1	Rambu Lalu Lintas	2937	Unit	3847	Unit	1967	Unit	1967	Unit	2027	Unit	2067	Unit	2083	Unit
2	Trafic Light	39	Titik	7	Titik	27	Titik	33	Titik	33	Titik	33	Titik	33	Titik
3	Warning Light	91	Titik	15	Titik	21	Titik	79	Titik	81	Titik	82	Titik	84	Titik
4	Deliniator	2601	Unit	20	Unit	1946	Unit	1946	Unit	1946	Unit	1947	Unit	1947	Unit
5	Guard Rail	15	Titik	7	Titik	8	Titik	8	Titik	8	Titik	8	Titik	8	Titik
6	RPJ	200	Unit	120	Unit	132	Unit	132	Unit	138	Unit	138	Unit	138	Unit
7	Pita Penggaduh	36	Titik	18	Titik	23	Titik	23	Titik	23	Titik	23	Titik	23	Titik
8	Paku Marka	8	Titik	8	Titik	8	Titik	8	Titik	8	Titik	8	Titik	8	Titik
9	Cermin Tikungan	50	Titik	0	Titik	10	Titik	10	Titik	35	Titik	46	Titik	73	Titik
10	Marka Jalan	25	Titik	20	Titik	20	Titik	20	Titik	20	Titik	20	Titik	20	Titik
11	Zebra Cross	60	Titik	45	Titik	45	Titik	45	Titik	45	Titik	45	Titik	46	Titik
12	Papan Nama Jalan	300	Unit	116	Unit	170	Unit	170	Unit	206	Unit	206	Unit	206	Unit
13	RPA	11	trayek	9	trayek	10	trayek	11	trayek	11	trayek	11	trayek	11	trayek
14	Trayek	150	Unit	110	Unit	110	Unit	110	Unit	110	Unit	110	Unit	110	Unit
15	Bus, Teminal, Halte	35	Unit	24	Unit	24	Unit	24	Unit	24	Unit	24	Unit	24	Unit
16	Penerangan Jalan Umum	5,519	Unit	3,433	Unit	4,015	Unit	4,080	Unit	5,014	Unit	7,471	Unit	7,471	Unit

Dari total kebutuhan sampai tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 persentase yang tercapai untuk fasilitas perlengkapan dan keselamatan jalan adalah sebesar **73,45 %**.

Pengukuran Pencapaian Kinerja terwujudnya konektivitas antar wilayah bidang perhubungan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja selama tahun 2024 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Terwujudnya konektivitas antar wilayah bidang perhubungan yang dilaksanakan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung Tahun 2024 secara keseluruhan berjalan dengan baik, namun masih terdapat adanya kendala yang dijumpai dalam pelaksanaannya. Untuk itu, melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung mengupayakan langkah strategis untuk meningkatkan keberhasilan kinerja pada tahun berikutnya dengan melihat beberapa permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja, antara lain dengan melakukan beberapa strategi yaitu:

- ⌘ Pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi pegawai di Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan, termasuk pelatihan tentang keselamatan berlalu lintas, manajemen lalu lintas, dan pengelolaan sistem transportasi yang berkelanjutan;
- ⌘ Fokus pada peningkatan kualitas dan pemeliharaan infrastruktur transportasi, seperti perbaikan jalan dan perbaikan fasilitas umum;
- ⌘ Meningkatkan kerja sama dengan lembaga terkait, seperti kepolisian, Dinas Pekerjaan Umum, serta pihak swasta untuk mempercepat implementasi proyek dan kebijakan yang mendukung pengembangan sektor transportasi.

Tabel 3.29.: Realisasi Keuangan Program penunjang Sasaran Meningkatnya Infrastruktur Kewilayahan Tahun 2024

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	2.210.442.886	2.075.728.700	93,91%
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	5.118.737.350	4.973.542.490	97,16%
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.051.260.000	1.050.259.800	99,90%
4	Program Pengelolaan Dan	694.710.000	693.614.500	99,84%

Pengembangan Sistem Drainase				
5	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	0	0	0,00%
6	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	318.770.000	293.079.556	91,94%
7	Program Penyelenggaraan Jalan	31.029.143.598	27.886.493.473	89,87%
8	Program Pengembangan Perumahan	83.946.803	0	0,00%
9	Program Kawasan Permukiman	0	0	0,00%
10	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	608.817.000	605.084.000	99,39%
11	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	6.375.683.650	6.204.784.036	97,32%
12	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	14.236.573.550	14.023.642.642	98,50%
13	Program Pengelolaan Pelayaran	1.587.392.600	1.453.475.555	91,56%

Sehingga untuk sasaran Meningkatnya Infrastruktur Kewilayahan Tahun 2024 dengan realisasi anggaran sebesar 93,59% dan persentase rata-rata capaian program sasaran sebesar 87,22% maka terdapat efisiensi 6,41 %.

3.2.2 TUJUAN 2 : Meningkatnya kualitas sumber daya manusia

Capaian kinerja tujuan “Meningkatnya kualitas sumber daya manusia” diukur melalui pencapaian indikator Indeks Pembangunan Manusia. Capaian kinerja tujuan dengan rincian pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.30.: Capaian Kinerja Tujuan Meningkatnya kualitas sumber daya manusia

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPD	2024			Kategori	Target Akhir RPD 2026
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	73,38	74,26	74,94	100,94	SB	74,95

Dari tabel di atas terlihat bahwa kedua indikator kinerja tujuan melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2024. Capaian kinerja Indeks Pembangunan Manusia sebesar 100,94% dengan kategori SANGAT BERHASIL.

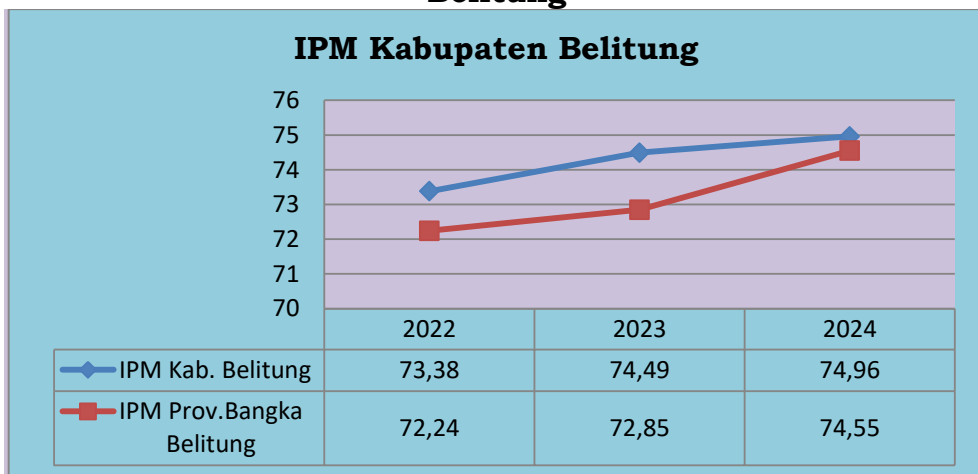
IPM merangkum tiga dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*). Dimensi umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Usia Harapan Hidup pada saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Dimensi pengetahuan diukur menggunakan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS menggambarkan rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. HLS menggambarkan

lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan/dijalani oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita riil disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

IPM merupakan indikator yang sangat berguna untuk melihat perkembangan capaian pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu tingkat kecepatan dan status pencapaian. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dapat digunakan untuk mengkaji perkembangan pembangunan manusia dalam suatu wilayah maupun perbandingan antar wilayah. IPM merupakan indikator yang sangat berguna untuk melihat perkembangan capaian pembangunan dalam jangka panjang.

Capaian Nilai IPM Kabupaten Belitung (Grafik 3.1) selama tiga tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang positif dan terus mengalami peningkatan mulai dari 73,38 pada tahun 2022 hingga mencapai 74,96 atau berada pada capaian “tinggi” ($70 < IPM < 80$; berdasarkan kriteria dari United Nations Development Programme (UNDP)) pada tahun 2023. Nilai capaian ini mengalami peningkatan sebesar 0,47 poin bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023 dengan nilai 74,49. Dibandingkan dengan level IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang pada tahun 2024 tercapai sebesar 74,55, nilai IPM Kabupaten Belitung tercapai lebih tinggi 0,41 poin. Adapun perkembangan IPM Kabupaten Belitung dari Tahun 2022 – 2024 disajikan sebagaimana grafik berikut:

Grafik 3.7.: Persentase Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Belitung



Sumber: Badan Pusat Statistik 2025

Bila dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, IPM Kabupaten Belitung tertinggi kedua setelah Kota Pangkalpinang yang memiliki nilai IPM 80,90 kategori Sangat Tinggi. Namun Nilai IPM Kabupaten Belitung berada dibawah nilai IPM Nasional yang pada tahun ini juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang semula 74,39 menjadi 75,02 dengan capaian pertumbuhan IPM 0,63 poin. Berikut nilai IPM Kabupaten Belitung dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam periode tahun 2022 - 2024:

Tabel 3.31.: Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Indonesia Tahun 2022 – 2024

URAIAN	TAHUN		
	2022	2023	2024
Belitung Timur	72,29	73,31	73,62
Bangka	72,95	74,49	74,66
Bangka Tengah	71,40	72,36	72,54
Bangka Barat	70,12	71,13	71,36
Bangka Selatan	67,95	69,67	70,01
Belitung	73,38	74,49	74,96
Pangkal Pinang	79,24	80,45	80,90
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	72,24	72,85	74,55
Indonesia	72,91	74,39	75,02

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2025

Peningkatan IPM Kabupaten Belitung ini tidak terlepas dari kinerja 3 (tiga) dimensi dasar yang merupakan komponen pembentuk IPM, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Dimensi kesehatan diukur melalui umur panjang dan hidup sehat dengan indikator Angka Harapan Hidup (AHH), dengan arti bahwa umur yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Dimensi pendidikan diukur dengan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang (dalam tahun), sedangkan rata-rata Lama Sekolah adalah rata-rata lamanya (dalam tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Sementara dimensi ekonomi diukur dengan standar hidup layak, yaitu pengeluaran per kapita yang disesuaikan dengan kondisi daerah.

Selama kurun waktu 2022 – 2024, peningkatan 3 (tiga) dimensi dasar IPM Kabupaten Belitung yang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Berikut ditampilkan perkembangan ketiga dimensi IPM Kabupaten Belitung periode 2022 – 2024.

Tabel 3.32.: Komponen Penyusun IPM Kabupaten Belitung Tahun 2022 – 2024

NO	URAIAN	TAHUN		
		2022	2023	2024
1	Umur Harapan Hidup	71,31	72,52	72,76
2	Harapan Lama Sekolah	11,89	11,90	12,09
3	Rata-rata Lama Sekolah	8,74	8,98	9,05
4	Pengeluaran per Kapita	14.045	14.365	14.449

Sumber : Badan Pusat Statistik 2025

Pada tahun 2024, capaian masing-masing dimensi dasar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Belitung mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Angka Harapan Hidup/Usia Harapan Hidup (AHH/UHH) sebesar 72,76, naik 0,24 tahun dari sebelumnya, Harapan Lama Sekolah sebesar 12,09 tahun naik sebesar 0,19 tahun, Rata-rata Lama Sekolah sebesar 9,05 tahun, naik 0,07 tahun dari tahun sebelumnya, Pengeluaran Per Kapita meningkat jika dibandingkan dengan

tahun sebelumnya sebesar Rp. 14.365.000,- per tahun, meningkat menjadi Rp 14.449.000,- per tahun.

Dalam RPD Kabupaten Belitung Tahun 2024 – 2026, upaya pencapaian Tujuan 2 “Meningkatnya kualitas sumber daya manusia”, telah ditetapkan 2 (dua) sasaran dengan 7 (tujuh) strategi sebagaimana terinci pada tabel berikut:

Tabel 3.33.: Sasaran dan Strategi Pencapaian Tujuan 2

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Tujuan 2 Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Sasaran 1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan mutu layanan kesehatan masyarakat Meningkatkan pola perilaku hidup bersih dan sehat Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk
	Sasaran 2 Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Meningkatkan akses pendidikan

SASARAN 4 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat” merupakan salah indikator kinerja utama RPD dengan indikator Angka Harapan Hidup dengan target “71,38”. Berikut realisasi dan capaian indikator sasaran Meningkatnya Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Belitung Tahun 2024.

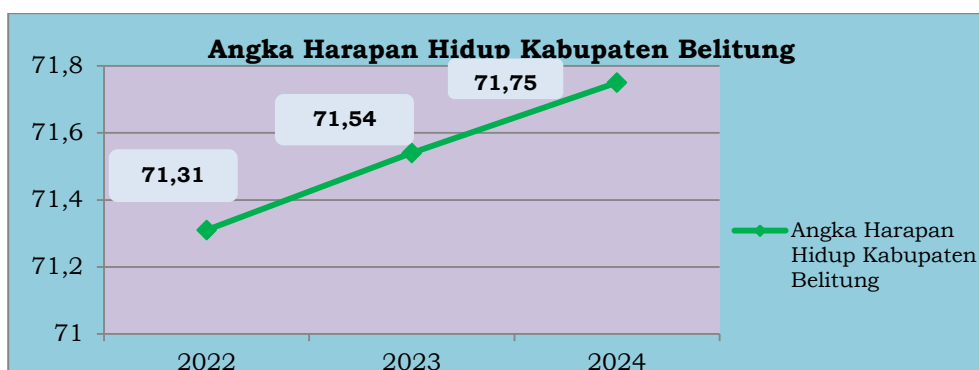
Tabel 3.34.: Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Derajat Kesehatan Masyarakat

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPD	2024			Kategori	Akhir RPD 2026 Target
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,31	71,38	71,75	100,52	SB	72,00

Indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kualitas derajat kesehatan masyarakat digunakan Angka Harapan Hidup (AHH), yang merupakan gambaran rata-rata umur yang mungkin dapat dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir hingga suatu tahun tertentu. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian indikator sasaran Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, yaitu Angka Harapan Hidup (AHH) menunjukkan keberhasilan dimana tahun 2024 dari target 71,38 tahun, terealisasi umur harapan hidup penduduk Belitung mencapai 71,75 tahun atau 100,52% dari target kinerja.

Trend Angka Harapan Hidup di Kabupaten Belitung cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dapat dilihat pada tabel perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Belitung Tahun 2022-2024.

Grafik 3.8.: Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Belitung Tahun 2022 – 2024



Sumber: Belitung Dalam Angka 2024

Angka Harapan Hidup (AHH) mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Tingginya pencapaian Angka Harapan Hidup (AHH) juga menjadi salah satu penanda penting keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan kesejahteraan rakyat terutama di sektor kesehatan.

Tabel 3.35.: Perkembangan Angka Harapan Hidup Wilayah Bangka Belitung Tahun 2022 – 2024

Wilayah Babel	TAHUN		
	2022	2023	2024
Prov. Kepulauan Bangka Belitung	70,98	71,23	71,49
Bangka	71,37	71,60	71,80
Belitung	71,31	71,54	71,75
Bangka Barat	70,25	70,43	70,59
Bangka Tengah	71,82	72,11	72,36
Bangka Selatan	68,68	68,98	69,24
Belitung Timur	72,33	72,59	72,85
Pangkal Pinang	73,68	73,96	74,24

Sumber: Website BPS Provinsi Kep.Bangka Belitung <https://babel.bps.go.id>

Peningkatan AHH menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat relatif membaik yang memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas hidup manusia. Peningkatan AHH juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain seperti ekonomi, budaya, dan pendidikan. Peran sektor kesehatan mempengaruhi masyarakat dalam menurunkan angka kesakitan, angka kematian, peningkatan gizi masyarakat dan akses serta mutu pelayanan kesehatan. Kepedulian tinggi pemerintah dan seluruh masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan.

Beberapa hal yang dapat mempengaruhi nilai usia harapan hidup di Kabupaten Belitung dipengaruhi oleh multifaktor, antara lain faktor kesehatan menjadi salah satu yang berperan, jangkauan atau akses pelayanan kesehatan khususnya Puskesmas telah menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Belitung. Setiap Kecamatan telah memiliki Puskesmas dengan jumlah Puskesmas 9 unit pada 5 Kecamatan, dengan jumlah puskesmas yang tersebar pada tiap Kecamatan maka masyarakat dapat mengakses fasilitas kesehatan dengan sangat mudah.

Akreditasi puskesmas adalah pengakuan terhadap Puskesmas yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah dinilai bahwa Puskesmas telah memenuhi

standar pelayanan Puskesmas yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan, tahun 2024 seluruh Puskesmas di Kabupaten Belitung telah dilakukan akreditasi dengan rincian tingkatan sebagai berikut:

Tabel 3.36.: Tingkatan Akreditasi Puskesmas Tahun 2024

No	Puskesmas	Tingkatan Akreditasi	Masa berlaku
1	UPT Puskesmas Selat Nasik	Pariipurna	16 November 2023 s.d 16 November 2028
2	UPT Puskesmas Badau	Pariipurna	21 November 2023 s.d 21 November 2028
3	UPT Puskesmas Tanjung Binga	Pariipurna	05 Desember 2023 s.d 05 Desember 2028
4	UPT Puskesmas Membalong	Pariipurna	06 Desember 2023 s.d 06 Desember 2028
5	UPT Puskesmas Simpang Rusa	Pariipurna	12 Desember 2023 s.d 12 Desember 2028
6	UPT Puskesmas Perawas	Pariipurna	14 Desember 2023 s.d 14 Desember 2028
7	UPT Puskesmas Sijuk	Pariipurna	15 Desember 2023 s.d 15 Desember 2028
8	UPT Puskesmas Air Saga	Pariipurna	20 Desember 2023 s.d 20 Desember 2028
9	UPT Puskesmas Tanjungpandan	Pariipurna	21 Desember 2023 s.d 21 Desember 2028

Peningkatan angka harapan hidup saat lahir kabupaten tentunya tidak lepas dari perhatian Pemerintah Kabupaten Belitung terhadap urusan kesehatan dengan berbagai program dan pelayanan serta penyuluhan kepada masyarakat, kondisi tersebut didukung dengan meningkatnya pemahaman masyarakat akan pengelolaan kesehatan yang baik.

Beberapa hal yang dapat mempengaruhi nilai usia harapan hidup di Kabupaten Belitung adalah :

- ❖ Optimalnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat

Menekan Angka Kesakitan (Morbiditas) yang terealisasi, diukur dengan Jumlah Kunjungan Sakit dibagi Jumlah Penduduk di Kali 100%. Target kinerja ini pada tahun 2024 sebesar 33.71 Nilai Angka Kesakitan (Morbiditas) yang terealisasi sebesar 26.98 tahun 2024 capaian 119,96 % dari target 2024 sebesar 33.71 ,dengan ringkasan sebagaimana disajikan pada tabel 3.4 berikut:

Nilai Angka Kesakitan (Morbiditas) yang terealisasi sampai dengan triwulan 4 Tahun 2024 sebesar 26,98 % diperoleh Jumlah Kunjungan Sakit dibagi Jumlah Penduduk di Kali 100% yaitu (51,247 / 189,945 x 100% = 26,98%).

Tabel 3.37.: Penyakit terbanyak tahun 2024

No	Jenis Penyakit	Jumlah kunjungan
1	I10-Essential (primary) hypertension	5,187
2	J00-Acute nasopharyngitis [common cold]	4,396
3	K30-Dyspepsia	4,050
4	J06.9-Acute upper respiratory infection, unspecified	3,261
5	M79.1-Myalgia	2,440
6	J06-Acute upper respiratory infections of multiple and unspecified sites	2,321

7	I11-Hypertensive heart disease	1,973
8	E11-Non-insulin-dependent diabetes mellitus	1,892
9	A09-Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin	1,723
10	K04.1-Necrosis of pulp	1,406

Tabel 3.38.: Hasil kinerja upaya kesehatan masyarakat untuk 12 jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Kabupaten Belitung Tahun 2024

NO	KINERJA BIDANG KESEHATAN	Realisasi	Persentase(%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2007	83,24
2	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	2314	95,98
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	2273	101,43
4	Pelayanan Kesehatan Balita	9504	92,5
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	26.875	96,35
6	Pelaynan Kesehatan pada Usia Produktif	105.536	82,63
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	18.419	94,5
8	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	40.396	75,9
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	3.025	106,67
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	364	112,69
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan terduga TB	4.858	143,56
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	3.214	98,37

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Tahun 2024

- ❖ Adanya Inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat

**Tabel 3.39
Inovasi di lingkungan Dinas Kesehatan 2024**

NO	INOVASI	TUJUAN	MANFAAT	SASARAN	BENTUK KEGIATAN	KETERANGAN
1	Dinas Kesehatan					
	a. AMBONG	Pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada balita kurus dan ibu hamil KEK berupa pemberian makanan tambahan dan pelayanan asistensi berupa konsultasi dan pendampingan dari petugas kesehatan kepada keluarga sasaran	Menurunkan angka Stunting dan Wasting pada Balita, dan Ibu hamil KEK dan Balita Wasting mendapat PMT	Balita dan bumil KEK	1. Orientasi kader gizi dan petugas gizi 2. Pemberian Susu bagi ibu hamil yang kurang mampu 3. Pemberian PMT Lokal yang dilakukan di masing-masing puskesmas	Inovasi ini masih berjalan

	b. PELANDUK	Memberikan kemudahan bagi masyarakat Kabupaten Belitung untuk mendapatkan pelayanan gawat darurat dan perawatan kesehatan masyarakat terpusat dan terintegrasi yang bemutu, terjamin kepastian dan profesional.	Memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan gawat darurat maupun pelayanan perawatan kesehatan masyarakat	Masyarakat yang terkendala mengakses pelayanan kesehatan	Pelanduk mendatangi masyarakat di daerah terpencil atau daerah yang sulit dijangkau oleh mobil dengan menggunakan kendaraan bermotor	Masih berjalan sampai saat ini terutama untuk kegiatan PERKESMAS di tingkat Puskesmas
	c. SEHATI	1. Mengintegrasikan semua kegiatan yang dilakukan yang terkait dengan bidang kesehatan dan pelayanan publik 2. Memberikan kemudahan bagi masyarakat Kabupaten Belitung untuk mendapatkan pelayanan gawat darurat dan perawatan kesehatan masyarakat terpusat dan terintegrasi yang bemutu, terjamin kepastian dan profesional.	Memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk mengurus rujukan terpusat pada Loker SEHATI di RSUD dr. H. Marsidi Judono	Masyarakat yang di rujuk ke Rumah Sakit Luar Daerah Kabupaten Belitung	Biaya transportasi pasien dan pendamping (pergi dan pulang), biaya ambulans pasien duduk atau pasien berbaring, biaya pemulasaran dan pemulangan jenazah, uang pendampingan rujukan	Masih berjalan sampai saat ini
		3. Memberikan pelayanan rujukan di Loker SEHATI selama 24 jam berupa (informasi tentang rujukan pasien, tiket pasien dan pendamping, transportasi dan akomodasi pasien, kepastian pelayanan kepulangan baik pasien dalam keadaan hidup/meninggal)				
2	Puskesmas Tanjungpandan					
	a. Urisan PENGUKURAN DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN (Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif dan Usia Lanjut)	Untuk meningkatkan capaian atau kinerja, sehingga pelaksanaan kegiatan atau program dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta mencapai target yang telah ditetapkan.	Terjaminnya kualitas kesehatan masyarakat	Usia produktif (15-59 tahun) usia lanjut (60 ke atas)	1. Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar 2. Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar 3. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar 4. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Inovasi ini masih dijalankan sampai dengan saat ini, dikarenakan target sasaran belum tercapai 100 persen.

	a. BEDUL ANG (Besame Posyandu Lancar Nimbang)	Terpantaunya pertumbuhan semua balita dan ibu hamil di posyandu dan masalah-masalah gizi bayi dan balita serta ibu hamil diwilayah kerja UPT Puskesmas Tanjungpandan.	Masalah gizi pada bayi, balita dan ibu hamil dapat segera diketahui secara dini dan dapat dilakukan upaya-upaya untuk mencegah permasalahan tersebut.	Semua bayi dan balita yang ada di wilayah UPT Puskesmas Tanjungpandan	Pelayanan pemantauan status gizi bayi dan balita di posyandu melakukan penimbangan secara langsung bayi dan balita, pemberian konsultasi pada bayi, balita yang mengalami masalah gizi.	Inovasi ini masih dijalankan sampai dengan saat ini, dikarenakan target sasaran belum tercapai 100 persen.
	b. KOPIAS IK (Skrining Kelompok Beresiko Bila Ketemu Kasus Segera Terapi Jaga Privasi ODHIV Kawal Pengobatan)	menjaring kelompok beresiko dan segera di tindaklanjuti	Skrining Kelompok Beresiko	Ibu Hamil, LSL, Waria, WPS, Pasien TB, Penasun	Skrining, Pengobatan, Pemantauan	Inovasi terus berjalan sampai saat ini
	c. PELANGI (Pasien Lama di kunjungi Kembali)	Untuk Menemukan Pasien Baru	Dengan kegiatan pelangi untuk menemukan pasien baru yang mempunyai riwayat kontak dengan pasien TB yang sudah sembuh	Pasien TB yang sudah sembuh 1, 2, 3 Tahun yang lalu dan keluarga yang kontak dengan pasien TB	Kunjungan Rumah	Inovasi terus berjalan sampai saat ini
3	Puskesmas Air Saga					
	a. Marisahak (Mari Periksa Dahak)	Tujuan Umum: Menurunkan angka kesakitan dan angka kematian dengan cara memutuskan mata rantai penularan sehingga penyakit TB tidak lagi merupakan masalah kesehatan masyarakat Tujuan khusus: 1. Peningkatan penemuan kasus TB secara aktif dan / massif berbasis keluarga dan masyarakat 2. Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang TB 3. Peningkatan kesadaran dan kewaspadaan tentang penularan TB di lingkungan masyarakat	Target SPM semua terduga TB di periksa sesuai standar telah mencapai target Kabupaten	Masyarakat	1. Melakukan kegiatan lintas program dan integrasi program 2. Melakukan kegiatan lintas sektor diwilayah kerja puskesmas 3. Melakukan koordinasi dengan Kepala Desa / Kelurahan 4. Melakukan kegiatan pengambilan sampel dahak pada sasaran di Puskesmas, Pustu, posyandu, RT, tempat pengajian, Hotel, cafe dan panti pijat, sekolah dan instansi pemerintahan dan swasta, dilaksanakan dari bula Januari sampai Desember	inovasi terus berjalan sampai saat ini

					2024	
	b. Ketan bu Jian (Periksa Kesehatan Ibu-ibu Pengajian)	Mendeteksi sedini mungkin penyakit tidak menular pada ibu ibu pengajian		Ibu ibu pengajian usia 15 tahun keatas	Pemeriksaan tinggi badan, lingkaran perut, tekanan darah, pemeriksaan gula darah, kolesterol, asam urat.	Inovasi terus berjalan sampai saat ini
	c. Lampu Hias (Melampun Hygienis di Puskesmas Air Saga)	Menanamkan pola kebiasaan sarapan pagi sesuai prinsip hygiene dan sanitasi kepada masyarakat yang datang berkunjung ke Puskesmas Air Saga	Memberikan edukasi mengenai pentingnya sarapan bersih dan sehat kepada masyarakat dan memenuhi kebutuhan gizi pasien yang datang ke puskesmas sebelum memulai aktifitas	Pasien rawat jalan yang berkunjung ke Puskesmas Air Saga	Menyajikan sarapan berupa snack dengan menu sehat yang berbeda setiap harinya sesuai siklus, diletakkan di dekat meja pendaftaran puskesmas. Sarapan disajikan setiap pagi dihari kerja puskesmas	Inovasi terus berjalan sampai saat ini
	d. Yuni Shara (Youtube Edukasi Puskesmas Air Saga)	Menyebarkan informasi seputar kesehatan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi	Tersebar nya informasi kepada seluruh lapisan masyarakat yang mengakses Youtube	Semua lapisan masyarakat, tanpa batasan usia, jenis kelamin dan wilayah, yang mengakses Youtube, khususnya Channel "Puskesmas Air Saga Belitung"	Edukasi seputar kesehatan dalam bentuk Video dan akan dikembangkan dengan membuat podcast yang membahas isu kesehatan dan video hasil editan diunggah ke channel youtube milik UPT Puskesmas Air Saga dengan nama channel "Puskesmas Air Saga Belitung"	Inovasi sudah berjalan meskipun belum optimal, dan untuk podcast sudah mulai membuat rancangan konsep untuk skenario alur cerita, untuk peralatan masih menggunakan peralatan pribadi, dari perangkat smartphone, tripod, microphone wireless dan pendukungnya yang dibutuhkan.
	e. Pindang Patin (Pemeriksaan dan Edukasi Gigi pada Calon Pengantin)	Meningkatkan kesehatan gigi dan mulut bagi calon ibu hamil sedini mungkin, yaitu pada masa sebelum pernikahan, melalui edukasi catin	Memberikan edukasi kesehatan gigi dan mulut, meningkatkan kesadaran pentingnya kesehatan gigi dan mulut bagi catin sebagai salah satu persiapan untuk kehamilan	Pasangan catin yang datang ke UPT Puskesmas Air Saga	Pemeriksaan dan edukasi kesehatan gigi dan mulut bagi calon pengantin.	Inovasi terus berjalan sampai saat ini
	f. Pasar Berehun (Puskesmas Air Saga Bersama Pantau SPM Tahunan)	Monitoring evaluasi yang berkelanjutan untuk capaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) 100% di UPT Puskesmas Air Saga	Agar capaian SPM di UPT Puskesmas Air Saga dapat di pantau, di monitoring dan dievaluasi secara bersama-sama baik oleh pengelola program, Kepala Puskesmas, Dinas Kesehatan dan Lintas Sektor)	Masyarakat, Pengelola Program, Kepala Puskesmas, Dinas Kesehatan dan Lintas Sektor	Pengumpulan Data, Monitoring dan Evaluasi SPM	Inovasi terus berjalan sampai saat ini

<p>g. KEREMUNTING (Kegiatan Rembuk Terpadu Menurunkan Stunting) di UPT Puskesmas Air Saga</p>	<p>Meningkatkan pelayanan dan penguatan program penanggulangan stunting sehingga bermanfaat dan berdampak langsung kepada masyarakat luas dan masyarakat yang memiliki anak stunting dan membantu serta mendukung pemerintah dalam melaksanakan intervensi spesifik penurunan stunting dalam bidang kesehatan dan mencegah terjadinya peningkatan kasus stunting di wilayah UPT Puskesmas Air Saga</p>	<p>Remaja putri, ibu hamil, ibu nifas, dan balita di wilayah kerja UPT Puskesmas Air Saga</p>	<p>Edukasi dan Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) Remaja Putri, Gerakan Aksi Bergizi (Rematri Fokus Minum Tablet Tambah Darah bersama), Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi Ibu Hamil KEK dan Balita Kurus, Home Visit (Kunjungan Rumah) Ibu Hamil KEK (Kekurangan Energi Kronis) dan Bayi dan Balita dengan Masalah Gizi (Weight Faltering), wasting, underweight, serta beresiko stunting/stunting, Pemantauan Pertumbuhan Balita di Posyandu dan Poli Gizi Puskesmas, Gerakan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Balita, Stimulasi Deteksi Intervensi dan Tumbuh Kembang (SDIDTK), Pemberian Vitamin A Dosis Tinggi secara Rutin bagi Balita, Pemberian Vitamin A Dosis Tinggi untuk Ibu Nifas, Pelatihan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbasis pangan lokal bagi kader kesehatan wilayah kerja UPT Puskesmas Air Saga, Refreshing Kader Kesehatan wilayah kerja UPT Puskesmas Air Saga, Pemicuan 5 Pilar STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat), Kelas Ibu Hamil dan Ibu Balita, Poli Stunting (Pelayanan UKP Terpadu UPT</p>	<p>Inovasi ini melibatkan lintas program dan lintas sektor terkait, seperti : Promosi Kesehatan, Program Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Gizi, Dokter Puskesmas, Imunisasi, Sekolah, serta Desa/Kelurahan. 85% kegiatan sudah berlangsung di tahun kemarin dan akan dimaksimalkan di tahun ini</p>	<p>Inovasi sudah berjalan meskipun belum optimal</p>
---	--	---	--	--	--

				Puskesmas Air Saga)		
4	Puskesmas Perawas					
	A. Silansing (Sistem Pelayanan Vaksinasi Keliling)	Meningkatkan akses layanan vaksinasi kepada masyarakat yang mengalami kesulitan menjangkau vaksinasi di fasilitas kesehatan atau pos pelayanan	Meningkatkan cakupan vaksinasi	Masyarakat yang terkendala mengakses layanan vaksinasi di faskes dan pos pelayanan	Bersama kader kesehatan Melakukan kunjungan rumah dan memberikan vaksinasi terhadap sasaran yang terkendala datang ke faskes atau pos pelayanan	Masih berjalan terutama untuk vaksinasi rutin balita
	B. Segar Manis (Sehat Bugar Bersama Program Penyakit Kronis)	Tersedianya wadah kepada penderita penyakit kronis hipertensi dan DM dalam memperoleh informasi dalam upaya menjaga kesehatannya sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup para penderita penyakit kronis	Meningkatkan pengetahuan peserta Prolanis tentang penyakit kronis dan meningkatkan kekeluargaan peserta Prolanis sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan dan menekan penyakit tidak menular	Peserta BPJS memiliki penyakit kronis (Diabetes Melitus tipe II dan Hipertensi)	Penyuluhan dan rekreasi, waktu 1x/bulan menyesuaikan, tempat menyesuaikan, anggaran BPJS	Masih berjalan rutin
	C. Mukat (Melakukan Investigasi Kontak TB)	Meningkatkan penemuan kasus dan mencegah penularan TBC di masyarakat	Meningkatkan capaian pelayanan SPM	Kontak penderita TBC dan kelompok beresiko	Mengumpulkan data kontak yang pernah berhubungan terhadap penderita TB kemudian melakukan screening TB terhadap kontak tersebut. dengan melibatkan kader kesehatan atau pos kelompok kesehatan kerja. Kegiatannya bisa menyesuaikan, bisa dilakukan di faskes atau menjemput bola	Masih berjalan rutin
5	Puskesmas Badau					
	a. Jerami (Jelajah Rumah Terintegrasi)	Meningkatkan Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Terjadi Peningkatan IKS	Semua Keluarga di Desa Ibul	Melakukan intervensi lanjut sesuai masalah kesehatan masing masing keluarga	Masih Berlanjut
	c. Siskamling MRT (Skrining Kesehatan Masyarakat Keliling Masjid dan RT)	Meningkatkan cakupan pemeriksaan kesehatan masyarakat usia produktif dan lansia	Terlaksananya skrining kesehatan	Masyarakat usia produktif dan lansia	Pemeriksaan kesehatan/skrining ke masjid dan RT secara berkala	Masih Berlanjut
	h. Dara Keriting (Dapur Keluarga Untuk Kelola Stunting)	Menurunkan angka Stunting	Peningkatan pengetahuan keluarga dalam mengelola menu keluarga untuk penanganan Stunting	Ibu Rumah Tangga (khususnya keluarga stunting dan Ibu Hamil)	Pelatihan dan demo mengelola makanan keluarga untuk penanganan dan pencegahan stunting	Masih Berlanjut

	i. Sabu Saja (Satu Bulan , Satu Jamban)	Meningkatkan angka akses jamban sehat	Tersedianya akses jamban sehat warga	Keluarga yang belum memiliki akses jamban sehat	Melakukan pembangunan jamban setiap bulan melalui gotong royong, kerjasama dengan desa dan CSR	Masih Berlanjut
	m. Penjaga Di Hati (Penjaringan dan Pengendalian Penyakit Diabetes dan Hipertensi)	terjaringnya dan Mengendalikan penyakit Diabetes dan Hipertensi	Mengurangi angka kesakitan dan komplikasi penyakit	Penderita Hipertensi dan Diabetes	Pemeriksaan rutin kesehatan, cek darah dan konseling obat, gizi penderita HT DM	Masih Berlanjut
6	Puskesmas Sijuk					
	a. Lumpia Sijuk	Pemberian Sertifikat kepada balita yang telah lulus penimbangan sampai usia 5 tahun	Meningkatkan minat orang tua balita untuk mengunjungi posyandu setiap bulan	Balita	Pemberian sertifikat kepada balita yang telah lulus posyandu, dilaksanakan di posyandu	Berjalan dengan bekerjasama dengan desa
	b. Markisa Sijuk	Untuk mengurangi sampah di wilayah kerja sijuk	Membersihkan lingkungan	Wilayah kerja sijuk	Gotong royong dalam membersihkan sampah	Berjalan
	c. Gorong Batik	Pencegahan penyakit DBD	Mengurangi kejadian kesakitan DBD di masyarakat	Masyarakat	Gotong royong dalam pemberantasan jentik dengan melakukan PSN 3M Plus	Berjalan, bekerjasama dengan lintas sektor
	d. Masdarini	Menerapkan kebiasaan ber PHBS dirumah tangga	terbentuknya kebiasaan masyarakat dalam melaksanakan PHBS dikehidupan sehari-hari	Masyarakat di wilayah kerja	kunjungan rumah dan pembinaan PHBS	Berjalan
	e. Penyuk Baja	Penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan di tempat kerja	Skrining kesehatan pada pekerja	Karyawan/ pekerja	Penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan (tensi, DM, dll)	Berjalan kerjasama pengelola PTM dan kesjaor
	f. Bersahabat	Berobat sebelum batuk hebat (mengurangi risiko TBC)	Menghindari terjadinya penyakit yang lebih parah dikarenakan batuk	Masyarakat yang berobat	Skrining pada pasien yang batuk	Berjalan
	g. Doger Pedes	Adanya kegiatan home visit bertujuan sebagai upaya kesehatan masyarakat secara holistik mencakup promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan	Meningkatkan kemandirian dan pengetahuan masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan, meningkatkan hubungan tenaga medis dan pasien, dan sebagai kegiatan promosi kesehatan yang sebaiknya dilakukan secara rutin	Masyarakat di wilayah kerja	Kunjungan rumah meliputi pemeriksaan kesehatan dan promosi kesehatan	Berjalan

	h. Ngenjugak	Mendeteksi dini penyakit tidak menular, memberikan pelayanan kesehatan penderita hipertensi dan DM sesuai standar, Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang faktor risiko PTM	Mengurangi risiko PTM	Masyarakat di wilayah kerja	Skrining dan kunjungan rumah, melakukan deteksi dini PTM	Berjalan
	i. Batu Bedil	Bank Darah Untuk Bersiap Dulu Menuju Bersalin	tersedianya calon pendonor darah bagi ibu hamil yang belum memiliki calon pendonor darah, khususnya untuk bumil yang memiliki resiko tinggi	Masyarakat di wilayah kerja yang sudah terbiasa dan bersedia menjadi calon pendonor darah	Membentuk sebuah grup yang terdiri dari calon2 pendonor darah yang sewaktu waktu bumil memerlukan darahnya, calon tersebut siap dan bersedia	Berjalan
7	Puskesmas Tanjung Binga					
	Healthy Traveling by SIMPKI (Wisata Sehat oleh Keluarga Simpor Laki)	Menjalin kerja sama lintas sektor dengan penggiat wisata berupa pembinaan protokol kesehatan khususnya selama pandemi, pembinaan IRTP, pembinaan jasa catering, pembinaan homestay, penginapan/ hotel dan P3K	Melaksanakan pelayanan kepada objek dan pelaku wisata yang berada diwilayah UPT Puskesmas Tanjung Binga.	Pelaku dan objek wisata	Pemeriksaan Tekanan darah, Berat badan, tinggi badan, lingkak pinggang, peemriksaan kolesterol, gula darah, asam urat, iva test	berjalan
	Plesir Simpki SEHATI (Patroli Ambulans Air SIMPKI SEHATI)	memberikan pertolongan cepat pada kondisi sakit/ kecelakaan berupa patroli ambulans air pada hari Sabtu dan Minggu	Tujuan dari Kegiatan PLESIR SIMPKI SEHATI adalah meningkatkan pelayanan Kesehatan khususnya di bidang kepariwisataan di kawasan perairan.	Yang menjadi sasaran dalam kegiatan PLESIR SIMPKI SEHATI adalah wisatawan dan penggiat wisata di Pantai Tanjung Kelayang dan pulau-pulau disekitarnya.	Tim PLESIR SIMPKI SEHATI berkeliling di seputar pantai dan pulau sekitar hingga pos Kesehatan di Pulau Lengkuas.Tim melakukan pertolongan pertama pada kegawatdaruratan. Berkoordinasi dengan Tim UGD UPT Puskesmas Tanjung Binga untuk menindaklanjuti kejadian yang harus dirujuk.	berjalan
	Pelayanan Akupresur dan Pijat Relaksasi	Untuk Memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Akupresur pada Pasien	memberikan pengobatan dengan akupresur dan pijat relaksasi untuk pengobatan tradisional	pasien yang dirujuk oleh dokter untuk di berikan layanan ini	memberikan pelayanan akupressur dan pijak relaksasi kepada seluruh pasien yang dirujuk oleh dokter	

	Kerapu Asam Garam (Kreasi ramuan jamu dan asuhan mandiri TOGA Masyarakat)	Untuk Memberikan Hasil Olahan TOGA yang Berupa Ramuan Jamu pada Pasien	Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memelihara kesehatannya sendiri melalui pelayanan kesehatan tradisional asuhan mandiri TOGA dan Akupresur.	1. Ramuan seleraja disajikan kepada 20 pasien antrian pertama dan tamu yang berkunjung ke UPT Puskesmas Tanjung Binga pada kegiatan tertentu. 2. Sasaran pelayanan akupresur yaitu pasien yang memiliki gejala dan telah disetujui dokter untuk dilakukan akupresur (3-5 Pasien Per Hari) 3. Sasaran penyehat tradisional yang didata berjumlah 14 penyehat tradisional yang terdaftar pada laporan UPT Puskesmas Tanjung Binga. 4. Sasaran asuhan mandiri yaitu minimal ada 1 kelompok asuhan mandiri di setiap desa dan setiap kegiatan program lain bisa diisi dengan penyuluhan tentang toga dan akupresur	Menyajikan Ramuan Seleraja kepada tamu yang berkunjung ke Puskesmas Tanjung Binga. - Mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai manfaat dan cara membuat Ramuan Seleraja.	berjalan
	Galeri SIMPKI	Menjadi galeri promosi industri rumah tangga pangan, industri kreatif, ramuan tradisional dan jamu binaan Puskesmas	memberikan pembinaan kepada pelaku UMKM dan mempromosikan hasil karya UMKM binaan	seluruh pengunjung	menjual hasil UMKM binaan	berjalan
	TANJAK Si SIMPKI (Tanya Jawab Kesehatan Streaming bersama Simpor Laki)	Sebagai inovasi penyuluhan di saat pandemi dengan memberikan Informasi Kesehatan dalam jaringan Kepada Masyarakat melalui sosial media	kegiatan inovasi ini adalah sebagai inovasi penyuluhan disaat pandemic dengan memberikan informasi kesehatan dengan media sosial kepada masyarakat.		1. Petugas membuat jadwal dan tema yang akan dijadikan topik 2. Petugas berkoordinasi dengan lintas program dan lintas sektor 3. Petugas menyiapkan lokasi dan alat untuk melakukan streaming 4. Petugas dan narasumber menyampaikan informasi (materi penyuluhan) melalui facebook 5. Petugas membuka sesi tanya-jawab	berjalan

					dengan audience yang menonton melalui kolom komentar 6. Petugas menutup kegiatan streaming	
	Cempedak Masak (Cek Penyakit Tidak Menular di Hari Bemasak)	Meningkatkan Cakupan Skrining Kesehatan Usia (15-59)	Terlaksananya pencegahan dan pengendalian faktor resiko Penyakit Tidak Menular berbasis peran serta masyarakat secara terpadu, rutin dan periodik	Sasaran dari kegiatan CEMPEDAK MASAK adalah masyarakat yang berusia 15-59 tahun, yang memiliki atau tidak memiliki faktor resiko PTM di lokasi pesta/ kenduri	Membentuk tim dan koordinasi kegiatan CEMPEDAK MASAK Bersama Ketua Pokja UKM, lintas program dan lintas sektor berkoordinasi dalam penyusunan jadwal dan tempat pelaksanaan Mensosialisasi kegiatan CEMPEDAK MASAK. Mensosialisasikan jadwal dan tempat pelaksanaan kepada Pihak Desa dan Kader Kesehatan Menginformasikan dan izin dengan tuan rumah pesta/kenduri Bersurat dan tatap muka kepada Pihak Tuan rumah yang akan diadakan pelaksanaan kegiatan CEMPEDAK MASAK Pemeriksaan Kesehatan Menimbang berat badan, mengukur tinggi badan, mengukur lingkar perut, mengukur tekanan darah. Pemeriksaan Laboratorium Melakukan Pemeriksaan Laboratorium Sederhana berupa, pemeriksaan Gula Darah dan Kolesterol Konseling Kesehatan Melakukan konseling kesehatan sesuai dengan masalah Kesehatan Rujukan Kegiatan rujukan ke UPT Puskesmas Tanjung Binga dengan pemanfaatan sumber daya tersedia termasuk respon cepat	berjalan

					sederhana dalam penangan prarujukan	
	Peyek Ikan (Penyuluhan Edukasi dan Informasi di Rawat Jalan)	memberikan informasi dan edukasi untuk pasien rawat jalan	meningkatkan pengetahuan masyarakat	seluruh pasien yang berkunjung		berjalan
	Mutik Sahang (Mutik Saran dan Harapan Pengunjung)	mengumpulkan saran dan harapan dari pasien maupun pengunjung yang datang ke Puskesmas Tanjung Binga	meningkatkan pelayanan puskesmas	seluruh pasien yang berobat	memberikan kertas untuk menuliskan saran dan harapan kepada pasien yang berkunjung	berjalan
	Mempelam (Menu GERMAS untuk Pasien Melampun)	Untuk Mendukung Sekaligus Mempromosikan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat yang memeriksakan diri ke Puskesmas.	Sasaran dari kegiatan Mempelam adalah 20 Pasien antrian pertama pada Pelayanan Rawat Jalan di UPT Puskesmas Tanjung Binga	1. Mempelam disajikan dengan mematuhi hygiene penyajian makanan dengan porsi perorangan. 2. Mempelam diletakkan di rak Mempelam yang terletak di ruang tunggu pasien pendaftaran. 3. Mempelam disajikan untuk 20 pasien antrian pertama pelayanan rawat jalan. 1.	berjalan
	PELUK MESRA SIMPKI (Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat Serentak oleh Keluarga Simpor Laki)	meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal dengan kunjungan lapangan lintas program UKM secara serentak	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam satu siklus hidup untuk mencapai masyarakat sehat, mandiri, aktif, produktif dan berdayaguna bagi keluarga dan masyarakat	seluruh masyarakat dalam siklus hidup	Melakukan Pemeriksaan Tekanan Darah b. Melakukan Pemeriksaan Berat badan dan Tinggi Badan c. Melakukan Skrining Kesehatan seluruh siklus hidup d. Melakukan Pemeriksaan Darah e. Memberikan Edukasi Kesehatan	berjalan
8	Puskesmas Membalong					
	a. Begadai (Begalor Bujang Dayang)	Menjaring dan melakukan pemeriksaan kepada remaja di wilayah kerja Puskesmas membalong dalam kegiatan Posyandu Remaja	Meningkatkan capaian kunjungan remaja, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan remaja tentang kesehatan reproduksi, mencegah kenakalan remaja dan pernikahan dini	Usia remaja 10-18 tahun di wilayah kerja puskesmas Membalong	Melakukan pemeriksaan Tekanan darah, Berat Badan, Tinggi Badan, Lingkar perut, Lingkar Lengan, cek Hb dan pemberian KIE terkait Kesehatan Reproduksi	Kegiatan berlangsung setiap bulan

	b. Ceklis Rupa (Ceklis 10 indikator Rumah Tangga)	Pemantauan rumah tangga yang sudah Ber PHBS	Meningkatkan kualitas kesehatan melalui kesadaran masyarakat dalam menjalani perilaku kehidupan sehari-hari yang bersih dan sehat	Seluruh Rumah tangga di wilayah kerja Puskesmas Membalong	Melakukan kunjungan rumah untuk pemeriksaan 10 indikator PHBS di Rumah tangga	kegiatan berlangsung setiap bulan
	c. Bekemas (Bejamban Kerjasama Lintas sektor)	Mendorong masyarakat untuk akses jamban sehat	Mengurangi penyakit berbasis lingkungan terkait BAB sembarangan dan meningkatkan PHBS	Seluruh Rumah tangga di wilayah kerja Puskesmas Membalong	Verifikasi	kegiatan berlangsung setiap bulan
	d. SIBIRU (Swiping Ibu Hamil Baru)	Menjaring ibu hamil baru yang belum melakukan pemeriksaan kehamilan ke petugas kesehatan di fasyankes	Meningkatkan capaian ibu hamil baru dan menurunkan angka K1 akses	Seluruh ibu hamil baru yang belum melakukan pemeriksaan kehamilan di wilayah kerja Puskesmas Membalong	Kegiatan dilaksanakan berdasarkan informasi dari kader, masyarakat terkait keberadaan ibu hamil di wilayah kerja puskesmas membalong yang belum melakukan pemeriksaan kepada petugas kesehatan, waktu pelaksanaan fleksibel berdasarkan informasi	Kegiatan sampai saat ini masih berjalan
	e. Sirih Merah (Cek tensi dan Gula darah dari rumah ke rumah)	Mendeteksi dini dan menemukannya secara awal adanya faktor resiko Penyakit tidak menular pada masyarakat usia 15-59 tahun	Mencegah faktor resiko penyakit tidak menular secara dini	seluruh masyarakat usia 15-59 tahun	Melakukan pemeriksaan Tekanan darah, Berat Badan, Tinggi Badan, Lingkar perut, cek gula darah dan pemberian KIE terkait penyakit tidak menular	kegiatan berlangsung setiap bulan
	f. Kawal Imunisasi (Kartu jadwal Imunisasi Bayi dan Baduta)	Memudahkan orang tua bayi/balita untuk mengingat jadwal imunisasi anaknya sesuai dengan usianya	Meningkatkan cakupan imunisasi dan mencegah penyakit PD3I	Orang tua bayi/balita yang diimunisasi	Kegiatan ini dilakukan di setiap posyandu dengan memberikan kartu jadwal imunisasi kepada orang tua bayi/balita yang baru pertama kali datang untuk imunisasi, dan petugas mencatat imunisasi yang diberikan sesuai tanggal pemberian dan mengingatkan kembali waktu untuk anak imunisasi selanjutnya	Kegiatan masih berlangsung
	g. Perawan Ceking (Peduli Rahim wanita dengan cek iva keliling)	Mendeteksi secara dini kanker leher rahim pada wanita usia subur yang sudah menikah	Meningkatkan capaian iva test dan mendeteksi secara dini kanker leher rahim	Seluruh Wanita yang sudah pernah menikah	Melakukan pemeriksaan iva test dengan menggunakan asam cuka	Kegiatan masih berlangsung

	h. Gerubak (Gerakan orang tua peduli 1000 hari kehidupan)	Meningkatkan pelayanan preventif kasus stunting	Mengurangi angka stunting	Ibu hamil K1 yang memeriksakan diri ke Puskesmas dan Ibu hamil di kelas ibu hamil	Melakukan KIE pada ibu hamil yang melakukan K1 di Puskesmas dan Kelas ibu hamil	Kegiatan sudah berjalan
9	Puskesmas Simpang Rusa					
	a. SANGU KETAN (Sambil nunggu antrian nonton video kesehatan)	Memberikan informasi mengenai kesehatan dan pencegahan penyakit kepada pasien yang sedang menunggu antrian	Meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan dan pencegahan penyakit pada pasien	Pasien dan keluarga pasien yang sedang menunggu antrian	Melakukan pemutaran video kesehatan dan informasi pencegahan penyakit, dilakukan pada saat jam pelayanan di laksanakan di ruang tunggu antrian pasien	Masih berjalan
	b.MARTABAK (Mari Akselerasi Pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis)	Mencegah terjadinya sakit TBC sehingga dapat menurunkan beban TBC	Sebagai pengobatan pencegahan bagi masyarakat sehat yang kontak erat dengan penderita positif TBC	Kontak serumah dan kontak erat penderita positif TBC	1. PP TB melakukan investigasi kontak 2. Kontak serumah atau kontak erat dilakukan mantoux tes dan telah dibaca oleh dokter pemeriksa bila hasil > 10 mm (1 cm) pasien di rujuk ke poli DOTS bila < 10 mm (<1 cm) pasien di observasi dan dilakukan pemeriksaan menggunakan algoritma pemeriksaan pemeriksaan ILTB 3. Kontak serumah/ kontak erat yang berisiko mendapatkan Terapi Pencegahan Tuberkulosis	Masih berjalan
	c. SOSIS PERIGI (Sosialisasi dan Aksi Sikat Gigi Bersama Pojok Edukasi gigi)	1. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan anak dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut 2. Menekan angka kejadian karies anak	Membantu upaya promotive dan preventive kesehatan gigi dan mulut di wilker pkm simpang rusa, masyarakat mengetahui cara menjaga kesehatan gigi dan mulut	Anak Kelas 1 SD dan orang tua	1. Pembuatan video edukasi tentang bagian – bagian rongga mulut dan fungsi nya, serta cara menjaga Kesehatan gigi dan mulut. 2. Sosialisasi dan edukasi berupa penyuluhan dengan media edukasi berupa video kepada anak kelas 1 SD beserta orang tua di luar Gedung wilayah kerja UPT Puskesmas Simpang Rusa	Masih berjalan

					<p>3. Sosialisasi dengan media video edukasi yang diunggah melalui media sosial resmi UPT Puskesmas Simpang Rusa (Facebook)</p> <p>4. Aksi sikat gigi Bersama anak sekolah dasar</p> <p>5. Pemberian lembar KASIH (Kalender Sikat Gigi Harian) dan sticker</p>	
	d. CEMARA (Cek Kesehatan Masyarakat Ramai)	Mencapai cakupan skrining uspro 100%	Masyarakat berperilaku CERDIK dan terkendalinya PTM	Usia 15-59 tahun	<p>1. Kegiatan penggalan informasi faktor risiko dengan wawancara sederhana tentang riwayat PTM pada keluarga dan diri peserta, aktifitas fisik, merokok, kurang makan sayur dan buah, serta informasi lainnya</p> <p>2. Kegiatan pengukuran berat badan, tinggi badan, Indeks Massa Tubuh (IMT), lingkar perut, tekanan darah.</p> <p>3. Pemeriksaan tajam penglihatan dan pendengaran</p> <p>4. Skrining PUMA untuk perokok usia >40 tahun.</p> <p>5. Kegiatan pemeriksaan gula darah, kolesterol total dan asam urat (jika stik ada)</p> <p>6. Kegiatan konseling dan penyuluhan</p> <p>7. Kegiatan rujukan ke Puskesmas jika dibutuhkan.</p>	Masih berjalan
	e. DARLING (Dapur Balita Cegah Stunting)	Memberikan pengetahuan kepada ibu balita tentang makanan yg bergizi untuk mencegah terjadinya stunting pada balita	Meningkatkan pengetahuan ibu balita dan mencegah terjadinya masalah gizi pada anak dengan masalah gizi kurang, gizi buruk, stunting dan obesitas	Ibu bayi balita/ keluarga balita/pengasuh balita yang ibu pekerja	Penyuluhan dan demo masak	Masih berjalan
10	Puskesmas Selat Nasik					

	a. Asyira	Untuk menurunkan angka kesakitan Penyakit Tidak Menular	Meningkatkan kebugaran dan daya tahan tubuh, serta membiasakan pola hidup sehat	Anak-anak, Remaja, Usia Produktif, dan Usia Lanjut	Senam Bersama, Penyuluhan Kesehatan, Pemeriksaan Kesehatan	Masih berjalan
11	RSUD dr.H.Marsidi Judono					
	a. Belungkak	Membantu pasien atau keluarga untuk mendapatkan akta kelahiran bayi baru lahir di UPT RSUD dr.H.Marsidi Judono tanpa harus datang ke Dinas Disdukcapil	Memberikan kemudahan bagi pasien / keluarga yang melahirkan di UPT RSUD dr.H.Marsidi Judono	Seluruh bayi hidup yang lahir di UPT RSUD dr.H.Marsidi Judono	Membantu pengurusan penerbitan akta kelahiran bayi baru lahir, dengan cara menyampaikan seluruh kelengkapan berkas administrasi, dalam waktu kurang lebih 7 hari kerja	Proses perpanjangn Kerjasama dengan Dinas jependudukan dan Catatan Sipil Setempat
	b. Simino	Mempermudah pasien dalam melakukan pendaftaran rawat jalan, secara online melalui aplikasi SIMINO atau Website resmi UPT RSUD dr.H. Marsidi Judono	Memberikan kemudahan pendaftaran pasien rawat jalan tanpa harus datang langsung ke RS, dapat memonitoring antrian serta jadwal pelayanan dokter. Pasien / keluarga dapat langsung datang pada saat hari pelayanan tanpa antrian panjang dan tidak perlu datang pagi-pagi	Seluruh masyarakat yang akan menggunakan layanan rawat jalan	Pendaftan online melalui aplikasi SIMINO atau Website resmi UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono	Masih Berjalan
	c. Sehati	Mempermudah pasien / keluarga pasien (Kepesertaan BPJS PBI) baik rawat jalan maupun rawat inap dalam hal perujukan pasien ke luar daerah Kabupaten Belitung	Memberikan keringanan bagi pasien / keluarga (Kepesertaan PBI) dalam proses perujukan pasien ke luar daerah baik pasien rawat jalan maupun rawat inap	Seluruh pasien kepesertaan BPJS PBI yang membutuhkan perujukan ke luar daerah	Proses pengurusan administrasi perujukan pasien ke luar daerah	Masih Berjalan

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung 2024

Meningkatnya angka harapan hidup merupakan tantangan kompleks yang melibatkan berbagai aspek, termasuk kesehatan masyarakat, pendidikan, ekonomi, dan aksesibilitas layanan kesehatan. Angka harapan hidup yang tinggi tidak hanya mencerminkan kesehatan individu tetapi juga mencerminkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pendekatan yang holistic dan terintegrasi diperlukan untuk mengatasi berbagai factor yang mempengaruhi angka harapan hidup. Rekomendasi/ solusi untuk permasalahan tersebut adalah pertama-tama penting untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan. Investasi dalam infrastruktur kesehatan, pelatihan tenaga medis, dan penyediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas dapat meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Sistem kesehatan yang efisien dan terjangkau harus menjadi prioritas, termasuk program imunisasi, pencegahan penyakit menular dan perawatan primer.

Selain itu, pendidikan kesehatan masyarakat perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran akan gaya hidup sehat, pola makan yang baik dan kebersihan pribadi. Program edukasi ini dapat dilakukan melalui kampanye public. Kurikulum sekolah, dan kampanye komunitas untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup sehat. Dalam menghadapi kompleksitas tentang ini, kolaborasi antara pemerintah, sector swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil adalah kunci. Hanya dengan kerjasama yang kuat dan komitmen bersama, kita dapat mencapai peningkatan berkelanjutan dalam rangka harapan hidup dan menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Tabel 3.40.: Realisasi Keuangan Program penunjang Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Tahun 2024

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	92.103.300.354	82.388.443.512	89,45%
2.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.010.001.840	1.757.355.549	87,43%
3.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	396.331.000	384.421.200	96,99%
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	508.160.000	412.078.291	81,09%
5.	Program Pengendalian Penduduk	104.732.500	98.271.520	93,83%
6.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	985.567.050	922.629.503	93,61%
7.	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	2.875.716.000	2.521.470.292	87,68%
8.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	119.964.378	105.704.936	88,11%
9.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	57.097.500	55.585.786	97,35%
10.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	96.259.100	92.219.709	95,80%

Sehingga realisasi anggaran untuk sasaran Meningkatnya kualitas derajat kesehatan masyarakat dengan capaian 89,40% dengan persentase rata-rata capaian 91,14% maka terdapat efisiensi 10,60%.

SASARAN 5 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat

Pembangunan dibidang pendidikan terus dilaksanakan di Kabupaten Belitung dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dan mendukung Nawacita Presiden Republik Indonesia yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dan melakukan revolusi karakter bangsa. Pemerataan akses pendidikan yang berkeadilan menjadi salah satu faktor pendukung majunya pendidikan suatu bangsa. Jika kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya Belitung mampu mencapai kualitas

maksimal, tidak menutup kemungkinan akan menjadikan Belitung sebagai daerah maju. Pendidikan merupakan faktor penting sebagai dasar pembentukan kepribadian manusia.

Mutu pendidikan di Kabupaten Belitung masih terbilang cukup rendah. Kabupaten Belitung masih harus banyak melakukan pembangunan dalam sektor pendidikan agar mampu memberikan akses pendidikan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh warganya, antara lain dengan mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan non formal dan meningkatkan partisipasi sekolah pada anak usia sekolah.

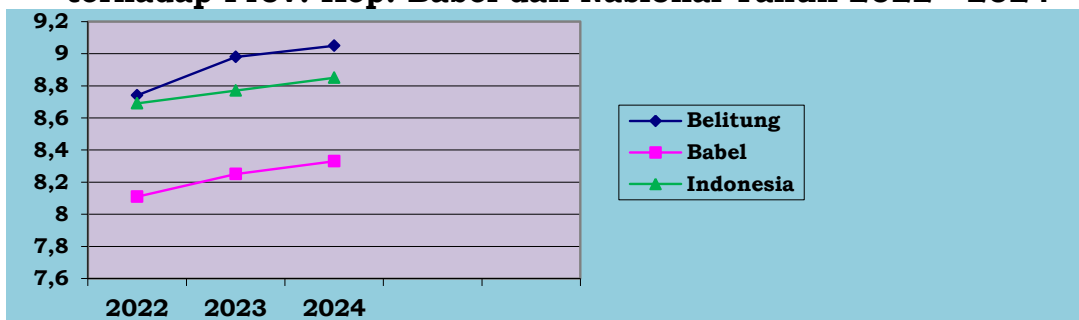
Capaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat” diukur melalui Indikator Sasaran Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah. Target 2024 yang ditetapkan adalah 8,78 tahun. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.41.: Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI		2024		KATEGORI	TARGET AKHIR RPD 2026
			AWAL RPD	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,74	8,78	9,05	103,08	SB	8,82

Indikator dari sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat, yaitu Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Angka rata-rata lama sekolah menunjukkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Berdasarkan penghitungan dari BPS, realisasi RLS Kabuapten Belitung tahun 2024 sebesar 9.05 tahun. Realisasi ini melampaui target sebesar 3,08%. Berikut disajikan data capaian Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Belitung dan Provinsi Bangka Belitung dari tahun 2022 sampai 2024.

Grafik 3.9. : Perkembangan Capaian RLS Kabupaten Belitung terhadap Prov. Kep. Babel dan Nasional Tahun 2022 - 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik 2025

Dari grafik terlihat bahwa selama kurun waktu 2022 – 2024, capaian RLS Kabupaten Belitung sudah di atas provinsi Bangka Belitung. Dan jika dibandingkan dengan capaian RLS nasional, RLS Kabupaten Belitung berada sedikit lebih tinggi. Pada tahun 2024, capaian RLS Kabupaten Belitung 9,05 tahun, melampaui RLS Provinsi Kep Babel yang sebesar 8,33 tahun, dan capaian nasional sebesar 8,85 tahun.

Peningkatan pembangunan urusan pendidikan di Kabupaten Belitung terus dilakukan karena telah memberikan kontribusi positif terhadap kualitas pendidikan daerah yang ditunjukkan dengan kenaikan angka rata-rata lama sekolah. Berbagai upaya tersebut antara lain melalui peningkatan sarana dan prasarana sekolah, peningkatan akses

pembiayaan pendidikan, peningkatan tata kelola dan kualitas sumber daya manusia pendidikan.

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk mencapai capaian indikator kinerja “Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat” dilakukan melalui strategi “Meningkatkan Akses Pendidikan” dengan 10 (sepuluh) arah kebijakan, yaitu:

1. Meningkatkan partisipasi sekolah pada anak usia sekolah;
2. Meningkatkan akreditasi sekolah (PAUD, SD dan SMP dan pendidikan kesetaraan);
3. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan;
4. Meningkatkan penyelenggaraan PAUD;
5. Meningkatkan mutu pembelajaran dengan penguatan karakter dan akhlak;
6. Meningkatkan kualitas SDM pendidikan dan tenaga kependidikan;
7. Meningkatkan pemerataan sebaran pendidik dan tenaga kependidikan;
8. Memberikan bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu dan berprestasi;
9. Meningkatkan kompetensi literasi dan numerasi pada anak usia sekolah; dan
10. Meningkatkan literasi pada anak usia sekolah dan masyarakat.

Untuk mengukur tingkat partisipasi sekolah pada anak usia sekolah dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) indikator, yaitu; Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Putus Sekolah (APTs).

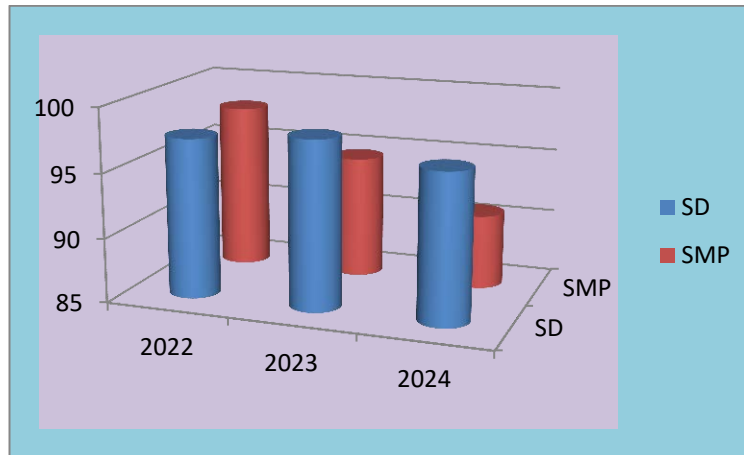
❖ Angka Partisipasi Kasar (APK)

Salah satu tolok ukur partisipasi penduduk ditunjukkan dengan Angka Partisipasi Kasar (APK). APK bertujuan untuk meningkatkan pemerataan dan perluasan pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau, baik melalui jalur formal maupun nonformal. Sehingga seluruh anak usia sekolah dasar dan menengah baik laki-laki maupun perempuan dan anak-anak yang memerlukan perhatian khusus dapat memperoleh pendidikan. APK juga menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya dan merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Nilai APK bisa lebih dari 100%. Hal ini disebabkan karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Sebagai contoh, banyak anak-anak usia diatas 12 tahun, tetapi masih sekolah di tingkat SD atau juga banyak anak-anak yang belum berusia 7 tahun tetapi telah masuk SD. Adanya siswa dengan usia lebih tua dibanding usia standar di jenjang pendidikan tertentu menunjukkan terjadinya kasus tinggal kelas atau terlambat masuk sekolah. Sebaliknya, siswa yang lebih muda dibanding usia standar yang duduk di suatu jenjang pendidikan menunjukkan siswa tersebut masuk sekolah di usia yang lebih muda.

Berikut angka partisipasi kasar (SD/MI + Paket A, SMP/Mts + Paket B) di Kabupaten Belitung Tahun 2024:

Grafik 3.10.: Perkembangan APK Tahun 2022 – 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik 2025

Pada tahun 2024 APK jenjang SD tertinggi berada di Kecamatan Badau yaitu sebesar 103,93%, sedangkan yang terendah berada di Kecamatan sijuk yaitu sebesar 90,62%. Sama hal dengan APK jenjang SD, untuk APK jenjang SMP tertinggi juga berada di Kecamatan Badau yaitu sebesar 94,46% dan terendah di Kecamatan selat nasik yaitu sebesar 66,97%. Atau dari 327 penduduk usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang SMP di Kecamatan Selat Nasik hanya 219 orang, artinya masih ada 108 penduduk yang berusia 13-15 tahun yang tidak menempuh pendidikan jenjang SMP, hal ini bias terjadi dikarenakan beberapa hal yaitu masih ada penduduk usia 13-15 tahun yang mungkin masih masih bersekolah di jenjang SD ataupun memilih bersekolah di kecamatan lain dan atau masih ada penduduk usia 13-15 tahun yang memang tidak bersekolah atau putus sekolah.

Terlihat bahwa APK SD/MI di Kabupaten Belitung berfluktuatif cenderung menurun. Hal tersebut perlu mendapatkan evaluasi yang komprehensif oleh pemerintah daerah sehingga perencanaan dan intervensi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah anak-anak yang bersekolah di SD/MI/Paket A di Kabupaten Belitung terus meningkat. Sama halnya dengan APK jenjang SD, pada APK jenjang SMP/MTs mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meurun. Ini menunjukkan bahwa perencanaan pendidikan dan intervensi di dalam penyelenggaraan pendidikan pada jenjang SMP/MTs/Paket B memberikan kesempatan kepada anak-anak usia SMP/MTs untuk bias melanjutkan pendidikan mereka. Pemenuhan sarana dan prasarana belajar disekolah juga mendorong semakin banyak anak-anak usia SMP yang bias bersekolah di lingkungan tempat tinggal mereka.

❖ Angka Partisipasi Murni (APM)

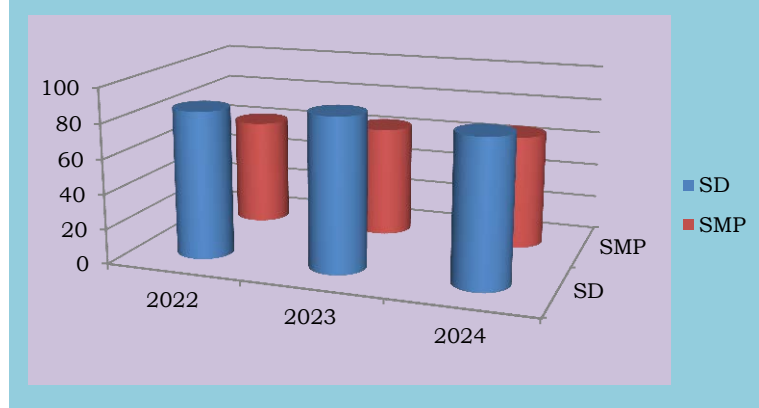
Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Angka Partisipasi Murni (APM) digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih

rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Keterbatasan APM adalah kemungkinan adanya under estimate karena adanya siswa di luar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu. Contoh: Seorang anak usia 6 tahun bersekolah di SD kelas 1 tidak akan masuk dalam penghitungan APM karena usianya lebih rendah dibanding kelompok usia standar SD yaitu 7-12 tahun.

Berikut angka partisipasi murni (SD/MI + Paket A, SMP/Mts + Paket B) di Kabupaten Belitung tahun 2024.

Grafik 3.11.: Perkembangan APM Tahun 2022-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik 2025

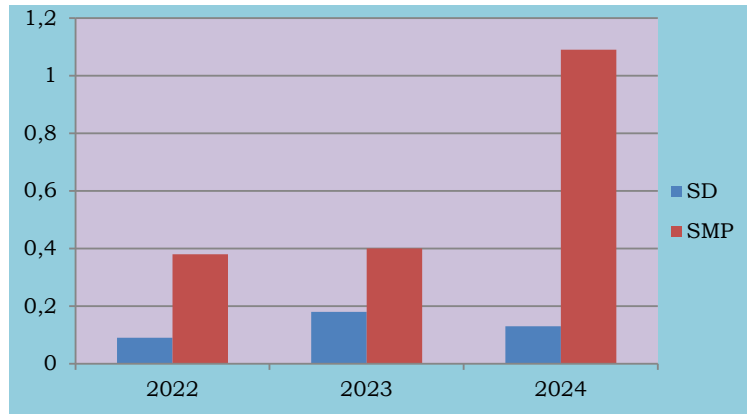
Tren penurunan APM yang terjadi baik pada jenjang SD/MI maupun SMP/MTs dipengaruhi berbagai factor, antara lain ketidakmerataan infrastruktur pendidikan hingga danya regulasi terkait zonasi sekolah yang telah diberlakukan memberikan dampak terhadap turunnya APM SD. Angka APM kurang dari 100% berarti terdapat anak usia SD maupun SMP yang bersekolah sebelum usia berdasarkan ketentuan atau ada anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Anak usia sekolah yang tidak bersekolah dimungkinkan karena: anak yang difabel, yang tidak bias sekolah melalui sekolah formal, anak usia sekolah bersekolahnya dengan cara *home shoolling*, anak *drop out* sekolah. Oleh karena itu, diperlukan penelusuran lebih lanjut penyebab APM belum mencapai 100%, agar dapat dirumuskan kebijakan yang tepat untuk menanggapi *gap* yang ada.

❖ Angka Putus Sekolah (APTs)

Angka Putus Sekolah adalah proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7 - 12 tahun, 13 - 15 tahun dan 16 - 18 tahun. Semakin tinggi angka putus sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata. Begitu sebaliknya jika angka putus sekolah semakin kecil maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin baik.

Di Kabupaten Belitung, APTs mengalami penurunan terutama di tingkat SD/MI + Paket A dan SMP/Mts + Paket B. Sebagaimana terlihat pada berikut:

Grafik 3.12.: Perkembangan Angka Putus Sekolah Kab. Belitung Tahun 2022 – 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik 2025

APS pada penduduk berusia 7-12 tahun berfluktuatif pada rentang 2020-2024 dengan angka tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 0,19%. kemudian tahun 2022 terjadi penurunan yang signifikan menjadi 0,07% dan kembali meningkat pada tahun berikutnya menjadi 0,18% namun pada tahun 2024 kembali turun menjadi 0,13% atau sebanyak 25 anak usia 7-12 tahun yang putus sekolah. Sementara itu pada tahun 2024 terdapat 95 orang penduduk usia 13-15 tahun di Kabupaten Belitung yang putus sekolah atau sebesar 1,09% melonjak jauh jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya hanya 0,4% atau sebanyak 35 orang. hal ini bisa disebabkan beberapa faktor seperti terjadi pernikahan usia anak, faktor ekonomi, ataupun ketidakmauan anak untuk bersekolah.

Berdasarkan data Kemendikbudristek tahun 2024 pada bulan Agustus, jumlah anak putus sekolah di Indonesia berjumlah 4,6 juta orang dengan rincian data rata-rata pada jenjang sekolah menengah. Hal ini bukan hanya menjadi perhatian pemerintah daerah namun juga sampai ke pemerintah pusat, bagaimana upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah angka putus sekolah yang semakin meningkat melalui kebijakan-kebijakan dan program-program yang tepat sasaran.

Kecamatan Tanjungpandan menjadi kecamatan dengan jumlah putus sekolah paling tinggi jika dibandingkan dengan empat kecamatan lainnya yaitu berjumlah 13 anak putus sekolah usia 7-12 tahun dan 57 anak putus sekolah usia 13-15 tahun pada tahun 2024. Sedangkan Kecamatan Selat Nasik pada tahun 2024 untuk usia 7-12 tahun sebanyak 2 anak yang putus sekolah sedangkan tidak ada yang putus sekolah untuk usia 13-15 tahun.

Angka putus sekolah di Kabupaten Belitung tergolong cukup rendah jika dilihat dari grafik. Selama kurun waktu 2022 sampai dengan 2024 angka putus sekolah tidak pernah melebihi 1 % artinya masih tergolong cukup rendah. meski demikian pemerintah tidak boleh mengabaikan hal ini karena setiap tahun angka semakin meningkat. Peran orang tua, sekolah maupun lingkungan sangat mempengaruhi minat dan motivasi anak

untuk bersekolah sehingga pemerintah perlu bersinergi untuk menciptakan program-program positif yang melibatkan anak-anak usia sekolah sehingga bisa menjaga minat dan motivasi mereka untuk terus bersekolah.

Sementara untuk angka putus sekolah pada penduduk usia 13-15 tahun meningkat tajam pada tahun 2024 yaitu sebesar 1,09% dari sebelumnya 0,4% pada tahun 2023. hal ini perlu perhatian serius dari pemerintah daerah untuk menemukan faktor penyebab putus sekolah penduduk usia 13-15 tahun dan mencari solusi yang tepat sehingga jumlah angka putus sekolah bisa ditekan dan tidak bertambah.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2024 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut diatas antara lain yaitu:

- 1) Melakukan Pembinaan secara Intensif ke sekolah serta interaksi dengan pemangku kepentingan setempat seperti pemerintah Desa, untuk dukungan mencegah siswa putus sekolah
- 2) Melalui bidang Teknis Melakukan pendampingan kepada sekolah sebagai tindakan rensponsif jika ditemukan laporan siswa yang putus sekolah.

Untuk meningkatkan kinerja tahun 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan melakukan:

- 1) Melakukan Pembinaan secara intensif kepada sekolah untuk melakukan antisipasi dan pemetaan terhadap siswa yang rentan putus sekolah.
- 2) Meningkatkan komunikasi intensif dengan pemangku kepentingan setempat untuk mencegah angka putus sekolah melalui kesadaran kolektif masyarakat.

Tabel 3.42.: Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid jenjang TK/PAUD di Kabupaten Belitung Tahun 2023/2024 - 2024/2025

Kecamatan	Sekolah		Guru		Murid	
	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025
Membalong	7	7	29	26	252	255
Tanjungpandan	21	20	117	113	1.371	1.369
Badau	4	4	20	19	139	118
Sijuk	9	10	39	45	335	312
Selat Nasik	1	1	5	5	31	28
Belitung	42	42	210	208	2.128	2.082

Sumber: Kabupaten Belitung Dalam Angka, 2025

Tabel 3.43.: Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid jenjang SD di Kabupaten Belitung Tahun 2023/2024 - 2022/2025

Kecamatan	Sekolah		Guru		Murid	
	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025
Membalong	30	30	253	263	2.493	2.449
Tanjungpandan	45	45	611	585	10.851	10.737
Badau	17	17	141	147	1.549	1.561
Sijuk	22	22	203	207	2.954	2.908

Selat Nasik	7	7	52	55	495	496
Belitung	121	121	1 260	1 257	18.342	18.151

Sumber: Kabupaten Belitung Dalam Angka, 2025

Tabel 3.44.: Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid jenjang SMP di Kabupaten Belitung Tahun 2023/2024 - 2024/2025

Kecamatan	Sekolah		Guru		Murid	
	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025
Membalong	5	5	69	73	961	972
Tanjungpandan	15	15	276	272	4.825	4.875
Badau	3	3	46	47	755	751
Sijuk	4	4	79	82	1.314	1.293
Selat Nasik	2	2	18	22	241	217
Belitung	29	29	488	496	8.096	8.108

Sumber: Kabupaten Belitung Dalam Angka, 2025

Dari tabel-tabel di atas dapat dilihat bahwa selama 2 (dua) tahun terakhir terjadi peningkatan sebaran guru-guru pada jenjang SD di tiap kecamatan, peningkatan dan penurunan sebaran guru-guru ini terjadi karena adanya penerimaan PNS untuk kategori guru TK/ PAUD, SD dan SMP dan guru yang memasuki masa pensiun. Peningkatan yang tinggi sebaran guru-guru di Kecamatan Tanjungpandan karena mutasi dari kecamatan lain di Kabupaten Belitung. Sedangkan jumlah sekolah tidak mengalami peningkatan. Khusus untuk jumlah sekolah diprioritaskan pada peningkatan kualitas gedung sekolah dengan perbaikan-perbaikan ruang kelas, penambahan ruang kelas, serta penambahan kelengkapan sarana pendidikan.

Untuk mencapai sasaran “Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat” melalui dengan 7 (tujuh) arah kebijakan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan 2 (dua) Program, yaitu:

1. Program Pengelolaan Pendidikan;
2. Program Pendidikan dan Tenaga Pendidik;
3. Program Pembinaan Perpustakaan.



Gambar 3.11.: Bantuan Program Sistem Pendampingan Pendidikan dan Olahraga (SIMPOR) Tahun 2024

Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Belitung juga berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui program inovatif yang diusung Bupati dan Wakil Bupati, yaitu: Program Pelayanan Pendidikan Bagi Siswa Kurang Mampu dan Siswa Berprestasi (SIMPOR). Program ini merupakan upaya untuk mencegah putus sekolah bagi siswa kurang mampu yang rentan putus sekolah. Program SIMPOR menyoal Siswa SD

dan SMP yang kurang mampu dan rentan putus sekolah, tetapi tidak mendapat bantuan pada Program Indonesia Pintar (PIP). Program SIMPOR dilaksanakan sejak tahun 2019 sampai dengan 2024 dirasakan sangat efektif dalam rangka menekan angka putus sekolah serta meningkatkan angka melanjutkan sekolah di Kabupaten Belitung. Penerima manfaat dari Program SIMPOR adalah Peserta Didik Jenjang SD dan SMP yang berlatar belakang dari keluarga kurang mampu yang masuk di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Upaya pencapaian indikator sasaran ini bisa berjalan baik karena adanya faktor pendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- ❖ Ketersediaan anggaran yaitu tersedianya anggaran yang cukup untuk meringankan beban orangtua siswa melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan komitmen pimpinan karena pendidikan merupakan dasar utama manusia untuk maju dan berkembang.
- ❖ Program pusat yaitu Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 yang berkaitan dengan wajib belajar dan pengentasan kemiskinan yang mendukung pelaksanaan kegiatan;
- ❖ Melakukan Komunikasi dan Pembinaan Kepada pihak sekolah dalam upaya menekan angka putus sekolah serta meningkatkan angka melanjutkan sekolah dan pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang sangat strategis untuk meletakkan dasar-dasar pembangunan manusia.
- ❖ Program Inovatif daerah “SIMPOR” dapat berjalan dengan baik.
Adapun faktor Penghambat Pencapaian Kinerja antara lain;
- ✘ Akses pendidikan kurang merata. Hal tersebut dapat ditandai dengan rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar, sehingga dengan kurangnya akses pendidikan tersebut berpengaruh terhadap angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Belitung;
- ✘ Cukup tingginya APTs di Kabupaten Belitung.
Kurangnya pembinaan secara intensif ke sekolah serta interaksi dengan pemangku kepentingan setempat seperti pemerintah Desa, untuk dukungan mencegah siswa putus sekolah.
- ✘ Masih adanya anggapan masyarakat bahwa Pendidikan anak usia dini biayanya mahal, dan tidak penting karena untuk mengikuti pendidikan SD tidak wajib lulus PAUD.

Memperhatikan faktor pendukung dan penghambat di atas beberapa hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung ke depan adalah sebagai berikut:

- ⌘ Meningkatkan pemerataan akses pendidikan terutama untuk daerah terpencil;
- ⌘ Meningkatkan kemampuan pembelajaran
Pemerintah Kabupaten Belitung harus dapat memastikan bahwa siswa setidaknya mencapai standar minimal pembelajaran dan pengembangan diri siswa di setiap jenjang sistem pendidikan.
- ⌘ Meningkatkan prasarana dan sarana
- ⌘ Meningkatkan kompetensi dasar dan memperbaiki sikap yang harus dimiliki pembelajar/guru.

Tanpa pengajaran yang lebih baik secara konsisten, siswa di Kabupaten Belitung tidak akan memperoleh fondasi yang kuat untuk belajar di tahap selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Belitung harus dapat memastikan bahwa Kabupaten Belitung memiliki jumlah guru berkualifikasi tinggi di tempat yang membutuhkan, khususnya di sekolah-sekolah yang berprestasi rendah, terpencil, dan di daerah pedesaan, serta memastikan para guru tersebut berkinerja sesuai kemampuan terbaiknya.

- ⌘ Menjalin hubungan sekolah dengan masyarakat dan pemanfaatan lingkungan untuk meningkatkan peran dan kapabilitas orang tua siswa dan masyarakat dalam meningkatkan motivasi belajar anak.

Tabel 3.45.: Realisasi Keuangan Program penunjang Sasaran Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Pengelolaan Pendidikan	61.085.487.055	52.995.602.351	86,76%
2.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	526.664.350	444.663.420	84,43%
3.	Pembinaan Perpustakaan	333.844.900	320.544.342	96,02%

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi anggaran program dengan rata-rata realisasi anggaran sebesar 86,79%, dengan rata-rata capaian program 89,07% maka terdapat efektifitas anggaran sebesar 13,21%.

3.2.3 TUJUAN 3 :Terwujudnya Pelayanan Birokrasi yang Bersih, Inovatif, Profesional, Akuntabel dan Transparan

Capaian kinerja tujuan terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan diukur melalui pencapaian indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Capaian kinerja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.46.: Capaian Kinerja Tujuan Terwujudnya Pelayanan Birokrasi yang Bersih, Inovatif, Profesional, Akuntabel dan Transparan

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPD	2024			Kategori	Target Akhir RPD 2026
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	BB	B	BB	112,6	SB	BB

Pada tahun 2024 Berdasarkan hasil evaluasi sementara atas capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Belitung oleh KemenPANRB. Namun berdasar hasil (nilai) evaluasi eksternal yang disampaikan KemenPANRB sesuai dengan surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB nomor B/675/RB.06/2025 tanggal 28 April 2025 hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024 kepada Pemerintah Kabupaten Belitung melalui portal rb nasional dengan alamat <https://portalrb.menpan.go.id/> tanggal 01 Mei 2025, Pemerintah

Kabupaten Belitung mendapat nilai indeks RB Sementara 79,74 dengan predikat “BB”. mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 4,6 poin.

Berikut Perkembangan dan pelaksanaan RB Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2021 dan 2024.

Tabel 3.47.: Indeks Reformasi Birokrasi Kab. Belitung Tahun 2022-2024

No	Tahun	Indeks Reformasi Birokrasi
1	2022	57,71 (CC)
2	2023	75,14 (BB)
3	2024	79,74 (BB)

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sejak tahun 2023, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tengah melakukan penajaman evaluasi reformasi birokrasi dengan lebih mengukur indeks reformasi birokrasi dari sisi dampak kinerja dibandingkan dengan sisi proses yang cenderung bersifat administratif yang disebut dengan reformasi birokrasi tematik yang terdiri dari empat tema yaitu: pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, dan percepatan prioritas aktual presiden (peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pengendalian inflasi).

Evaluasi reformasi birokrasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari siklus pengelolaan reformasi birokrasi. Dalam Pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Belitung telah menetapkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 50 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2023-2024. Komitmen melaksanakan reformasi birokrasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung ditunjukkan dengan ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Nomor: 188.45/001/VIII/2024 tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024.

Berikut Kategori, Nilai angka dan Persepsi Indeks Reformasi Birokrasi:

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90-100	Istimewa
2.	A	>80-90	Memuaskan
3.	BB	>70-80	Sangat Baik
4.	B	>60-70	Baik, perlu sedikit perbaikan
5.	CC	>50-60	Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
6	C	>30-50	Kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar
7.	D	0-30	Sangat kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar.

SISTEM INFORMASI LEMBAR KERJA EVALUASI RB	
Selain belit	
Hasil Evaluasi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung	
RB General Awal	69.35
Koefisien	0
RB General	69.35
Total Bobot RB General	100
Bobot RB General Penyesuaian	100
RB General Penyesuaian	69.35
RB Tematik	10.39
Index RB	79.74
File Berkas	

Pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi pada tahun 2024 dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2024. Berikut hasil evaluasi yang didasarkan pada hasil evaluasi dari Kementerian PAN dan RB diuraikan sebagai berikut Tahun 2023-2024 :

Tabel 3.48.: Perbandingan Indeks Reformasi Birokrasi Kab. Belitung Tahun 2023-2024 (Komponen dan Sub Komponen)

No.	Komponen	Sub Komponen	Indikator Penilaian	Bobot	Tahun 2023		Tahun 2024		
					Skor	Skor Index	Bobot	Skor	Skor Index
1	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3	1.88	1.88	3	2.21	2.21
2	RB General	Strategi Pelaksanaan RB General	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	7	100	4.39	7	87	4.49
3	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	2	99.62	1.99			
4	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	2	2	0.8	3	4	2.4
5	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	4	3.2	2.56	4	3.54	2.83
6	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	3.5	1.5	1.5	3.5	0.5	0.5
7	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	4	63.52	2.54	4	64.68	2.59
8	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2.5	1	0.5	2.5	1	0.5
9	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Digitalisasi Arsip	2.5	93.22	2.33	2.5	92.36	2.31

5 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024

10	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah D diselesaikan	2.5	3	1.5	2.5	3	1.5
11	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Kualitas Kebijakan	2.5	0	0	2.5	0	0
12	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Reformasi Hukum	2.5	45.61	1.14	2.5	97.84	2.45
13	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	2.5	2.12	1.06	2.5	2.62	1.31
14	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2.5	72.4	1.81	2.5	73.66	1.84
15	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Sistem Merit	4	252.5	2.46	4	252.5	2.46
16	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Indeks Pelayanan Publik	1.5	3.89	1.17	2	4.02	1.61
17	RB General	Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	1.5	88.87	1.33	2	93.07	1.86
18	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	9	3.11	5.6	9	3.35	6.03
19	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Capaian Indikator Kinerja Utama Makro	2	98	1.96	4	98.79	3.95
20	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Capaian Indikator Kinerja Non Makro	8	57.14	2.9	6	78.21	3.04
21	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Opini BPK	5	5	5	5	3	5
22	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Tindak Lanjut Rekomendasi	4	80.1	3.2	4	77.38	3.1
23	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Indeks Berakhlak	4	61.6	2.46	4	63.26	2.53
24	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Survei Penilaian Integritas	10	76.61	7.66	10	76.55	7.66
25	RB General	Capaian Sasaran Strategis	Survei Kepuasan Masyarakat	8	89.33	7.15	8	89.71	7.18
26	RB General	Koefisien	Koefisien	10			10		
27	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Strategi Pembangunan)	0.4	0.28	0.28	1	0.6	0.6
28	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Realisasi Investasi (Strategi Pembangunan)	0.4	0.28	0.28	1	0.86	0.86
29	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Strategi Pembangunan)	0.4			1	0.61	0.61
30	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Strategi Pembangunan))	0.4	0.4	0.4	1	0.69	0.69
31	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Pengendalian Inflasi (Strategi Pembangunan))	0.4	0.27	0.27	1	0.5	0.5
32	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Output)	0.6	54.61	0.23			
33	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Realisasi Investasi (Capaian Output)	0.6					
34	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Output)	0.6					
35	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Output)	0.6	100	0.42			

		Tematik							
36	RB Tematik	Strategi Pelaksanaan RB Tematik	Pengendalian Inflasi (Capaian Output)	0.6					
37	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Dampak)	3	1.5	1.5	3	1.98	1.98
38	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Realisasi Investasi (Capaian Dampak)	3	1.61	1.61	3	1.53	1.53
39	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Capaian Dampak)	3			3	0.75	0.75
40	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Capaian Dampak)	3	2.8	2.8	3	2.87	2.87
41	RB Tematik	Capaian Indikator Dampak RB Tematik	Pengendalian Inflasi (Capaian Dampak)	3	2.46	2.46	3	0	0

Pemerintah Daerah sebagai pelaksana level mikro melaksanakan reformasi birokrasi dalam Dimensi Prioritas Nasional yang telah ditetapkan oleh level makro dan meso berupa Kegiatan Utama dan telah ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional, serta bersifat *mandatory*, Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Belitung melaksanakan 21 kegiatan utama dalam reformasi birokrasi general menetapkan 5 (lima) tema dalam reformasi birokrasi tematik.

Tabel 3.49.: Hasil Evaluasi RB di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022-2023

Instansi Pemerintah	Indeks RB 2022		Indeks RB 2023			
	Nilai	Predikat	General	Tematik	Total	Predikat
Kabupaten Bangka Tengah	69,36	B	66,54	12,14	78,7	BB
Kabupaten Belitung Timur	58,2	CC	64,2	12,24	76,4	BB
Kabupaten Belitung	57,71	CC	64,89	10,25	75,14	BB
Kabupaten Bangka	62,97	B	62,08	8,7	70,8	BB
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	69,53	B	60,54	8,46	69	B
Kabupaten Bangka Barat	53,48	CC	60,47	7,25	67,7	B
Kabupaten Bangka Selatan	60,61	B	55,5	9,03	64,5	B
Kota Pangkalpinang	63,13	B	55,86	1,97	57,8	CC

Pada tahun 2023 Indeks Reformasi Birokrasi dari 7 Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang mengalami kenaikan sebanyak 5 Pemda mengalami kenaikan predikat, 2 Pemda dari CC ke BB, 2 Pemda dari B ke BB dan 1 Pemda dari CC ke B. 1 Pemda yang mengalami penurunan nilai yaitu Kota Pangkal Pinang.

Faktor Pendukung:

Tuntutan pelayanan prima dari segenap masyarakat menjadi pemicu pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar semakin adaptif dan lincah. Adanya pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dipilah secara tematik diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara lebih fokus.

Faktor Penghambat:

Kurangnya kesadaran dan komitmen bersama diantara seluruh elemen pemerintahan menjadi penghambat dalam rangka menciptakan kesuksesan Reformasi Birokrasi, karena reformasi birokrasi merupakan tanggungjawab bersama segenap elemen pemerintahan. Beberapa kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi yaitu:

1. Terdapat kegiatan utama mandatory yang belum ditetapkan sebagai target Instansi Pemerintah; dan targetnya belum didasarkan pada baseline dan target nasional (Kemenpanrb nomor 739 Tahun 2023);
2. Rencana aksi belum sepenuhnya relevan untuk mencapai target sasaran kegiatan utama dan belum menggambarkan intervensi terhadap permasalahan utama;
3. Masih terdapat indicator output atas rencana aksi yang belum cukup menggambarkan sasaran dan targetnya;
4. Secara umum capaian pelaksanaan kebijakan belum baik, ada 3 indikator yang nilainya (0) yaitu Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE, Indeks Kualitas Kebijakan dan Tematik Pengendalian Inflasi untuk strategi pembangunan dan capaian indikator dampak. Dan 5 indikator nilainya belum baik, yaitu, tingkat keberhasilan pembangunan ZI, Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan, Indeks pembangunan statistik, Indeks BerAkhlak, dan nilai pada strategi pelaksanaan RB Tematik dan capaian dampak yang masih perlu penguatan.

Setelah memperhatikan faktor pendukung dan penghambat tersebut, maka untuk menjaga capaian kinerja sasaran dimasa yang akan datang diperlukan koordinasi dengan Kementerian/ Lembaga pengampu untuk peningkatan nilai indeks indicator penilaian dalam RB General khususnya untuk indeks yang masih dinilai buruk. Karena secara umum, indeks indicator penilaian dalam RB General khususnya untuk indeks penilaian Pemerintah Kabupaten Belitung di Tahun 2024 apabila dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami peningkatan. Perbaikan dalam strategi penyusunan kegiatan dalam rencana aksi juga perlu dilakukan agar relevan untuk mencapai target sasaran dalam kegiatan utama. Pelaksanaan percepatan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung tahun 2024 melalui pelaksanaan program dan kegiatan terkait 21 kegiatan utama telah menghasilkan dan mendukung pencapaian kondisi yang cukup baik sebagaimana telah diuraikan. Dalam rangka mengetahui sejauh mana keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung dalam melaksanakan reformasi birokrasi sesuai yang diamanatkan, perlu untuk melakukan evaluasi baik internal maupun eksternal baik dalam rb general maupun dalam rb tematik.

Dalam RPD Kabupaten Belitung Tahun 2024 - 2026, upaya pencapaian Tujuan 2 "Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih,

inovatif, profesional, akuntabel dan transparan”, telah ditetapkan 2 (dua) sasaran dengan 7 (tujuh) strategi sebagaimana terinci pada tabel berikut:

Tabel 3.50.: Sasaran dan Strategi Pencapaian Tujuan 2

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Tujuan 2 Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, professional, akuntabel dan transparan	Sasaran 6 Terciptanya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah Meningkatkan kinerja pemerintah daerah Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Meningkatkan pengelolaan system pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) Meningkatkan statistic sektoral Meningkatkan kualitas pelayanan public Meningkatkan stabilitas politik, keamanan ketertiban masyarakat yang kondusif. Meningkatnya kapabilitas aparatur
	Sasaran 7 Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional	

SASARAN 6 : Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel

Capaian kinerja sasaran “Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel” merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama RPD Kabupaten Belitung tahun 2024 – 2026. Capaian kinerja tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.51.: Capaian Kinerja Sasaran Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi		2024		Kategori	Akhir RPD 2024 Target
			Awal 2023	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Opini BPK	Predikat	WDP	WTP	WTP	100	Sangat Baik	WTP
2	Nilai SAKIP Kabupaten Belitung	Predikat	B	BB	B	92,39	Sangat Baik	BB

(*)Indikator sasaran Opini BPK masih menunggu hasil audit BPK

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah Kabupaten Belitung, terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan yakni Akuntabilitas, Transparansi, dan Pelayanan yang berkualitas. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, bahwa penyelenggara pemerintah harus memperhatikan azas umum penyelenggaraan negara, antara lain : 1) Azas Kepastian Hukum, 2) Azas Tertib.

Pencapaian kinerja sasaran Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel melalui 2 (dua) indikator, yaitu Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah dengan target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan nilai SAKIP Kabupaten Belitung dengan target BB. Dari dua indikator tersebut, indikator Opini BPK belum dapat diukur dikarenakan masih menunggu hasil audit BPK dan indikator Nilai SAKIP Kabupaten Belitung juga belum tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu dari target BB di dapatkan Hasil Evaluasi AKIP dari Kementerian PAN dan RB Tahun 2024 yaitu B dengan nilai 64,68 dengan capaian kinerja sebesar 92,39%.

 **Opini BPK**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada BPK RI paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sampai saat ini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung tahun 2023 sedang dalam proses penyusunan dan Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan akan diterima setelah proses pemeriksaan oleh BPK RI selesai.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yakni: (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; (2) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*); (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (4) efektivitas sistem pengendalian intern. Berikut opini BPK RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung dan Nilai SAKIP Kabupaten Belitung Tahun 2024:



Gambar 3.11.: Penerimaan Penghargaan atas Opini BPK

Tabel 3.52.: Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung

TAHUN	OPINI BPK RI
2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2022	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2023	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2024	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Opini BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024 adalah Wajar Tanpa Pengecualian berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung tanggal 22 Mei 2024. Pencapaian kinerja sasaran 5 melalui 3 (tiga) strategi, yaitu: meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah, meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah

dan meningkatkan pengawasan kinerja pemerintah daerah. Setiap strategi memiliki arah kebijakan masing-masing yang kemudian dijabarkan dalam bentuk program-program kegiatan dalam upaya pencapaian kinerja sasaran.

Ada 3 (tiga) arah kebijakan dari strategi meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah, yaitu: 1) Meningkatkan pengelolaan keuangan; 2) Meningkatkan barang milik daerah (BMD); dan 3) Meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka perlu adanya reformasi birokrasi. Permasalahan mengenai pengelolaan aset dan SDM pengelolanya perlu mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah Kabupaten Belitung. Oleh karena itu perlu peningkatan kinerja lembaga pengelolaan keuangan daerah. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah ini diarahkan pada peningkatan tata kelola aset, pelaporan keuangan dan peningkatan pendapatan asli daerah dengan menggunakan teknologi informasi. Selain itu dengan menerapkan *e-budgeting* yang terintegrasi dengan perencanaan dan pelaporan keuangan daerah.

Kinerja pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Belitung meningkat. Hal ini terlihat dari ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen pengelolaan keuangan daerah, di mana pemerintah berusaha untuk menyusun dokumen keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku hal ini sejalan dengan diraihnya predikat opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kinerja pengelolaan keuangan daerah yang masih harus dibenahi adalah berkenaan dengan penataan aset di perangkat daerah hal ini terus dilakukan untuk tetap terus mempertahankan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Belitung dan mempertahankan predikat opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang baik antar pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan, serta langkah upaya yang kuat dalam rangka mempertahankan predikat WTP dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung. Sedangkan Faktor penghambat capaian kinerja adalah perubahan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang terus terjadi, dan juga transisi peralihan sistem informasi keuangan dari SIMDA ke SIPD. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja, akan melakukan :

1. Mendukung upaya untuk mempertahankan predikat WTP dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung.
2. Meningkatkan komunikasi dan kerjasama yang baik antar pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan APBD dan Pertanggungjawaban APBD.
3. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan instansi vertikal terkait pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah .



Nilai SAKIP Kabupaten Belitung

Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban

instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten. Penerapan reformasi birokrasi berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Ada 5 komponen penilaian SAKIP, pertama perencanaan kinerja, terdiri dari renstra, rencana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja dengan bobot 35. Kedua, pengukuran kinerja, yang meliputi pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran dan implementasi pengukuran dengan bobot 20. Ketiga, pelaporan kinerja, terdiri dari pemenuhan laporan, penyajian informasi kinerja, serta pemanfaatan informasi kinerja, diberi bobot 15. Keempat, evaluasi kinerja, terdiri dari pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan hasil evaluasi, diberi bobot 10. Kelima, pencapaian kinerja, bobotnya 20, terdiri dari kinerja yang dilaporkan (*output* dan *outcome*), dan kinerja lainnya.

Perubahan penilaian AKIP tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana terdapat 4 komponen penilaian SAKIP, pertama perencanaan kinerja, kedua pengukuran kinerja, ketiga pelaporan kinerja, keempat evaluasi kinerja.

Untuk melihat perkembangan capaian kinerja nilai SAKIP Kabupaten Belitung dari tahun 2022 – 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.53.: Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Belitung

KOMPONEN	BOBOT	2022	% kinerja komponen terhadap bobot	2023	% kinerja komponen terhadap bobot	2024	% kinerja komponen terhadap bobot
Perencanaan Kinerja	30	21.68	72.27	22.40	74.67	22.28	74.26
Pengukuran Kinerja	30	15.26	50.87	16.16	53.87	16.27	54,23
Pelaporan Kinerja	15	9.84	65.60	10.25	68.33	10.48	69,87
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14.20	56.80	14.71	58.84	15,65	62,60
Nilai Hasil Evaluasi Kategori	100	60.98		63.52		64,68	B

Sumber : Bagian Organisasi Setda 2025

Nilai SAKIP Kabupaten Belitung pada tahun 2024 sebesar 64,68, dengan kategori B (Baik) sesuai dengan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Nomor B/193/AA.05/2024 tanggal 3 September 2024. Tahun 2023 dengan kategori yang sama B, ada kenaikan di tahun 2024 sebesar 1,16 poin. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa evaluasi pada tahun 2024 didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemerintah daerah maupun level organisasi perangkat daerah.

Penguatan Akuntabilitas Kinerja bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah Meningkatnya kinerja instansi pemerintah dan Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah. Pada Tahun 2023 telah ditetapkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 dan Peraturan Bupati Belitung Nomor 22 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026. Dan penetapan Peraturan Bupati Belitung Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026.

Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan renstra dan juga perjanjian kinerja dan seluruh pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala, Laporan capaian kinerja Tahunan, Triwulanan, Laporan Dalev Pelaksanaan RKPD dan Laporan Evaluasi RENJA per OPD, ditambahkan dengan Laporan Realisasi Fisik dan Kegiatan Bulanan setiap OPD melalui website monev.belitung.go.id yang telah diintegrasikan dengan sakip.belitung.go.id.

Namun dari data capaian nilai SAKIP di atas yang menjadi catatan penting adalah predikat akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung dari hasil evaluasi atas penerapan SAKIP yang masih berada di kategori B atau nilai dalam *range* 60 – 70. Ini dapat diartikan bahwa tingkat efisiensi penggunaan anggaran di Kabupaten Belitung masih rendah dan diindikasikan adanya potensi terjadinya inefisiensi. Inefisiensi ini dapat terjadi karena tujuan dan sasaran tidak berorientasi hasil, ukuran kinerja tidak jelas (tidak ada keterkaitan antara program dan kegiatan), kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan.

Kondisi ini tentunya kurang sejalan dengan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung. Sementara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, yakni Akuntabilitas, Transparansi, dan Pelayanan yang berkualitas. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, bahwa penyelenggara pemerintah harus memperhatikan azas umum penyelenggaraan negara, antara lain; (1) Azas Kepastian Hukum; (2) Azas Tertib Penyelenggaraan Negara; (3) Azas Kepentingan Umum; (4) Asas Keterbukaan; (5) Asas Proporsionalitas; (6) Asas Profesionalitas; dan (7) Asas Akuntabilitas. Menyempurnakan rumusan sasaran strategis yang belum berorientasi hasil dan indikator kinerja yang belum SMART, terutama pada perangkat daerah dan kepala bidang merupakan hal yang harus dilakukan Pemkab Belitung untuk menindaklanjuti salah satu rekomendasi yang di berikan oleh Kementerian PAN RB dalam evaluasinya.



Gambar 3.12.: Dokumentasi Penyerahan DPA Tahun 2025 secara simbolis sekaligus Laporan evaluasi kinerja Oleh Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024.

Upaya pencapaian kinerja sasaran Terciptanya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel terus dilakukan dengan dukungan dari berbagai faktor. Faktor-faktor pendukung pencapaian kinerja antara lain:

Komitmen Pimpinan untuk meraih Opini WTP, Indeks RB dan meningkatkan nilai SAKIP.

Namun demikian dalam upaya pencapaian kinerja sasaran terdapat faktor penghambat pencapaian kinerja, yaitu:

- ❖ Pengelolaan keuangan dan aset daerah belum optimal, kurangnya kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) Pangkalpinang terkait pengelolaan barang milik daerah;

Belum optimalnya pengawasan kinerja pemerintah daerah, dikarenakan:

- ⌘ belum optimalnya reviu dan perbaikan dokumen perencanaan yang telah dilakukan sehingga masih terdapat indikator yang belum berorientasi hasil pada level perangkat daerah dan melakukan penyempurnaan perencanaan kinerja secara keseluruhan;
- ⌘ belum optimalnya pengawasan kinerja pemerintah daerah dipengaruhi oleh nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang belum optimal;
- ⌘ belum optimalnya pembinaan, peringatan dini dan manajemen resiko penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- ⌘ belum optimalnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan kapabilitas aparatur pengawasan intern pemerintah yang belum optimal.

Kualitas dan profesionalitas SDM aparatur masih rendah, dikarenakan:

- ⌘ integritas dan kompetensi aparatur masih kurang, belum optimalnya pengelolaan sistem manajemen aparatur;
- ⌘ sistem manajemen pemerintahan yang belum terlaksana dengan baik.

Belum optimalnya Pelayanan publik, dikarenakan:

- ⌘ kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik masih belum optimal;
- ⌘ keterbukaan informasi publik yang masih kurang;
- ⌘ pelayanan publik yang masih kurang;
- ⌘ terbatasnya ketersediaan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana publik;

Tindak lanjut yang akan dilaksanakan di masa datang dalam upaya meningkatkan kinerja sasaran birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel di masa yang akan datang sebagai berikut :

- ❖ Terus melakukan upaya monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung;
- ❖ Meningkatkan koordinasi dengan seluruh perangkat daerah terkait perencanaan, pengukuran kinerja, pencapaian kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja;
- ❖ Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.

Tabel 3.54.: Realisasi Keuangan Program penunjang Sasaran Terciptanya Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN	%
----	---------	--------------------	--------------------	---

		(RP)		
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	113.179.109.358	109.666.261.359	96,90%
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.706.653.857	935.696.269	54,83%
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.514.288.693	1.458.362.960	58,00%
4	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	18.147.603.100	16.649.142.430	91,74%
5	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.402.902.555	1.287.857.918	91,80%
6	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	418.587.057	395.302.365	94,44%
7	Program Penyelenggaraan Pengawasan	380.424.450	226.115.408	59,44%
8	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	328.126.300	274.396.394	83,63%
9	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	226.224.414	196.935.939	87,05%
10	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.902.432.014	2.516.650.075	86,71%
11	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	253.385.752	233.053.502	91,98%
12	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	1.182.598.064	1.098.885.087	92,92%
13	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	4.643.284.000	4.603.229.100	99,14%
14	Program Penanggulangan Bencana	1.696.690.200	1.529.924.988	90,17%
15	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	776.955.100	678.756.300	87,36%
16	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.294.411.300	1.188.686.101	91,83%
17	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	24.138.045.300	24.050.812.998	99,64%
18	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	591.050.000	450.532.562	76,23%
19	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.224.715.000	999.072.115	81,58%

Sehingga untuk Sasaran Terciptanya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel dengan persentase realisasi anggaran sebesar 95,16% dan persentase rata-rata capaian program 85,02% maka terdapat efisiensi 4,84%.

SASARAN 7 : Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional

Capaian kinerja sasaran “Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional” merupakan salah indikator kinerja utama RPD dengan indikator Indeks Profesional ASN dengan target “71-80” Sedang. Berikut realisasi dan capaian indikator sasaran Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional Kabupaten Belitung Tahun 2024.

Tabel 3.55.: Capaian Kinerja Sasaran Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi	2024		Capaian (%)	Kategori	Akhir
			Awal RPD	Target	Realisasi			RPD 2026 Target
1	Indeks Profesional ASN	Skala	75,44	71-80	78,63	100	SB	71-80

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permenpan RB No. 38 Tahun 2019). Indeks Profesionalitas ASN merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif yang hasilnya digunakan untuk menilai dan mengevaluasi tingkat profesionalitas ASN. Adapun indikator profesionalitas ASN adalah pegawai akan semakin profesional apabila kompetensinya semakin tinggi, kinerjanya semakin baik, organisasinya semakin modern dan memiliki disiplin yang tinggi.

Indeks Profesionalitas ASN dikeluarkan dan ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara selaku Pembina Kepegawaian Nasional. Sumber Data yang digunakan untuk mengukur IP ASN adalah data SAPK yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian Negara. Adapun unsur-unsur yang dinilai yaitu Kualifikasi Pendidikan, Kompetensi (kediklatan), Kinerja dan Disiplin dengan kategori sebagai berikut:

- Nilai 91% - 100% : Sangat Tinggi
- Nilai 81% - 90% : Tinggi
- Nilai 71% - 80% : Cukup/Sedang
- Nilai 61% - 70% : Rendah
- Nilai < 60% : Sangat Rendah

Indikator yang digunakan untuk mengukur Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) adalah :

- Kualifikasi, dengan nilai maksimal 25
- Kompetensi, dengan nilai maksimal 40
- Kinerja, dengan nilai maksimal 30
- Disiplin, dengan nilai maksimal 5
- Total nilai maksimal 100

Kualifikasi, meliputi data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah, Kompetensi, meliputi data dan informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas.

Indikator yang digunakan adalah :

Diklat kepemimpinan, Diklat fungsional, Diklat teknis, Seminar/workshop/magang/kursus/sejenisnya, dalam 2 (dua) tahun terakhir. Kinerja, meliputi data dan informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat serta perilaku PNS.

Disiplin, meliputi data dan informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS. Indikator : hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, hukuman disiplin berat. Data hukuman disiplin tersebut telah mempunyai keputusan final dan dihitung dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir).

Realisasi kinerja Indikator Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Kabupaten Belitung tahun 2023 berdasarkan perhitungan Badan Kepegawaian Negara adalah **78,63 (sedang)** Hasil IP ASN Tahun 2023 sesuai surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 435/B-BM.02/SD/KR.VII/2024 tanggal 07 Oktober 2024 hal : Penyampaian Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Instansi Daerah Wilayah Kerja Kantor Regional VII BKN Tahun 2023.

Nilai Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2023 sebagai berikut:

Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Nilai	Kategori
20,86	28,50	24,26	5,00	78,63	Sedang

Penjelasan:

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN terdiri dari unsur: Kualifikasi 20,86 dari 25; Kompetensi 28,50 dari 40; Kinerja 24,26 dari 30 dan Disiplin 5 dari 5.

Tabel 3.56.: Tabel Perbandingan IP ASN Kabupaten Belitung Tahun 2021-2023

Tahun	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Nilai	Kategori	Sumber Data
2021	12,69	18,52	23,23	5,00	59,44	Sangat Rendah	Hasil Penilaian BKN No: 870/B-BH.02.01/SD/C/2022 Tanggal 13 Januari 2022
2022	21,04	21,14	24,38	5,00	71,56	Sedang	Hasil Penilaian BKN No: 470/B-BM.02/SD/KR.VII/2023 Tanggal 18 Oktober 2023
2023	20,86	28,50	24,26	5,00	78,63	Sedang	Hasil Penilaian BKN No: 435/B-BM.02/SD/KR.VII/2024 tanggal 07 Oktober 2024

Sumber Data: Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kab Belitung Tahun 2024

Adapun faktor pendorong peningkatan nilai IP ASN Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024 antara lain : Tersedianya database pegawai pada aplikasi Simpeg dengan tujuan terciptanya sistem informasi dan database kepegawaian yang dapat menampung, mengolah, menyimpan dan menemukan kembali data kepegawaian. Adanya pengembangan e-SKP sesuai dengan Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, dimana pada Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2022 memiliki ruang lingkup yang lebih

luas yakni ASN (PNS dan PPPK) dengan perilaku kinerja Core Values ASN yang merupakan pengembangan PP Nomor 30 Tahun 2019 yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif.

Telah ditetapkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Melalui Jalur Pendidikan, yang dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan PNS melalui pendidikan formal dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier guna menunjang peningkatan kinerja organisasi berdasarkan formasi kebutuhan instansi.

Telah ditetapkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 93 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, yang digunakan sebagai pedoman dalam : pengelolaan sistem Manajemen Talenta PNS; perencanaan dan pengembangan karier pegawai berdasarkan Sistem Merit; pelaksanaan assessment pegawai; peningkatan kompetensi pegawai berdasarkan assessment dan talenta pegawai; dan penyusunan talent pool berdasarkan hasil assessment dan kinerja PNS sebagai dasar Rencana Suksesi pengisian jabatan PNS.

Telah ditetapkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 94 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, yang digunakan sebagai pedoman dalam penegakan disiplin PNS dan untuk memastikan agar setiap dugaan pelanggaran disiplin segera ditindaklanjuti oleh atasan langsung atau tim pemeriksa guna memberikan kepastian hukum bagi PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin maupun bagi instansi yang dirugikan atas perbuatan PNS yang bersangkutan. Diharapkan Penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada masing-masing unit kerja, yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan.

Dengan demikian, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah:

Strategi dalam rangka memperbaiki nilai IP ASN Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024 untuk meningkatkan nilai dimensi kompetensi:

- Berkoordinasi dengan OPD untuk memaksimalkan kegiatan pengembangan kompetensi ASN;
- Melaporkan hasil pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN beserta bukti dukung kepada BKPSDM Kabupaten Belitung;
- Melaksanakan Sosialisasi atau seminar online kepegawian dengan target peserta massal.



Gambar 3.13.: Pemerintah Kabupaten Belitung raih penghargaan pada Anugerah Meritokrasi 2023

Pemerintah Kabupaten Belitung meraih dua kategori penghargaan sekaligus pada Anugerah Meritokrasi 2023. Kedua kategori tersebut yaitu pada penerapan sistem merit dengan nilai 252,5 atau berpredikat baik, serta indeks kualitas pengisian JPT dengan nilai 87,16 atau berpredikat baik.

Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung harus senantiasa ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan. Dan upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah agar dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan tidak hanya dilakukan oleh internal organisasi perangkat daerah, melainkan juga terkait dengan pemerintah pusat (dalam hal ini Kementerian PAN dan RB serta Badan Kepegawaian Negara) dan juga pihak-pihak lainnya.

Tabel 3.57. : Realisasi Keuangan Program penunjang Sasaran Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Kepegawaian daerah	2.900.833.720	2.379.787.330	82,04%
2.	Pengembangan sumber daya manusia	1.889.920.200	1.673.698.459	88,56%

Sehingga untuk sasaran Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional dengan capaian 84,61% dengan persentase per sasaran 81,25% maka terdapat efisiensi 18,75%.

3.2.4 TUJUAN 4 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Dalam RPD Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026, upaya pencapaian Tujuan 4 “ meningkatkan kualitas lingkungan hidup “ telah ditetapkan 1 (satu) sasaran dengan 2 (dua) strategi, sebagaimana terinci pada tabel berikut :

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Tujuan 4 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Sasaran 8 Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	Meningkatkan Pengelolaan Kualitas Lingkungan Hidup
		Meningkatkan Pengelolaan sampah

Lingkungan hidup berkesinambungan diangkat dari suatu pembangunan yang berdampak terhadap lingkungan, perlu adanya pelestarian dari pemanfaatan sumber daya alam, dan upaya untuk melindungi, memulihkan pemanfaatan ekosistem dan upaya untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Kehadiran Pemerintah untuk melindungi masyarakat dari dampak pembangunan.

Capaian kinerja tujuan “Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup” merupakan salah satu indikator kinerja utama RPD dengan indikator Indeks kualitas lingkungan hidup tahun 2024 dengan target 69,25. Berikut realisasi dan capaian indikator sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Tahun 2024.

Tabel 3.58.: Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal RPD	2024			Kategori	Akhir RPD 2024 Target
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	69,25	69,25	69,84	100,85	SB	69,27

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa indikator dari tujuan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yaitu indeks kualitas lingkungan hidup, telah melampaui target yang telah ditetapkan. Dengan realisasi kinerja sebesar 69,84 melampaui target dengan kategori SANGAT BERHASIL. Dari realisasi IKLH Tahun 2024 sebesar 69,84 nilai IKLH Kabupaten Belitung pada posisi dan katagori **Sedang**. Kondisi tersebut perlu dipertahankan untuk terus meningkatkan Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang merupakan komponen terpenting dalam meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Belitung.

Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dalam proses perhitungannya sudah mempergunakan Aplikasi Pelaporan dan Perhitungan IKLH PPKL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dengan rumus sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. rumusannya sebagai berikut :

$$IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$$

IKA : Indeks Kualitas Air

IKU : Indeks Kualitas Udara

IKL : Indeks Kualitas Lahan

Untuk perhitungan nilai IKLH sebagai berikut :

Indeks Kualitas Air (IKA) : 57.57

Indeks Kualitas Udara (IKU) : 93.52

Indeks Tutupan Lahan (IKL) : 47.12

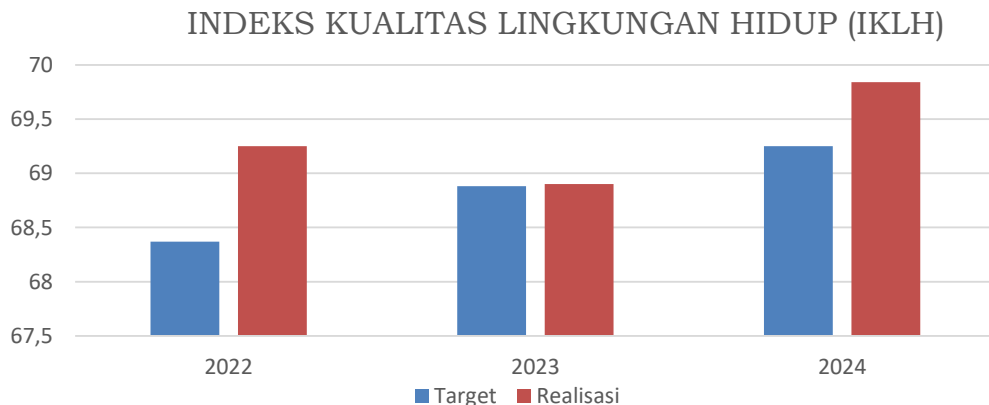
$$\begin{aligned}
 \text{IKLH} &= (0.376 \times \text{IKA}) + (0.405 \times \text{IKU}) + (0.219 \times \text{IKL}) \\
 &= (0.376 \times 57.57) + (0.405 \times 93.52) + (0.219 \times 47.12) \\
 &= 21,646 + 37,875 + 10.319 \\
 &= 69,84
 \end{aligned}$$

Untuk melihat perbandingan antara nilai IKLH dari tahun 2022 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.59.: Perbandingan Nilai IKLH Tahun 2022 sampai dengan 2024

No.	Indikator Kinerja Utama	2022	2023	2024
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,25	68,90	69,84

Grafik 3.13 Perbandingan Nilai IKLH Tahun 2022 sampai dengan 2024



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belitung 2024

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai IKLH pada tahun 2024 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Beberapa alternatif kebijakan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan nilai IKLH diantaranya adalah:

1. Pembuatan kebijakan yaitu peraturan daerah mengenai pengendalian pencemaran air, pengelolaan pengendalian pencemaran udara serta pengendalian kerusakan lahan.
2. Sosialisasi lebih lanjut dan intens kepada masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di area sempadan sungai serta menggunakan air sungai untuk aktivitas sehari-hari agar dapat menjaga perilaku hidup bersih dan sehat.
3. Sosialisasi dan peningkatan pelayanan IPAL domestik kepada masyarakat dan usaha-usaha kecil.

4. Peningkatan pengawasan dan pembinaan industri terkait pengelolaan limbah dan emisi udara yang dihasilkan.
5. Penambahan lokasi titik pantau kualitas udara agar dapat mewakili semua kecamatan yang ada di Kabupaten Belitung dan pelaksanaan pemantauan secara kontinyu menggunakan *Air Quality Monitoring System* (AQMS).
6. Peningkatan inventarisasi data Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan data vegetasi lainnya, baik data primer maupun sekunder serta melakukan penetapan Kawasan area terbuka hijau melalui kebijakan peraturan daerah.
7. Peningkatan program pemulihan kualitas lingkungan atau kegiatan inovasi lainnya bersama masyarakat dan pemangku kepentingan.
8. Penyebarluasan informasi dan publikasi terkait ruang terbuka hijau dan tutupan hutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga tutupan hutan.
9. Sosialisasi dan publikasi terkait dengan pengelolaan kualitas lingkungan hidup terhadap *stakeholder-stakeholder*.

SASARAN 8 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Air, Udara dan Tutupan Lahan

Capaian kinerja sasaran “Meningkatkan Kualitas Lingkungan Air, Udara dan Tutupan Lahan” merupakan salah satu indikator kinerja utama dengan indikator Indeks kualitas lingkungan hidup tahun 2024 dengan target 69,25. Berikut realisasi dan capaian indikator sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Tahun 2024.

Tabel 3.60.: Capaian Kinerja Tujuan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi		2024		Kategori	Akhir RPD 2024 Target
			Awal RPD	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Skala	69,25	69,25	69,84	100,85	SB	69,27

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa indikator dari tujuan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yaitu indeks kualitas lingkungan hidup, telah melampaui target yang telah ditetapkan. Dengan realisasi kinerja sebesar 69,84 melampaui target dengan kategori SANGAT BERHASIL. Dari realisasi IKLH Tahun 2024 sebesar 69,84 nilai IKLH Kabupaten Belitung pada posisi dan katagori **Sedang**.

Dalam perhitungan nilai IKLH Tahun 2024 dipengaruhi oleh nilai Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL). Adapun nilai IKA, IKU dan IKL Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

➤ **Indeks Kualitas Air (IKA)**

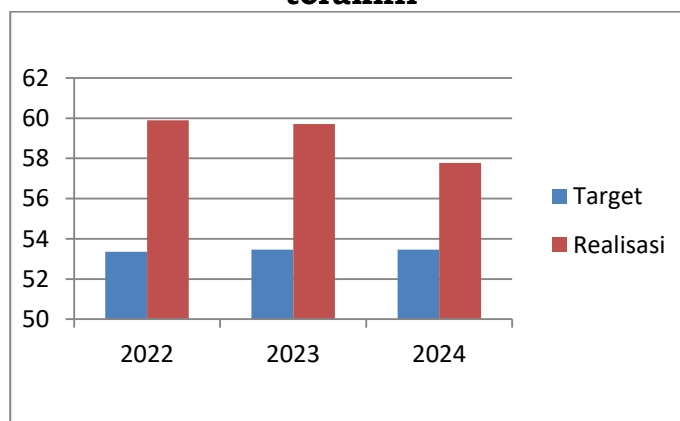
Nilai IKA pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 52,9 sedangkan realisasi kinerja tahun 2024 ialah 57,57 dengan tingkat capaian sebesar 108,83%. Nilai IKA tahun 2024 diperoleh dari hasil pemantauan kualitas air sungai pada titik-titik yang merepresentasikan hulu, tengah dan hilir sungai di 5

(lima) kecamatan yaitu Kecamatan Tanjungpandan, Kecamatan Sijuk, Kecamatan Badau, Kecamatan Membalong dan Kecamatan Selat Nasik. Titik yang dipantau yang terlapor sejumlah 24 (Dua puluh empat) titik yang terdiri dari 18 (delapan belas) titik air sungai dan 6 (enam) air danau/Kolong/SPAM. Nilai IKA pada tahun 2024 memenuhi target sebagaimana yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan oleh:

1. Perubahan lokasi titik pantau untuk mendapatkan keterwakilan pemantauan air sungai berdasarkan lokasi hulu, tengah dan hilir sungai.
2. Penambahan nilai IKA yang dihitung dari lokasi yang diuji oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 1 (satu) lokasi di Sungai Air Batu Buding yang diukur sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 4 (empat) titik.
3. Adanya pengaruh dari kondisi cuaca pada triwulan akhir yang memengaruhi besarnya debit air sehingga terdapat beberapa parameter yang mengalami penurunan kualitas terutama kandungan oksigen dalam air / *Dissolve oxygen* (DO). Selain itu, sifat tanah di Kabupaten Belitung yang bersifat asam memengaruhi parameter Ph air menjadi asam.
4. Nilai IKA yang dihitung ialah perhitungan berdasarkan aplikasi IKLH yang dikeluarkan oleh KLHK. Perhitungan dilakukan berdasarkan 8 (delapan) parameter wajib. Data yang terverifikasi sejumlah 103 (seratus tiga) dari 104 (seratus empat) titik air sungai dan danau yang terinput dengan persentase titik yang memenuhi baku mutu sebanyak 39 titik (37,5%), dan cemaran ringan sebanyak 64 titik (62,13%). Terlihat bahwa terdapat perbedaan jumlah yang cukup signifikan antara persentase titik yang memenuhi baku mutu dengan titik yang tercemar ringan.

Untuk melihat perbandingan antara nilai IKA 3(tiga) Tahun Terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Grafik 3.14.: Perbandingan Target dan Realisasi Nilai IKA 3(tiga) Tahun terakhir



Berikut dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang mendukung kinerja IKA sebagai berikut :

Gambar 3.14.: Pengujian Kualitas Air Sungai, Air Danau, dan Air Higiene Sanitasi di Kabupaten Belitung



➤ **Indeks Kualitas Udara (IKU)**

Nilai IKU Tahun 2024 ditargetkan 93,93 sedangkan realisasi kinerja Tahun 2024 sebesar 93.52 dengan tingkat capaian sebesar 99,56%. Indeks kualitas udara diketahui dengan melakukan pemantauan kualitas udara menggunakan metode *Passive Sampler* yang dilakukan 2 (dua) kali setahun (dalam hal ini per-semester) selama 2 (dua) minggu atau 14 (empat belas) hari pada 4 (empat) titik lokasi, yaitu area transportasi, industri, Kawasan perkantoran dan pemukiman. Data yang diukur berupa konsentrasi rata-rata tahunan untuk parameter pencemar udara SO₂ dan NO₂. Data tersebut digunakan untuk menyatakan atau menyimpulkan kondisi ketercemaran udara di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional dalam bentuk Indeks Kualitas Udara (IKU) yang merupakan salah satu komponen IKLH . Lokasi sampling ditentukan berdasarkan 4 (empat) kriteria lokasi, antara lain:

1. Kepadatan transportasi
Untuk kepadatan transportasi dilakukan sampling di lokasi Terminal Bis Tanjungpandan Jalan Jendral Sudirman.
2. Kepadatan pemukiman
Untuk kepadatan pemukiman dilakukan sampling di lokasi Kantor Desa Aik Pelempang Jaya Jalan Nusantara RT.04 RW.02.
3. Lokasi perkantoran
Untuk kepadatan perkantoran dilakukan sampling di Area Perkantoran dekat Dinas Lingkungan Hidup Kab.Belitung.
4. Lokasi industri
Untuk kepadatan industri dilakukan sampling di Kawasan Industri Suge Jalan TS RUU, Desa Pegantungan, Kecamatan Badau.
Rerata Nilai SO₂ dan NO₂ yang terukur masih memenuhi baku mutu namun nilai IKU belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh:
 1. Kenaikan nilai SO₂ dan NO₂ pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang dapat dilihat pada tabel berikut.

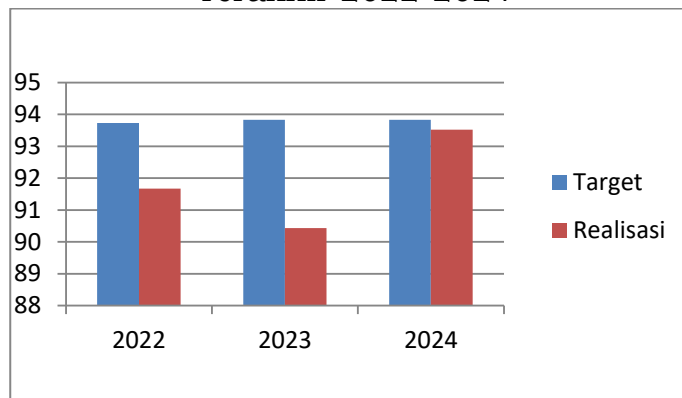
Tabel 3.61.: Perbandingan Nilai SO₂ dan NO₂ Tahun 2023 dengan 2024

No	Parameter	Kategori	Nilai Rata-rata	
			Tahun 2023	Tahun 2024
1	SO ₂	Transportasi	8,86	7,45
		Industri	5,31	8,69
		Pemukiman	9,92	2,735
		Perkantoran	5,135	4,96
2	NO ₂	Transportasi	7,895	6,53
		Industri	3,97	8,245
		Pemukiman	5,54	1,885
		Perkantoran	11,73	5,03

Dari tabel diatas terlihat bahwa terdapat kenaikan nilai pada 1 (satu) titik yang cukup signifikan, pada kategori lokasi industri jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan pada kategori lokasi lain mengalami penurunan.

2. Sumber sulfur utama yang dapat menyebabkan terjadinya kenaikan konsentrasi SO_2 , ialah pembakaran bahan bakar fosil baik dari kendaraan bermotor, peralatan diesel, hingga pembangkit listrik yang menggunakan minyak bumi atau batu bara. Terlihat adanya peningkatan konsentrasi SO_2 pada Kawasan industri yang berdekatan dengan pembangkit listrik. Meningkatnya nilai NO_2 pada area perkantoran dikarenakan berdekatan dengan jalan raya yang menjadi akses kendaraan dalam melintas.
3. Meningkatnya nilai NO_2 pada area perkantoran dikarenakan berdekatan dengan jalan raya yang menjadi akses kendaraan dalam melintas.
4. Selain itu, terjadi penurunan nilai yang cukup signifikan pada titik lainnya jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, baik pada parameter SO_2 maupun NO_2 .
5. Nilai IKU didapat berdasarkan data hasil pengujian oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sehingga data perhitungan indeks kualitas udara hanya terbatas pada hasil di 4 (empat) titik pantau tersebut. Untuk itu, diperlukan adanya pemantauan kualitas udara yang dilakukan oleh Kabupaten Belitung agar dapat menambah jumlah titik pantau kualitas udara sesuai dengan metode yang dipersyaratkan dalam PermenLHK Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
6. Kurangnya penetapan ruang terbuka hijau di Kabupaten Belitung

Grafik 3.14.: Perbandingan Target dan Realisasi Nilai IKU 3 (Tiga) Tahun Terakhir 2022-2024



Berikut dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang mendukung kinerja sebagai berikut :

1. Pengujian kualitas udara dengan metode *passive sampler* di Area Perkantoran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung



2. Pengujian kualitas udara dengan metode *passive sampler* di Terminal Bus Tanjungpandan



3. Pengujian kualitas udara dengan metode *passive sampler* Kawasan Industri Suge



4. Pengujian kualitas udara dengan metode *passive sampler* di Area Pemukiman Desa Aik Pelempang Jaya



5. Pengujian kualitas udara dengan metode *passive sampler* di Kawasan Industri PLTU Suge



6. Pengujian kualitas udara dengan metode *passive sampler* di Kawasan Pemukiman Kantor Desa Aik Pelempang Jaya



7. Pengujian kualitas udara dengan metode *passive sampler* di Area Perkantoran Dinas Lingkungan Hidup Kab. Belitung



8. Pengujian kualitas udara dengan metode *passive sampler* di Terminal Bus Tanjungpandan



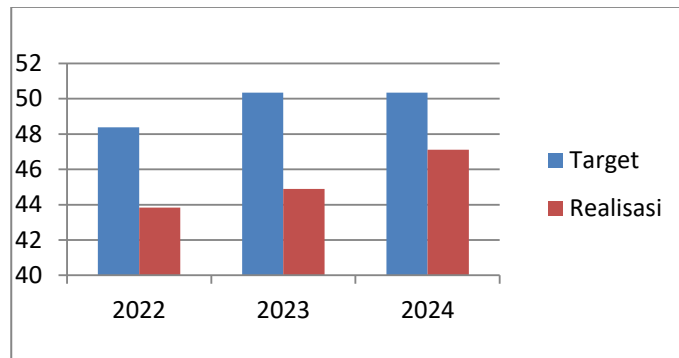
➤ **Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL)**

Nilai IKL pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 51,69 sedangkan realisasi kinerja tahun 2024 sebesar 47,12 dengan tingkat capaian sebesar 91,16%. Nilai IKL dihitung berdasarkan data yang diinput oleh Kementerian Lingkungan dan Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup dalam aplikasi IKLH. Kabupaten menginput data yang tersedia berupa data Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang didapat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Belitung dan data Taman Kehati oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung serta Data Vegetasi Lainnya yang didapat dari verifikasi lapangan reklamasi yang telah dilakukan oleh beberapa perusahaan tambang yang ada di Kabupaten Belitung..

Kenaikan nilai IKL Tahun 2024 dikarenakan :

1. Inventarisasi data seperti verifikasi lapangan dan pengumpulan data sekunder dari dinas lainnya sudah mulai dilakukan sejak tahun 2022 dan dilanjutkan hingga tahun 2023, sehingga terdapat kenaikan nilai IKL dari 43,89 tahun 2022 menjadi 44,89 tahun 2023. Namun, perlu dilakukan metode lain yang dapat menunjang peningkatan nilai indeks kualitas lahan, salah satunya ialah Deliniasi Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan Permen PU Nomor 5 tahun 2008 menggunakan *software* dan verifikasi lapangan.
2. Terdapat kenaikan target IKL tahun 2023 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang cukup signifikan dari 48,38 tahun 2022 menjadi 50,35 tahun 2023.

Grafik 3.15.: Perbandingan Target dan Realisasi Nilai IKL 3 (Tiga) Tahun Terakhir 2022-2024



Berikut dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang mendukung indikator kinerja IKL sebagai berikut :

1. Pemantauan Kualitas Lahan di Salah Satu Lahan Reklamasi PT.Timah, Tbk di Kecamatan Membalong, Sijuk, dan Badau



2. Pemantauan kualitas pesisir di Kabupaten Belitung



- Faktor Pendorong dan faktor penghambat untuk sasaran strategis I Meningkatkan kualitas air, udara dan tutupan lahan
 - Faktor Pendorong :
 - ❖ Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 Tahun 2020
 - ❖ Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
 - ❖ Peraturan Daerah Kabupaten Belitung nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Air Limbah Domestik

- ❖ Setiap kegiatan usaha wajib memiliki izin lingkungan dan persetujuan teknis lingkungan
 - ❖ Monitoring dan pengawasan kegiatan setiap industri atau kegiatan usaha yang melakukan kegiatan wajib melaksanakan pencegahan dan pengurangan dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
 - ❖ SDM sudah didukung oleh pejabat fungsional yaitu pengawas lingkungan hidup, pengendali dampak lingkungan dan penyuluh lingkungan hidup
 - ❖ Sudah didukung oleh Laboratorium Lingkungan Hidup yang sudah terakreditasi oleh lembaga KAN.
- Faktor Penghambat :
- ❖ Nilai Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dipengaruhi adanya perubahan iklim
 - ❖ Masih rendahnya Indeks Tutupan Lahan (IKL) dikarenakan rendahnya luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - ❖ Masih kurangnya pejabat fungsional pengawas lingkungan hidup, pengendali dampak lingkungan dan penyuluh lingkungan hidup
- Solusi :
- 1) Untuk meningkatkan nilai Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Tutupan Lahan (IKL) perlu pembuatan kebijakan yaitu peraturan daerah mengenai pengendalian pencemaran air dan pengelolaan pengendalian pencemaran udara.
 - 2) Peningkatan inventarisasi data Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan data vegetasi lainnya, baik data primer maupun sekunder serta melakukan penetapan Kawasan area terbuka hijau melalui kebijakan peraturan daerah
 - 3) Menambah SDM pejabat fungsional pengawas lingkungan hidup, pengendali dampak lingkungan dan penyuluh lingkungan hidup

Tabel 3.62.: Realisasi Keuangan Program penunjang Sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Air, Udara dan Tutupan Lahan Tahun 2024

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	346.659.900	339.531.845	97,94%
2.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.417.753.400	2.377.774.562	98,35%
3.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	521.213.200	503.405.700	96,58%
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	23.680.500	23.402.350	98,83%
5.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan	49.999.500	49.047.485	98,10%

Lingkungan Hidup (Pplh)				
6.	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	134.195.500	108.558.300	80,90%
7.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100.640.200	93.729.442	93,13%
8	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	3.628.300	3.571.200	98,43%
9	Program Pengelolaan Persampahan	7.380.397.250	7.310.683.850	99,06%

Sehingga untuk sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Lingkungan Air, Udara dan Tutupan Lahan dengan realisasi anggaran sebesar 98,47% dan rata-rata persentase per sasaran sebesar 95,70%, maka terdapat efektifitas dan efesiensi 1,53%.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Kebijakan umum keuangan/anggaran RPD Kabupaten Belitung tahun 2024 – 2026 diarahkan dalam tiga fungsi utama, yaitu : fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi:

- Fungsi alokasi, yaitu penganggaran untuk kegiatan pembangunan yang tidak mungkin dilaksanakan oleh masyarakat/swasta karena bersifat publik services seperti penanganan prasarana dasar dan penyediaan infrastruktur;
- Fungsi distribusi, yaitu penganggaran diarahkan untuk pemerataan, keadilan sosial, dan mengurangi kesenjangan, yang antara lain meliputi penanganan masalah infrastruktur dasar dan lainnya;
- Fungsi stabilitasi, yaitu penganggaran diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat serta stabilitas keamanan dan ketertiban.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2024 tanggal 24 September 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2024, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp. 1.068.510.021.579,00 bertambah sejumlah Rp. 79.990.090.345,00 sehingga menjadi Rp. 1.148.500.111.924,00 dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan daerah:

Semula	Rp. 932.744.201.063,00
Bertambah/ (berkurang)	Rp. 34.424.522.824,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 967.168.723.887,00

Belanja daerah:

Semula	Rp. 1.068.510.021.579,00
Bertambah/ (berkurang)	Rp. 81.290.734.345,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 1.149.800.755.924,00

Pembiayaan daerah:

Penerimaan pembiayaan	
Semula	Rp. 138.765.820.516,00
Bertambah/ (berkurang)	Rp. 46.866.211.521,00
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 185.632.032.037,00

Pengeluaran pembiayaan

Semula	Rp. 3.000.000.000,00
Bertambah/ (berkurang)	Rp. --
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 3.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 182.632.032.037,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp. -

3.3.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan hasil akumulasi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari beberapa komponen diantaranya adalah: (1) Pendapatan pajak daerah, (2) Pendapatan retribusi daerah, (3) Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (4) Lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Transfer terdiri dari komponen (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, dan (2) Pendapatan Transfer Antar Daerah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari komponen (1) Pendapatan hibah,

(2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Upaya-upaya efektif dalam penggalan sumber-sumber pendapatan daerah harus terus dilakukan tanpa harus menambah beban bagi masyarakat sehingga nantinya pendapatan daerah tidak lagi harus bergantung pada satu atau dua jenis pajak daerah saja, diversifikasi sumber pendapatan daerah menjadi mutlak dicari agar ketergantungan dan resiko dapat disebar. Pendapatan Daerah dikelompokkan ke dalam Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain - Lain Pendapatan Yang Sah yang masing - masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.63.: Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN DAERAH	967.168.723.887,00	977.370.104.650,33	101,05	1.117.439.818.908,80
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	154.812.555.643,00	185.033.042.636,33	119,52	186.621.508.495,80
	Pajak Daerah	87.742.429.243,00	95.733.329.497,25	109,11	94.099.943.027,70
	Retribusi Daerah	21.074.509.702,00	28.328.429.252,00	134,42	12.144.612.725,60
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.566.654.064,00	5.566.654.063,95	100,00	6.035.003.956,00
	Lain-lain PAD yang Sah	40.428.962.634,00	55.404.629.823,13	137,04	74.341.948.786,50
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	154.812.555.643,00	185.033.042.636,33	119,52	186.621.508.495,80
2	PENDAPATAN TRANSFER	801.359.016.000,00	781.559.645.246,00	97,53	920.148.463.207,00
	Dana Perimbangan	666.328.668.000,00	661.132.445.242,00	99,22	760.379.607.792,00
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	80.736.185.000,00	80.735.062.654,00	100,00	136.611.970.768,00
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	485.449.524.000,00	485.393.500.051,00	99,99	469.430.528.687,00
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	11.226.341.000,00	10.766.768.288,00	95,91	69.464.145.429,00
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	88.916.618.000,00	84.237.114.249,00	94,74	84.872.962.908,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	666.328.668.000,00	661.132.445.242,00	99,22	760.379.607.792,00
	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	41.029.718.000,00
	Dana Desa	41.717.027.000,00	41.477.591.670,00	99,43	40.466.853.100,00
	Insentif Fiskal	15.976.321.000,00	15.976.321.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	57.693.348.000,00	57.453.912.670,00	99,58	81.496.571.100,00
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	77.337.000.000,00	62.973.287.334,00	81,43	78.272.284.315,00
	Pendapatan Bagi Hasil	67.305.000.000,00	59.001.661.334,00	87,66	71.558.916.815,00
	Bantuan Keuangan	10.032.000.000,00	3.971.626.000,00	39,59	6.713.367.500,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	77.337.000.000,00	62.973.287.334,00	81,43	78.272.284.315,00
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	801.359.016.000,00	781.559.645.246,00	97,53	920.148.463.207,00

3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	10.997.152.244,00	10.777.416.768,00	98,00	10.669.847.206,00
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	10.997.152.244,00	10.777.416.768,00	98,00	10.669.847.206,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	10.997.152.244,00	10.777.416.768,00	98,00	10.669.847.206,00
	JUMLAH PENDAPATAN	967.168.723.887,00	977.370.104.650,33	101,05	1.117.439.818.908,80

3.3.2 Pengelolaan Belanja Daerah

Sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Belitung tahun 2024 - 2026 bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan efisien, efektif dan proporsional. Dalam menentukan Belanja Daerah terdapat tiga elemen penting, yaitu masyarakat, Pemerintah Daerah, dan DPRD, dengan peran fungsinya masing-masing sebagai pelayan masyarakat, sehingga anggaran belanja daerah sebagai perwujudan dari amanat rakyat kepada Pemerintah Daerah dan DPRD dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Rencana Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja (berorientasi pada hasil). Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran. Sedangkan orientasi Belanja Daerah diprioritaskan untuk efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD. Belanja Daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, Belanja harus tetap mengedepankan efisiensi dan efektifitas sesuai dengan prioritas dan program-program strategis daerah. Belanja Daerah Tahun 2024 dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer yang masing-masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.64.: Komposisi Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5	6
1	BELANJA DAERAH	1.149.800.755.924,00	1.060.978.760.805,40	92,28	1.108.448.343.633,00
	BELANJA OPERASI	964.222.300.034,00	885.984.171.231,78	91,89	849.822.871.783,00
	Belanja Pegawai	508.271.590.243,63	475.569.482.472,00	93,57	445.534.554.743,00
	Belanja Barang dan Jasa	407.951.234.350,37	363.320.239.519,78	89,06	363.679.104.935,00
	Belanja Subsidi	693.409.628,00	638.399.797,00	92,07	644.159.628,00
	Belanja Hibah	46.960.884.950,00	46.220.077.443,00	98,42	39.760.641.477,00
	Belanja Bantuan Sosial	345.180.862,00	235.972.000,00	68,36	204.411.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	964.222.300.034,00	885.984.171.231,78	91,89	849.822.871.783,00
2	BELANJA MODAL	74.989.800.190,00	67.145.369.203,62	89,54	151.031.461.750,00
	Belanja Modal Tanah	6.500.000.000,00	4.135.660.290,00	63,63	1.098.020.400,00

	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.837.407.740,00	26.330.082.535,00	85,38	62.234.547.745,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	18.878.149.382,00	18.418.277.038,62	97,56	38.123.739.705,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.122.711.886,00	14.696.115.290,00	97,18	46.774.899.000,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.483.820.182,00	3.400.250.200,00	97,60	2.800.254.900,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	167.711.000,00	164.983.850,00	98,37	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	74.989.800.190,00	67.145.369.203,62	89,54	151.031.461.750,00
	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	2.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.753.057.800,00	9.753.057.800,00		
3	BELANJA TRANSFER	108.088.655.700,00	107.849.220.370,00	99,78	107.594.010.100,00
	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	8.774.242.924,00	8.774.242.924,00	100,00	8.079.725.000,00
	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	978.814.876,00	978.814.876,00	100,00	1.052.096.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	98.335.597.900,00	98.096.162.570,00	99,76	98.462.189.100,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	108.088.655.700,00	107.849.220.370,00	99,78	107.594.010.100,00
	JUMLAH BELANJA	1.149.800.755.924,00	1.060.978.760.805,40	92,28	1.108.448.343.633,00
	SURPLUS/DEFISIT	(182.632.032.037,00)	(83.608.656.155,07)	45,78	8.991.475.275,80

3.3.3 Kondisi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Adapun kebijakan umum pembiayaan daerah adalah sebagai berikut :

Peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas;

Apabila APBD dalam keadaan surplus, kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan Kas Daerah dalam bentuk Giro/Deposito, Penyertaan Modal, atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun berjalan;

Apabila APBD dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu, rasionalisasi belanja, pinjaman daerah, atau memperluas kemitraan.

Pembiayaan Daerah dikelompokkan ke dalam Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang masing-masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut ;

Tabel 3.65.: Komposisi Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5	6
1	PEMBIAYAAN DAERAH	185.632.032.037,00	185.632.032.036,77	100,00	176.668.393.594,32
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	185.632.032.037,00	185.632.032.036,77	100,00	176.668.393.594,32
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	185.632.032.037,00	185.632.032.036,77	100,00	176.668.393.594,32
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	185.632.032.037,00	185.632.032.036,77	100,00	176.668.393.594,32
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	0,00
	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	176.668.393.594,00	176.668.393.594,32	100,00	176.668.393.594,32
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	99.023.375.881,70	-	185.659.868.870,12

3.3.4 Capaian Keuangan

Rencana keuangan pendukung 12 sasaran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.66.: Pencapaian Kinerja Sasaran Berdasarkan Realisasi Anggaran 2024

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024 (%)	TARGET ANGGARAN 2024	REALISASI ANGGARAN 2024	CAPAIAN 2024(%)	KETRELERAN
MISI I : Memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan, khususnya perikanan dan pariwisata secara optimal dan berkelanjutan serta mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi pembangunan sarana dan prasarana perhubungan sebagai penunjang aktivitas ekonomi perikanan dan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat											
1. Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	1. Rasio Gini	1. Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	1. Indeks Pembangunan Manusia	Poin	0,248-0,253	0,248	100	-	-	-	-
		2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	2. Laju pertumbuhan ekonomi	Persentase	4,5	1,84	40,89	31.541.314.703,00	28.361835.218	89,92	EFEKTIF DAN EFISIEN
		3. Menurunnya kemiskinan penduduk	3. Tingkat kemiskinan	Persentase	6,40	6,11	104,53	1.602.697.962,00	1.384.546.202,00	86,39	EFEKTIF DAN EFISIEN
		4. Meningkatkan infrastruktur kewilayahan	4.Persentase Pmenuhan infrastruktur kewilayahan	Persentase	62,84	48,93	77,86	63.315.477.437,00	59.259.704.752,00	93,59	EFEKTIF DAN EFISIEN
MISI II : Meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi masyarakat serta para stakeholder lainnya dalam pembangunan daerah											
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	5.Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	74,26	74,96	100,94	-	-	-	-
		6. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	6. Angka harapan hidup	Tahun	71,38	71,75	100,52	99.257.129.722,00	88.738.180.298,00	89,40	EFEKTIF DAN EFISIEN
		7. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat	7. Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,78	9,05	103,08	61.945.996.305,00	53.760.810.113,00	86,79	EFEKTIF DAN EFISIEN
3. Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih inovatif, professional, akuntabel dan transparan	3.Indeks Reformasi Birokrasi	8. Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih inovatif, professional, akuntabel dan transparan	8. Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B	BB	112,6	-	-	-	-
		9. Terciptanya Birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	9. Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	100	177.007.486.514,00	168.439.673.870,00	95,16	EFEKTIF DAN EFISIEN
			10. Nilai SAKIP	Predikat	BB	B	92,39	-	-	-	-
		10. Terciptanya Birokrasi yang inovatif dan professional	11. Indeks Profesionalitas ASN	Predikat	71-80 Sedang	78,63 Sedang	100	4.790.753.920,00	4.053.485.789,00	84,61	EFEKTIF DAN EFISIEN
MISI III : Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan											
4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	4.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	11. Meningkatkan Kualitas lingkungan hidup	12. Indeks Kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Skala	69,25	69,84	100,85	-	-	-	-
		12. Meningkatkan Kualitas lingkungan air, udara dan tutupan lahan	13. Indeks Kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Poin	69,25	69,84	100,85	10.978.167.750,00	10.809.704.734,00	98,47	EFEKTIF DAN EFISIEN

CAPAIAN PRESTASI DAN PENGHARGAAN YANG DITERIMA PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024

Dari upaya yang dilakukan selama tahun 2024 tersebut diraih beberapa penghargaan. Penghargaan yang diterima pada tahun 2024 terdiri dari :

DAFTAR PRESTASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG SEPANJANG 2024

1. Penghargaan Proklim kategori utama dalam upaya pengendalian perubahan iklim Tingkat Nasional oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 yaitu Desa Badau sebagai ProKlim Kategori Utama
2. Penghargaan ProKlim kategori Madya dalam upaya pengendalian perubahan iklim Tingkat Nasional oleh Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Tahun 2024 yaitu :
 - Desa Air Seruk
 - Desa Perpat
 - Desa Keciput
 - Desa TanjungBinga
 - Desa Simpang Rusa
3. Penghargaan Kepada dr. Jubel Tawar Herwington Gultom sebagai Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Tahun 2024 Kategori UPTK Layanan Primer Tenaga Medis oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
4. Piagam Penghargaan untuk Kelurahan Tanjung Pendam Kabupaten Belitung sebagai Pelaksana Pilot Project Gerakan Keluarga SEHAT Tanggal dan Tangguh Bencana Kategori Menuju PHBS oleh Ketua Umum Tim Penggerak PKK.
3. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2024 oleh oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia untuk sekolah:
 - SD Negeri 17 Tanjungpandan
 - SMKN 1 Tanjungpandan
4. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 oleh Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk sekolah:
 - SMP Negeri 7 Tanjungpandan
 - SD Negeri 8 Badau
 - SD Keluarga Universal
5. Piagam Penghargaan Penganugerahan predikat penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan public (Opini Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik Tahun 2024) Pemerintah Kabupaten Belitung Kualitas Tertinggi.
6. TOP 5 Inovasi Pelayanan Publik Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) dengan Inovasi Penjaga Di Hati (Penjaringan Pengendalian Penyakit Diabetes Melitus dan Hipertensi) UPT Puskesmas Badau Kabupaten Belitung Tahun 2024 oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

Bab-IV. Penutup

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan daerah, maka laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Belitung Tahun 2024 yang merupakan tahun pertama pada RPD 2024 - 2026 dalam pembangunan periode lima tahun berikutnya.

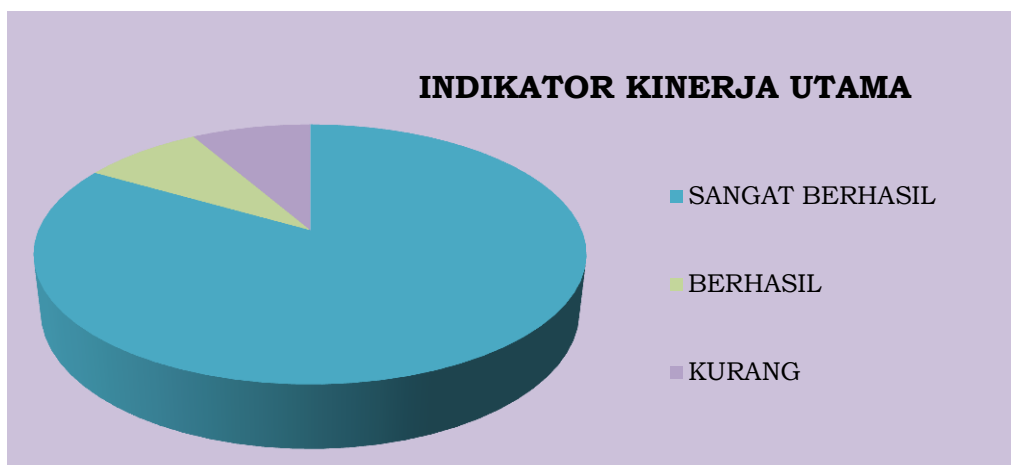
Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2024, disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Belitung telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 12 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Belitung yang telah ditetapkan pada tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Belitung ditetapkan dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 - 2026. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 12 indikator kinerja utama tahun 2024, sebagai berikut:

1. 10 Indikator atau 83,34% dengan kategori Sangat Berhasil
2. 1 Indikator atau 8,33% dengan kategori Berhasil
3. 1 Indikator atau 8,33% dengan kategori Kurang

Grafik 4.1.: CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024



Dengan demikian masih terdapat beberapa indikator kinerja utama yang capaiannya belum seperti yang diharapkan sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya. Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPD Kabupaten Belitung Tahun 2024 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2024 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, menjadi bahan refleksi sebagai motivasi untuk berusaha lebih keras dan lebih baik lagi.

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR : 22 TAHUN 2023

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024-2026

SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	KET
1	Terwujudnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi	Rasio Gini	$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i-1})$ <p>dimana: Pi : persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i Qi : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i</p> <p>Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 dan 1, jika: G < 0,3 = ketimpangan rendah 0,3 ≤ G ≤ 0,5 = ketimpangan sedang G > 0,5 = ketimpangan tinggi</p>	BPS	- Diskominfo - BAPPEDA	
I.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	$\frac{\sum \text{pertumbuhan PDRB tahun (n)} - \text{tahun (n-1)}}{\sum \text{pertumbuhan PDRB tahun (n-1)}} \times 100\%$	BPS	- Diskominfo - BAPPEDA	

SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	KET
I.2	Menurunnya Kemiskinan Penduduk	Tingkat Kemiskinan	$Po = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{Z - Yi}{Z} \right]$ <p>Dimana :</p> <p>Po = Rasio kesenjangan kemiskinan (<i>poverty gap</i>)</p> <p>Z = garis kemiskinan</p> <p>q = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan</p> <p>Yi = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (i=1,2,3,...,q), yi < z</p> <p>n = jumlah penduduk</p>	BPS	<ul style="list-style-type: none"> - Diskominfo - BAPPEDA 	
I.3	Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	Persentase pemenuhan infrastruktur kewilayahan	<p>0,5 x (infrastruktur ke-PU-an dan permukiman)) + (0,5 x infrastruktur perhubungan)</p> <p>dimana:</p> <p>Infrastruktur ke-PU-an dan permukiman = (0,5 x Persentase pemenuhan infrastruktur ke-PU-an) + (0,50 x Rata-rata Pemenuhan PSU Permukiman)</p> <p>Infrastruktur perhubungan = (0,5 x persentase pemenuhan pelabuhan) + (0,5 x sarpras keselamatan jalan)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Data dasar prasarana jalan kabupaten/kota form DD- 1 - SK Bupati tentang penetapan jalan kabupaten - Laporan monitoring dan evaluasi bina marga - Laporan monitoring dan evaluasi sumber daya air - SK Bupati tentang Penetapan Daerah Irigasi - Laporan monitoring dan evaluasi tata ruang - Laporan monitoring dan evaluasi cipta karya - Laporan monitoring dan evaluasi perumahan dan permukiman - Laporan Hasil Monitoring dan evaluasi Dinas Perhubungan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas PUPR - Dinas Perhubungan 	

SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	KET
II	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	<p>IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan dan pengeluaran.</p> $IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$	BPS	<ul style="list-style-type: none"> - Diskominfo - BAPPEDA 	
II.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	<p>Angka Harapan Hidup = (rata-rata jumlah tahun kehidupan yang masih dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu) atau (jumlah rata-rata usia yang diperkirakan pada seseorang atas dasar angka kematian pada masa tersebut yang cenderung tidak berubah di masa mendatang)</p> <p>BPS dalam menghitung menggunakan rumusan dari angka kematian menurut umur (ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan register kematian. Tetapi karena sistem registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan dengan baik maka untuk menghitung Angka Harapan Hidup digunakan cara tidak langsung dengan program Mortpak Lite.</p>	BPS	<ul style="list-style-type: none"> - Diskominfo - Dinas Kesehatan 	
II.2	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	(Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas dan lama pendidikan yang ditamatkan/dijalani/ Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas) x 100%	BPS	<ul style="list-style-type: none"> - Diskominfo - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 	
III	Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan	Indeks Reformasi Birokrasi	Hasil Evaluasi KemenPAN-RB	Laporan Hasil Evaluasi KemenPAN-RB	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruh Perangkat Daerah 	

SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	KET
III.1	Terciptanya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	Opini BPK	Penilaian opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah pada tahun berkenaan	- Laporan Keuangan Daerah hasil Evaluasi dan Penilaian BPK - Laporan pemeriksaan BPK-RI atas LKPD Kabupaten Belitung	- SETDA - BPKAD - Inspektorat	
		Nilai SAKIP Kabupaten Belitung	Nilai hasil evaluasi AKIP oleh Kemen PAN-RB	- Laporan Evaluasi SAKIP Kabupaten - Laporan Hasil Implementasi SAKIP	- SETDA - BAPPEDA - Inspektorat	
III.2	Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional	Indeks Profesionalitas ASN	Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, rumusan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN merupakan jumlah total hasil perkalian dari bobot dimensi/indikator dikalikan skor/nilai masing-masing jawaban dimensi/indikator <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> $IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$ $IP_2 = W_{2k} * R_{2k}$ $IP_3 = W_{3l} * R_{3l}$ $IP_4 = W_{4m} * R_{4m}$ </div> </div> <p>Keterangan:</p> <p>IP - Indeks Profesionalisme IP_i - Indeks Profesionalisme ke-i IP₁ - Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP₂ - Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP₃ - Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja IP₄ - Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin</p> <p>W_{1j} * R_{1j} - Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j W_{2k} * R_{2k} - Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k W_{3l} * R_{3l} - Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l W_{4m} * R_{4m} - Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m</p>	Laporan Hasil Pengukuran Indeks Profesional ASN - BKN	BKPSDM	

SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	KET
IV	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKTL)$ Keterangan: IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Data Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	- Dinas Lingkungan Hidup	
IV.1	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKTL)$ Keterangan: IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Data Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	- Dinas Lingkungan Hidup	

Bangungandan, Januari 2024

Pj. Bupati Belitung,



Yusriani, S.Sos., M.I.R.

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
MISI I : Memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan, khususnya perikanan dan pariwisata secara optimal dan berkelanjutan serta mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi pembangunan sarana dan prasarana perhubungan sebagai penunjang aktivitas ekonomi perikanan dan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat					
<i>Tujuan : Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi</i>					
1	Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	Rasio gini	0,248 - 0,253		IKU
2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Laju pertumbuhan ekonomi	4,5		IKU
3	Menurunnya kemiskinan penduduk	Tingkat kemiskinan	6,40		IKU
4	Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	Persentase pemenuhan infrastruktur kewilayahan	62,84		IKU
MISI 2 : Meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi masyarakat serta para stakeholder lainnya dalam pembangunan daerah					
<i>Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia</i>					
5	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,26		IKU
6	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	71,38		IKU
7	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah	8,78		IKU
<i>Tujuan 2 : Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan</i>					
8	Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan	Indeks Reformasi Birokrasi	B		IKU

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	Terciptanya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	Opini BPK	WTP		IKU
		Nilai SAKIP	BB		IKU
10	Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional	Indeks Profesionalitas ASN	71 - 80	sedang	IKU
MISI 3 : Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan					
<i>Tujuan : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup</i>					
11	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	69,25		IKU

No.	Program		Anggaran
Tujuan Misi 1 : Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi			
Sasaran 1 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan			
1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rp	5.362.530.464
2	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rp	753.286.242
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Rp	434.196.650
4	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Rp	104.893.950
5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Rp	383.220.000
6	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Rp	1.044.416.400
7	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Rp	2.933.958.100
8	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rp	2.352.704.010
9	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rp	236.302.300
10	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Rp	117.293.000
11	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Rp	150.148.000
12	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Rp	760.600.000
13	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Rp	307.217.000
14	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Rp	2.740.968.750
15	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Rp	660.831.100
16	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rp	392.983.200
17	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Rp	1.001.581.000
18	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGKOPERASIAN	Rp	0
19	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Rp	311.620.770
20	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rp	432.568.600
21	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rp	363.399.600
22	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rp	41.369.050

No.	Program		Anggaran
23	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Rp	117.430.982
24	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Rp	450.709.370
25	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rp	45.437.000
26	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rp	911.601.850
27	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp	439.498.900
28	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rp	2.636.710.215
29	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Rp	6.053.838.200
Sasaran 2 : Menurunnya kemiskinan penduduk			
30	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Rp	193.110.000
31	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Rp	0
32	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Rp	61.185.000
33	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp	348.934.400
34	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp	355.284.512
35	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp	644.184.050
Sasaran 3 : Meningkatnya infrastruktur kewilayahan			
36	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rp	2.210.442.886
37	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Rp	5.118.737.350
38	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rp	1.051.260.000
39	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Rp	694.710.000
40	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rp	0
41	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rp	318.770.000
42	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rp	31.029.143.598
43	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rp	83.946.803
44	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rp	0

No.	Program		Anggaran
45	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Rp	608.817.000
46	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Rp	6.375.683.650
47	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp	14.236.573.550
48	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rp	1.587.392.600

Tujuan 1 Misi 2 : Meningkatnya kualitas sumber daya manusia

Sasaran 1 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

49	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp	92.103.300.354
50	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp	2.010.001.840
51	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Rp	396.331.000
52	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rp	508.160.000
53	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rp	104.732.500
54	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rp	985.567.050
55	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rp	2.875.716.000
56	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rp	119.964.378
57	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Rp	57.097.500
58	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Rp	96.259.100

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat

59	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp	61.085.487.055
60	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA PENDIDIKAN	Rp	526.664.350
61	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rp	333.844.900

Tujuan 2 Misi 2 : Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan

Sasaran 1 : Terciptanya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel

62	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp	113.179.109.358
----	-------------------------------------	----	-----------------

No.	Program		Anggaran
63	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rp	1.706.653.857
64	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rp	2.514.288.693
65	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp	18.147.603.100
66	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp	1.402.902.555
67	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp	418.587.057
68	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rp	380.424.450
69	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Rp	328.126.300
70	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Rp	226.224.414
71	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Rp	2.902.432.014
72	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp	253.385.752
73	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp	1.182.598.064
74	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp	4.643.284.000
75	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Rp	1.696.690.200
76	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Rp	776.955.100
77	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Rp	1.294.411.300
78	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Rp	24.138.045.300
79	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Rp	591.050.000
80	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Rp	1.224.715.000
Sasaran 2 : Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional			
81	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rp	2.900.833.720
82	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rp	1.889.920.200

No.	Program	Anggaran
Tujuan Misi 3 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		
83	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp 346.659.900
84	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp 2.417.753.400
85	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Rp 521.213.200
86	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Rp 23.680.500
87	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Rp 49.999.500
88	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Rp 134.195.500
89	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Rp 100.640.200
90	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp 3.628.300
91	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Rp 7.380.397.250
TOTAL ANGGARAN		Rp 450.439.024.313,00



RENCANA KINERJA TAHUN 2024
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	KET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
MISI I : Memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan, khususnya perikanan dan pariwisata secara optimal dan berkelanjutan serta mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi pembangunan sarana dan prasarana perhubungan sebagai penunjang aktivitas ekonomi perikanan dan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat							
<i>Tujuan : Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi</i>							
1	Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi		Rasio gini	0,248 - 0,253		IKU	
		1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Laju pertumbuhan ekonomi	4,5		IKU
		2	Menurunnya kemiskinan penduduk	Tingkat kemiskinan	6,40		IKU
		3	Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	Persentase pemenuhan infrastruktur kewilayahan	62,84		IKU
MISI 2 : Meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi masyarakat serta para stakeholder lainnya dalam pembangunan daerah							
<i>Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas sumber daya manusia</i>							
2	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,26		IKU	
		4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	71,38		IKU
		5	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah	8,78		
<i>Tujuan 2 : Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan</i>							
3	Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan		Indeks Reformasi Birokrasi	B		IKU	

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	KET
(1)	(2)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
		6	Terciptanya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	Opini BPK	WTP		IKU
				Nilai SAKIP	BB		IKU
		7	Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional	Indeks Profesionalitas ASN	71 - 80	sedang	IKU
MISI 3 : Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan							
<i>Tujuan : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup</i>							
3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup			Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	69,25		IKU
		8	Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	69,25		IKU

Banjungsandan, Januari 2024
Pj. Bupati Belitung,

Yusniah, S.Sos., M.I.R.

**RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2024
KABUPATEN BELITUNG**

IKU KABUPATEN TAHUN 2024				PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2024				AKSI KEGIATAN TAHUN 2024		
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(13)	(14)	
Misi I : Memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan, khususnya perikanan dan pariwisata secara optimal dan berkelanjutan serta mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi pembangunan sarana dan prasarana perhubungan sebagai penunjang aktivitas ekonomi perikanan dan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat										
<i>Tujuan : Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi</i>										
1	Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	Rasio Gini	0,248 – 0,253							
2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,5	1	Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase peningkatan kualitas daya tarik wisata	78	%	4.462.634.063	Dinas Pariwisata
				2	Pemasaran pariwisata	Persentase capaian pemasaran pariwisata	100	%	592.678.200	Dinas Pariwisata
				3	Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	84,80	%	434.196.650	Dinas Pariwisata
				4	Pengembangan kesenian tradisionanal	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	50	%	104.893.950	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

IKU KABUPATEN TAHUN 2024				PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2024				AKSI KEGIATAN TAHUN 2024		
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(13)	(14)	
				5	Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang dilestarikan	30	%	383.220.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				6	Pengembangan kebudayaan	Persentase budaya daerah yang dikembangkan	25	%	1.338.416.400	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				7	Pengelolaan permuseuman	Persentase pelajar yang mengunjungi museum	50	%	2.933.958.100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				8	Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase Kebutuhan sarana pertanian	14	%	1.354.920.450	DKPP
				9	Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase prasarana yang digunakan	23,64	%	236.302.300	DKPP
						Persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik	77	%		
				10	Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	100	%	117.293.000	DKPP

IKU KABUPATEN TAHUN 2024				PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2024				AKSI KEGIATAN TAHUN 2024		
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(13)	(14)	
				11	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase penanggulangan bencana pertanian	100	%	150.148.000	DKPP
				12	Perizinan usaha pertanian	Persentase usaha pertanian yang memiliki izin pertanian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100	%	283.600.000	DKPP
				13	Penyuluh pertanian	Peningkatan kelas kelembagaan kelompok tani dan usaha pelayanan jasa alsintan (UPJA)	35	Kelembagaan petani	307.217.000	DKPP
				14	Pengelolaan perikanan tangkap	Produksi perikanan tangkap	43.100	ton	1.120.968.750	Dinas Perikanan
				15	Pengelolaan perikanan budidaya	Produksi perikanan budidaya	170	ton	660.831.100	Dinas Perikanan
				16	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	7,02	%	392.983.200	Dinas Perikanan
				17	Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Produksi pengolahan hasil perikanan	9.000	ton	886.681.000	Dinas Perikanan

IKU KABUPATEN TAHUN 2024				PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2024				AKSI KEGIATAN TAHUN 2024		
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(13)	(14)	
				18	Pendidikan dan Pelatihan Pengkoperasian	Persentase koperasi yang melaksanakan administrasi secara tertib	22	%	0	DKUKMPTK
				19	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase koperasi yang melaksanakan dan menyampaikan RAT tepat waktu	50	%	311.620.770	DKUKMPTK
				20	Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)	Persentase pertumbuhan usaha mikro	4,60	%	337.739.500	DKUKMPTK
				21	Pengembangan UMKM	Persentase peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil	1,87	%	146.386.800	DKUKMPTK
				22	Pengembangan iklim penanaman modal	Jumlah investor yang diberikan insentif dan kemudahan penanaman modal	50	investor	41.369.050	DPMPTSP
				23	Promosi penanaman modal	Persentase promosi penanaman modal	100	%	117.430.982	DPMPTSP
				24	Perencanaan dan Pembangunan industri	Pertumbuhan jumlah IKM	40	IKM	450.709.370	DPMPTSP
				25	Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase laporan ketersediaan bahan kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya	100	%	45.437.000	DKUKMPTK

IKU KABUPATEN TAHUN 2024				PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2024				AKSI KEGIATAN TAHUN 2024		
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(13)	(14)	
				26	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Persentase lembaga kemasyarakatan desa aktif	85	%		DPPKBPM
				27	Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	36	%		DSPPPA
				28	Perekonomian dan Pembangunan	Persentase rekomendasi kebijakan daerah di Bidang Pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang ditindaklanjuti	80	%		Setda
					Persentase rekomendasi kebijakan daerah di Bidang Penyusunan, Pengendalian Program Pembangunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan yang ditindaklanjuti	100	%			
					Persentase rekomendasi kebijakan daerah di Bidang Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa yang ditindaklanjuti	100	%			

IKU KABUPATEN TAHUN 2024				PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2024				AKSI KEGIATAN TAHUN 2024		
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(13)	(14)	
				29	Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Persentase peningkatan prestasi olahraga	75	%	14.644.215.700	DISPORA
3	Menurunnya kemiskinan penduduk	Tingkat kemiskinan	6,40	1	Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang memiliki kompetensi	17	%	193.110.000	DKUKMPTK
				2	Penempatan tenaga kerja	Persentase penyerapan tenaga kerja	20	%	0	DKUKMPTK
				3	Hubungan industrial	Harmonisasi hubungan industrial	100	%	61.185.000	DKUKMPTK
				4	Pemberdayaan sosial	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial	100	%	227.434.400	DSPPPA
				5	Rehabilitasi sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial	100	%	386.048.250	DSPPPA
				6	Perlindungan dan jaminan sosial	Terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial	97,25	%	677.334.050	DSPPPA
4	Meningkatnya infrastruktur kewilayahan	Persentase pemenuhan infrastruktur kewilayahan	62,84	1	Pengelolaan sumber daya air (SDA)	Persentase sumber daya air yang terkelola dengan baik	49,91	%	756.498.989	DPUPR

IKU KABUPATEN TAHUN 2024				PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2024				AKSI KEGIATAN TAHUN 2024		
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(13)	(14)	
				2	Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum aman	18,30	%	2.914.988.200	DPUPR
				3	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase jumlah rumah dengan sistem pengolahan limbah domestik	8,20	%	361.260.000	DPUPR
				4	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik	22,00	%	694.710.000	DPUPR
				5	Penataan bangunan dan lingkungannya	Persentase tertatanya bangunan dan lingkungan	33,33	%	0	DPUPR
				6	Penyelenggaraan penataan ruang	Persentase penyelenggaraan penataan ruang	100	%	318.770.000	DPUPR
				7	Penyelenggaraan jalan	Persentase jalan standar kabupaten	28,25	%	15.567.019.599	DPUPR
				8	Pengembangan perumahan	Persentase penyediaan rumah layak huni korban bencana	100	%	83.946.803	DPUPR
				9	Kawasan permukiman	Persentase pengurangan luasan kawasan kumuh	0,20	%	0	DPUPR

IKU KABUPATEN TAHUN 2024				PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2024				AKSI KEGIATAN TAHUN 2024		
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(13)	(14)	
				10	Perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Persentase penanganan dan pencegahan permukiman kumuh diluar kawasan kumuh	99,80	%	428.817.000	DPUPR
				11	Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas (PSU)	Persentase PSU yang dikelola	66.02	%	2.918.233.650	DPUPR
				12	Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Persentase sarana dan prasarana lalu lintas jalan yang laik	100	%	11.851.640.200	Dinas Perhubungan
				13	Pengelolaan pelayaran	Persentase pelabuhan pengumpain lokal yang dioperasikan	100	%	1.238.932.600	Dinas Perhubungan
Misi 2 : Meningkatnya kualitas hidup dan partisipasi masyarakat serta para stakeholder lainnya dalam pembangunan daerah										
Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas sumber daya manusia										
5	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks pembangunan manusia (IPM)	74,26							
6	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	71,38	1	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Puskesmas terakreditasi madya	100	%	89.749.523.551	Dinas Kesehatan
						Rumah sakit kelas B berstandar internasional	40	%		

IKU KABUPATEN TAHUN 2024				PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2024				AKSI KEGIATAN TAHUN 2024		
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(13)	(14)	
				2	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase peningkatan kapasitas SDM kesehatan	100	%	1.279.857.520	Dinas Kesehatan
				3	Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Tersedianya sediaan farmasi alat kesehatan, makanan dan minuman dan UMOT	100	%	188.489.500	Dinas Kesehatan
				4	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase rumah tangga yang berPHBS	66,60	%	890.947.500	Dinas Kesehatan
						Persentase kabupaten dengan minimal 80% posyandu aktif	90	%		
				5	Pengendalian penduduk	Unmet need	11,95	%	104.732.500	DPPKBPM
				6	Pembinaan keluarga berencana (KB)	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	14,50	%	689.020.600	DPPKBPM
				7	Pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	Persentase PUS ber KB	75,05	%	2.575.746.000	DPPKBPM
				8	Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Persentase konsumsi pangan terhadap angka kecukupan gizi	95,70	%	119.994.000	DKPP

IKU KABUPATEN TAHUN 2024				PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2024				AKSI KEGIATAN TAHUN 2024		
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(13)	(14)	
				9	Penanganan kerawanan pangan	Persentase penurunan status desa/kelurahan rawan pangan	2	%	57.097.500	DKPP
				10	Pengawasan keamanan pangan	Persentase tingkat keamanan pangan	89,29	%	96.259.100	DKPP
7	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah	8,78	1	Pengelolaan pendidikan	Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	100	%	54.952.339.432	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	100	%		
						Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	100	%		
				2	Pendidik dan tenaga pendidikan	Persentase jumlah guru yang memiliki sertifikat pendidik	59,41	%	526.664.350	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				3	Pembinaan perpustakaan	Meningkatnya jumlah pemustaka	12.500		329.344.900	DPKD

IKU KABUPATEN TAHUN 2024				PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2024				AKSI KEGIATAN TAHUN 2024		
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(13)	(14)	
Tujuan 2 : Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan										
8	Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan	Indeks reformasi birokrasi	B							
9	Terciptanya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	Opini BPK	WTP	1	Pengelolaan keuangan daerah	Persentase pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku	100	%	109.055.221.758	BPKAD
		Nilai SAKIP	BB	2	Pengelolaan barang milik daerah	Persentase pengelolaan barang milik daerah yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku	100	%	1.727.114.744	BPKAD
				3	Pengelolaan pendapatan daerah	Peningkatan pendapatan asli daerah	5,18	%	2.528.188.593	BPPRD
				4	Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase rekomendasi kebijakan daerah di Bidang Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan, Kerjasama dan Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti	100	%	18.165.870.500	Setda

IKU KABUPATEN TAHUN 2024				PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2024				AKSI KEGIATAN TAHUN 2024		
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(13)	(14)	
					Persentase rekomendasi kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	%			
					Persentase rekomendasi kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi yang ditindaklanjuti	100	%			
				5	Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase kesesuaian program dokumen perencanaan daerah	100	%	1.514.310.055	Bappeda
				6	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase kesesuaian program dokumen perencanaan perangkat daerah mitra bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dengan program perencanaan pembangunan daerah	100	%	349.796.857	Bappeda
						Persentase kesesuaian program dokumen perencanaan perangkat daerah mitra bidang perekonomian dan sumber daya alam dengan program perencanaan pembangunan daerah	100	%		

IKU KABUPATEN TAHUN 2024				PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2024				AKSI KEGIATAN TAHUN 2024		
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(13)	(14)	
					Persentase kesesuaian program dokumen perencanaan perangkat daerah mitra bidang infrastruktur dan kewilayahan dengan program perencanaan pembangunan daerah	100	%			
				7	Penyelenggaraan pengawasan	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan/pemeriksaan	70	%	364.839.200	Inspektorat
				8	Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Hasil survei penilaian tingkat kepuasan terhadap jasa layanan di bidang pengawasan (perumusan kebijakan teknis, pendampingan dan asistensi)	84	%	399.838.300	Inspektorat
				9	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi	60	%	196.224.414	Diskominfo
				10	Pengelolaan aplikasi informatika	Persentase terintegrasinya sistem informasi pelayanan publik dan birokrasi	97	%	2.691.883.014	Diskominfo
				11	Penyelenggaraan statistik sektoral	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data statistik sektoral	100	%	253.385.752.	Diskominfo

IKU KABUPATEN TAHUN 2024				PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2024				AKSI KEGIATAN TAHUN 2024		
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(13)	(14)	
				12	Pengelolaan Informasi dan komunikasi publik	Persentase diseminasi informasi kebijakan yang didiseminasikan	100	%	720.570.424	Diskominfo
				13	Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	100	%	4.582.693.600	SATPOLPP
				14	Penanggulangan bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	%	424.517.700	BPBD
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	%		
						Persentase warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	%		
				15	Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	%	760.455.100	BPBD

IKU KABUPATEN TAHUN 2024				PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2024				AKSI KEGIATAN TAHUN 2024		
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(13)	(14)	
				16	Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	100	%	994.411.300	Badan Kesbangpol
				17	Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Persentase parpol dan lembaga pendidikan yang mendapatkan pendidikan politik daan pengembangan etika serta budaya politik	100	%	24.002.140.300	Badan Kesbangpol
				18	Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Persentase fasilitasi pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan masalah ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100	%	570.750.000	Badan Kesbangpol
				19	Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	Persentase penanganan konflik sosial di masyarakat	100	%	825.815.000	Badan Kesbangpol

IKU KABUPATEN TAHUN 2024				PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2024				AKSI KEGIATAN TAHUN 2024			
SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(13)	(14)
10	Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional	Indeks profesionalitas ASN	71 - 80	sedang	1	Kepegawaian daerah	Persentase pemenuhan penataan ASN sesuai ketentuan	100	%	3.595.331.100	BKPSDM
					2	Pengembangan sumber daya manusia	Persentase sumber daya aparatur sipil negara yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	65	%	1.646.938.075	BKPSDM
Misi 3 : Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan											
<i>Tujuan : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup</i>											
11	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	69,25		1	Perencanaan lingkungan hidup	Kesesuaian kebijakan rencana program (KRP) yang disusun oleh Pemerintah Daerah dengan prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan	100	%	423.873.500	DLH
					2	Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Persentase pengurangan dampak pencemaran/kerusakan lingkungan hidup Kabupaten Belitung	25	%	1.174.018.300	DLH
					3	Pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati	40,48	%	131.544.800	DLH

IKU KABUPATEN TAHUN 2024				PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2024				AKSI KEGIATAN TAHUN 2024		
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(13)	(14)	
				4	Pengendalian bahan bahaya dan beracun (B3) dan limbahbahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)	Persentase pengendalian limbah B3	65	%	23.680.500	DLH
				5	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air, udara dan tutupan lahan	39	%	49.999.500	DLH
				6	Pengakuan kberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Rekomendasi calon MHA	2	Calon MHA	134.198.800	DLH

IKU KABUPATEN TAHUN 2024				PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2024				AKSI KEGIATAN TAHUN 2024		
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(13)	(14)	
				7	Peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Meningkatnya kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	58	kelompok	95.341.300	DLH
				8	Penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	%	28.970.500	DLH
				9	Pengelolaan persampahan	Persentase jumlah sampah yang dikelola	60	%	6.853.419.000	DLH

Banungpandan, Januari 2024

Pj. Bupati Belitung,



Yusniah, S.Sos., M.I.R

LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KABUPATEN BELITUNG

TAHUN 2024

BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. BELITUNG